



AKTIVITAS

BADAN PUSAT STATISTIK
KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO

2021





AKTIVITAS
BADAN PUSAT STATISTIK
KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO
2021

AKTIVITAS

BADAN PUSAT STATISTIK

KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO

2021

ISSN :
No. Publikasi :
Katalog BPS : 1202101

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : viii + 170

Naskah : BPS Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro

Penyunting : BPS Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro

Desain Cover oleh : FUNGSI IPDS

Penerbit : BPS Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro

Pencetak : BPS Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro

Sumber Ilustrasi : BPS Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR



Irena Listianawati, SST, SE, M.Si.
Kepala BPS Kab. Kep. Sitaro

Tahun 2021 merupakan tahun yang cukup padat untuk Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Disamping kegiatan survei rutin BPS, berbagai kegiatan besar juga telah dilaksanakan di tahun ini, diantaranya yaitu Sensus Penduduk Online dan Sensus Penduduk September 2021 yang telah diselesaikan dengan baik, tentunya karena adanya kerja keras, kesungguhan, dan sinergi dari seluruh pegawai BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Pelaksanaan kegiatan BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tahun 2021 ini dapat dinilai berhasil. Hal ini tercermin dari berbagai pencapaian prestasi yang diraih, baik dalam hal pengelolaan teknis, pengelolaan administrasi, serta pelayanan publik. seperti rilis Daerah Dalam Angka dan beberapa indikator lainnya, serta melakukan sejumlah langkah dalam membangun Sinergisitas dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Walaupun demikian, keberhasilan atas pelaksanaan seluruh kegiatan dan pencapaian prestasi BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tahun 2021 yang terangkum dalam Laporan Aktivitas BPS Tahun 2021 ini harus menjadi pendorong dan semangat untuk terus meningkatkan diri dalam hal memberikan data yang berkualitas dan beragam, memberikan pelayanan yang baik bagi pengguna data, terus melakukan kolaborasi dan inovasi, serta terus berbenah dalam hal pengelolaan administrasi terutama pelaksanaan proses administrasi yang benar dan tepat waktu.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Memberkati langkah kita bersama untuk tetap bisa menjalankan tugas dan peran kita masing-masing sebagai insan statistik serta bersama-sama membangun BPS agar menjadi kantor statistik berkelas dunia sebagai **Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua.**

Ondong Siau, April 2022

Kepala BPS Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro

Irena Listianawati, SST, SE, M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
IKHTISAR	vii
PERISTIWA PENTING 2021	vii
SUB BAGIAN UMUM	1
1. Pengelolaan Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1
2. Layanan Dukungan Manajemen Satker	2
2.1 Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	2
2.2 Pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi	9
2.3 Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	11
2.4 Pengelolaan Kepegawaian	14
2.5 Pelayanan Umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	19
3. Pengelolaan Layanan Perkantoran	20
3.1 Gaji dan Tunjangan	20
3.2 Layanan Perkantoran	23
FUNGSI IPDS	31
SURVEI KEBUTUHAN DATA (SKD) 2021	31
2.1 Segmentasi Pengguna Data Menurut Karakteristik	31
2.1.1 Pengguna Data Menurut Jenis Kelamin	31
2.1.2 Pengguna Data Menurut pendidikan terakhir yang ditamatkan	31
2.1.3 Segmentasi Pengguna Data Menurut Pekerjaan Utama	32
2.1.4 Segmentasi Pengguna Data Menurut Instansi/ Institusi Tempat Pekerjaan Utama	33
2.2 Segmentasi Pengguna Data Menurut Pemanfaatan Hasil Kunjungan	33
2.3 Segmentasi Pengguna Data Menurut Jenis Layanan yang Digunakan	34
PENYUSUNAN PUBLIKASI DAERAH DALAM ANGKA (DDA) 2021	35
PENYUSUNAN PUBLIKASI KECAMATAN DALAM ANGKA (KCA) 2021	36
PEMBENTUKAN BS2021	37
FUNGSI STATISTIK SOSIAL	39

SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL (SAKERNAS) FEBRUARI TAHUN 2021	39
SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL (SUSENAS) MARET TAHUN 2021	49
POLITIK DAN KEAMANAN (POLKAM) TAHUN 2021	57
FUNGSI STATISTIK PRODUKSI	61
STATISTIK PERTANIAN HORTIKULTURA (SPH)	61
STATISTIK PERTANIAN (SP)	68
Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan	71
STATISTIK PERIKANAN (PP-TPI)	73
Survei Perusahaan Peternakan Dan RPH/TPH	78
Survei Perusahaan Perikanan, TPI/PPI/PP	79
STATISTIK PERTAMBANGAN DAN ENERGI	83
Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Tahunan	89
Survei Pertambangan, Energi dan Penggalian, Captive Power dan Updating Direktori	90
Survei Konstruksi (Updating Perusahaan Konstruksi, SKTH dan SKP)	92
FUNGSI STATISTIK DISTRIBUSI	95
LAPORAN KEGIATAN STATISTIK DATA TRANSPORTASI	95
LAPORAN KEGIATAN SURVEI HARGA PERDESAAN	100
LAPORAN KEGIATAN INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI	105
LAPORAN KEGIATAN STATISTIK PARIWISATA	109
LAPORAN KEGIATAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	114
LAPORAN STATISTIK PERDAGANGAN ANTAR WILAYAH (PAW)	118
LAPORAN UPD DIREKTORI PASAR DAN PUSAT PERDAGANGAN	123
FUNGSI NERWILLIS	127
PENGELUARAN RUMAH TANGGA DAN INSTITUSI NIRLABA	127
PENGELUARAN PEMERINTAH	142
PMTB DAN INVENTORI	146
KONSOLIDASI PDRB MENURUT PENGELUARAN	157

IKHTISAR

PERISTIWA PENTING 2021



<https://sitarokab.bps.go.id>

SUB BAGIAN UMUM

1. Pengelolaan Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Layanan Sarana dan Prasarana sangat penting untuk menunjang kegiatan BPS Kabupaten Kepulauan SITARO salah satunya yaitu operasional kendaraan dinas. Pada Tahun 2021, BPS Kabupaten Kepulauan SITARO mengadakan kendaraan dinas roda empat Eselon III berupa kendaraan dinas roda empat Toyota Innova 2.0 G M/T Gasoline Vin 2021 Warna Hitam sesuai dengan Surat Pesanan No. 01/PPK-SP/Mobnas/03/2021 Tanggal 30 Maret 2021 dan Beria Acara Pembayaran (BAP) No. 001/PPK/BAP/04/2021 Tanggal 3 April 2021 senilai Rp. 335.000.000.

Tabel 1.1. Realisasi Anggaran Layanan Sarana dan Prasarana Internal sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2019 (Rp)	Naik (Turun) %
Pengadaan Kendaraan Dinas Eselon III	335.000.000	0	0,00
Jumlah Bruto	335.000.000	0	0,00
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	335.000.000	0	0,00

2. Layanan Dukungan Manajemen Satker

2.1 Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran

BPS Kabupaten Kepulauan SITARO berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga untuk Menyusun KA-KL dalam rangka mengikuti dinamika perkembangan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berbasis Kinerja.

Pada awal Tahun Anggaran 2021, total anggaran BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp. 5.667.659.000 yang dana seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni (RM). Anggaran BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terbagi ke dalam 2 program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) dan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) yang masing-masing sebesar Rp. 3.451.155.000 dan Rp. 2.216.504.000. Anggaran ini juga dikelompokkan berdasarkan per jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal yang masing-masing sebesar Rp. 2.581.985.000, Rp. 526.941.000 dan Rp. 342.229.000.

Tabel 2.1.

Rincian Anggaran Berdasarkan Program dan Jenis Belanja

Uraian	2021	
	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	3.451.155.000	3.382.925.000
BELANJA PEGAWAI	2.581.985.000	2.581.985.000
BELANJA BARANG	526.941.000	465.940.000
BELANJA MODAL	342.229.000	335.000.000

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2.216.504.000	928.188.000
BELANJA BARANG	2.216.504.000	926.688.000
BELANJA MODAL	0	1.500.000
Jumlah Belanja	5.667.659.000	4.311.113.000

Untuk memenuhi kebutuhan anggaran di masing-masing kegiatan pada Satuan Kerja BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sehingga dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali revisi sampai 31 Desember 2021 yang diatur dalam PMK 39/PMK.02/2021 tentang Tata Cara revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021. Adapun revisi yang dilakukan dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Revisi Anggaran DIPA ke 1 Tanggal 5 Februari 2021

Revisi pertama dilakukan oleh BPS Republik Indonesia (RI) sesuai dengan Surat Pengguna Anggaran Nomor B-008/BPS/1000/01/2021 meliputi pergeseran antar anak satker guna menyesuaikan kebutuhan anggaran pada masing-masing Satuan Kerja di BPS se-Indonesia, dimana DIPA awal sebesar Rp. 5.667.659.000 menjadi 5.795.340.000. Perubahan Anggaran pada masing-masing kegiatan di BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 2886.951 (Layanan Sarana/Prasarana Internal)

Anggaran pada output ini sebelum direvisi sebesar Rp. 342.229.000 yang merupakan anggaran pengadaan kendaraan bermotor, kemudian dilakukan revisi anggaran menjadi Rp. 671.829.000 yang merupakan total anggaran dari pembangunan/renovasi gedung dan bangunan dan anggaran pengadaan kendaraan bermotor. Revisi ini dilakukan untuk realokasi anggaran belanja modal di seluruh BPS se-Indonesia.

- 2886.994 (Layanan Perkantoran)

Anggaran pada output ini sebelum direvisi sebesar Rp. 3.058.886.000, kemudian dilakukan revisi anggaran menjadi Rp. 3.059.872.000. Perubahan pada output ini terjadi pada volume mata anggaran keluaran pemeliharaan gedung kantor sebelumnya 145,5 M2/TH

menjadi 154 M2/TH. Revisi ini dilakukan untuk realokasi anggaran pemeliharaan gedung kantor di seluruh BPS se-Indonesia.

- 2904.006 (Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi)

Revisi anggaran ini dilakukan karena ada perubahan sampel dari BPS Republik Indonesia sehingga anggaran pada output ini sebelum direvisi sebesar Rp. 16.998.000, kemudian dilakukan revisi anggaran menjadi Rp. 15.638.000. Perubahan pada output ini terjadi pada komponen survei pertambangan, energi, penggalian, dan updating direktori dan komponen survei konstruksi. Perubahan untuk Komponen Survei pertambangan, energi, penggalian dan updating direktori terjadi pada mata anggaran keluaran belanja perjalanan dinas dalam kota yang sebelumnya sebesar Rp. 2.078.000 menjadi Rp. 2.978.000. sedangkan perubahan pada komponen survei konstruksi pada mata anggaran keluaran belanja honor output kegiatan dan belanja perjalanan dinas dalam kota yang sebelumnya sebesar Rp. 8.634.000 menjadi Rp. 6.374.000.

- 2905.006 (Publikasi/Laporan Sensus Penduduk)

Anggaran pada output ini sebelum direvisi sebesar Rp. 1.603.935.000, kemudian dilakukan revisi anggaran menjadi Rp. 1.402.145.000. Perubahan pada output ini terjadi pada komponen publisitas SP2021 dan pendataan short form SP2021 masing-masing sebesar Rp. 160.000.000 dan Rp. 1.437.135.000 setelah direvisi menjadi Rp. 60.000.000 dan Rp. 1.335.345.000. Revisi ini dilakukan karena penyelenggaraan publisitas daerah dialokasikan sebesar Rp. 50.000.000 per Kabupaten/Kota dan Rp. 100.000.000 per provinsi. Kemudian honor ketua sls pada kegiatan pendataan short form SP2021 (pelaksanaan sensus mandiri) hanya dibayarkan selama 1 (satu) bulan yaitu pada bulan pencacahan di Bulan Juli 2021. Belanja perjalanan dinas dalam kota dalam rangka supervisi pelaksanaan CAWI oleh BPS Kabupaten/Kota ditiadakan.

- 2908.004 (Publikasi/Laporan statisitik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Yang Terbit Tepat Waktu)

Anggaran pada output ini sebelum direvisi sebesar Rp. 5.167.000, kemudian dilakukan revisi menjadi Rp. 5.412.000. Hal ini dikarenakan ada penambahan uang saku pada transport briefing petugas.

b. Revisi Anggaran DIPA ke 2 Tanggal 26 Februari 2021

Pada revisi yang kedua dilakukan penyesuaian kebutuhan anggaran pada masing-masing mata anggaran keluaran, perubahan perencanaan penarikan dana dan perubahan pejabat administrasi.

c. Revisi Anggaran DIPA ke 3 Tanggal 29 April 2021

Anggaran sebelum dilakukan revisi sebesar Rp. 5.795.340.000, kemudian dilakukan revisi menjadi Rp. 4.307.271.000. Revisi ketiga dilakukan karena adanya penghematan anggaran untuk penanganan covid-19 sesuai dengan surat penghematan anggaran Tahun 2021 Nomor B-083/BPS/1000/4/2021 Tanggal 16 April 2021.

- Pada program DMPTTL, dilakukan penghematan anggaran pada belanja barang (output 970 dan 994) dan belanja modal dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perjalanan dinas sebesar 70% dari sisa anggaran
 - b. Seluruh Paket *meeting* (termasuk peralatan dan perlengkapannya) dihemat sebesar 100% dari sisa anggaran.
 - c. Penghematan honor narasumber, transport lokal, dan uang harian dalam kota sebesar 50% dari sisa anggaran.
 - d. Penghematan pada item kegiatan lain yang masih bisa diefisiensikan termasuk operasional perkantoran dengan mempertimbangkan kebutuhan sampai dengan akhir tahun.
- Pada program PPIS, dilakukan penghematan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Biaya pencacahan dan pemeriksaan organik yang dilakukan di masa WFH (*work from home*) dan dilakukan secara *online* dihemat 100%. Hanya disediakan anggaran untuk pembelian pulsa.

- b. Penghematan perjalanan dinas konsultasi/pengawasan sebesar 70% dari sisa anggaran.
- c. Penghematan biaya pemeriksaan/revisit yang dilakukan oleh organik sebesar 50% dari sisa anggaran.
- d. Pelatihan, bimtek, dan workshop menggunakan *online* sehingga anggaran dihemat 100%. Hanya disediakan biaya pulsa serta honor mengajar untuk pelatihan. Pengecualian pada daerah *remote* (susah sinyal), masih dapat melakukan pelatihan secara tatap muka.
- e. FGD dengan pihak eksternal, dilakukan penghematan dengan mengalokasikan anggaran sewajarnya, FGD DDA dapat dilakukan penghematan dengan melakukan secara *online*.
- f. Belanja operasional yang tidak digunakan dihemat sebesar 100%.
- g. ATK, komputer supplies dan pengiriman dokumen dihemat sesuai perkiraan kebutuhan sampai dengan 1 tahun.
- h. Anggaran pada kegiatan SP2021 dihemat sebesar 100% pada komponen 513.E (pendataan short form SP2021 pelaksanaan lapangan), 516 (pengolahan SP2021), 517 (penjamin kualitas).

d. Revisi Anggaran DIPA ke 4 Tanggal 7 September 2021

Pada revisi yang keempat dilakukan penyesuaian kebutuhan anggaran pada masing-masing mata anggaran keluaran, komponen, dan output, perubahan perencanaan penarikan dana serta usulan pagu Sensus Penduduk (SP) 2021 berdasarkan surat revisi anggaran dalam rangka adaptasi tatanan normal baru (lanjutan) No B-200/BPS/1000/8/2021 Tanggal 24 Agustus 2021. Anggaran sebelum dilakukan revisi sebesar Rp. 4.307.271.000 menjadi Rp. 4.311.113.000. Perubahan Anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Pada Program DMPTTL, kegiatan 2886.994 ada penambahan anggaran pelaksanaan rapid test Covid-19 sebesar Rp. 6000.000.
- Pada Program PPIS, terdapat penyesuaian kebutuhan anggaran pada kegiatan 2902 dan 2905. Perubahan yang pertama, pada kegiatan 2902.004 yang anggaran sebelumnya adalah Rp. 4.589.000 dilakukan revisi ke kegiatan 2902.005 sebesar Rp. 1.350.000. Sehingga, anggaran pada kegiatan 2902.004 berubah menjadi Rp.

3.239.000 dan anggaran pada kegiatan 2902.005 berubah menjadi Rp. 1.802.000. Perubahan berikutnya pada kegiatan 2905.006 yaitu anggaran Sensus Penduduk 2021 yang sebelumnya sebesar Rp. 486.444.000 menjadi Rp. 484.286.000. Berkurangnya anggaran pada kegiatan ini, mengacu pada dasar hitung penyesuaian Proses Bisnis SP2021 yang baru, serta mengoptimalkan anggaran pada komponen 512 dan 513 Sub Komponen A, B, C dan D (proses bisnis lama).

e. Revisi Anggaran DIPA ke 5 Tanggal 2 November 2021

- Revisi kelima dilakukan karena adanya Perubahan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) BPS Tahun Anggaran 2021 yang tertuang dalam Perka BPS Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 67 Tahun 2019 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Pusat Statistik Tahun anggaran 2021. Dalam peraturan ini, kegiatan yang mengalami perubahan yaitu pada Kegiatan 2905.005 (Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan) pada akun 521213 (Honor Output Kegiatan) rincian Pencacahan Rumah Tangga Sakernas Semesteran dan Tahunan yang sebelumnya Rp.61.000 per RT menjadi Rp. 50.000 per RT, 2906.003 (Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat Yang Terbit Tepat Waktu) pada akun 521213 (Honor Output Kegiatan) rincian Updating BS yang sebelumnya Rp. 110.000 per BS menjadi Rp. 65.000, rincian biaya pencacahan Susenas yang sebelumnya Rp. 104.000 per RT menjadi Rp. 74.000 per RT serta rincian entri dokumen Susenas dari Rp. 15.000 per Dokumen menjadi Rp. 12.000 per Dokumen.
- Revisi kelima juga dilakukan berdasarkan Surat Nomor B-482/BPS/2000/10/2021 Tanggal 21 Oktober 2021 tentang dasar hitung pengolahan dan revisi SP2021, revisi anggaran belanja barang (52) ke belanja modal (53), serta kekurangan belanja pegawai dan belanja operasional satker (komponen 001 dan 002 pada output 994) dan realokasi anggaran kegiatan survei dan sensus. Mengacu surat Revisi tersebut, BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro melakukan revisi belanja barang sebesar Rp. 1.500.000 menjadi belanja modal pada kegiatan 2910.007 (Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan), penyesuaian belanja pegawai pada akun 511125 (Belanja Tunjangan PPh PNS) yang sebelumnya Rp. 1.157.000 menjadi

Rp. 1.684.000 serta melakukan penyesuaian anggaran berdasarkan kebutuhan untuk masing-masing kegiatan.

f. Revisi Anggaran DIPA ke 6 Tanggal 2 Desember 2021

Revisi keenam dilakukan untuk menyesuaikan anggaran pada masing-masing kegiatan dan Revisi Halaman III DIPA sesuai dengan Surat Usulan Revisi Nomor B.693/BPS/7108.92810/11/2021 Tanggal 30 November 2021. Adapun revisi penyesuaian ini dapat diuraikan seperti berikut:

- Kegiatan 2886.970 (Layanan Dukungan Manajemen Satker)

Pada kegiatan ini dilakukan penyesuaian anggaran pada komponen 053 (Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan) pada akun 524111 (Belanja Perjalanan Dinas Biasa) yang sebelumnya Rp. 13.370.000 menjadi Rp. 15.350.000.

- Kegiatan 2886.994 (Layanan Perkantoran)

Pada kegiatan ini dilakukan penyesuaian anggaran pada komponen 002 (Operasional dan Pemeliharaan Kantor) pada beberapa akun yaitu akun 521114, 523121, 521111 dan penyesuaian akun covid.

- Kegiatan 2897.004 (Sistem Pendukung Layanan Untuk Diseminasi Data dan Informasi Statistik yang dikembangkan dan dipelihara)

Pada Kegiatan ini dilakukan revisi penyesuaian belanja barang pada akun 521811 pada revisi sebelumnya tidak ada menjadi ada dengan nilai sebesar Rp. 2.250.000.

- Kegiatan 2900.005 (Dokumen, Laporan, dan Publikasi Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei)

Pada kegiatan ni dilakukan revisi penyesuaian belanja barang pada komponen 200 (Pemutakhiran Sistem dan Program MFD dan MBS Berbasis Web) pada akun 524111 (Belanja Perjalanan Dinas Biasa) yang sebelumnya tidak ada menjadi ada dengan nilai sebesar Rp. 2.297.000.

- Kegiatan 2904.006 (Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi)

Pada kegiatan ini dilakukan revisi penyesuaian belanja barang pada komponen 100 (Survei Industri Mikro dan Kecil Tahunan) pada akun 524111 (Belanja Perjalanan Dinas Biasa) yang sebelumnya tidak ada menjadi ada dengan nilai sebesar Rp. 1.942.000.

- Kegiatan 2910.007 (Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan)

Pada kegiatan ini dilakukan revisi penyesuaian belanja barang pada komponen 051 (Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubunan) pada akun 524111 (Belanja Perjalanan Dinas Biasa) yang sebelumnya tidak ada menjadi ada dengan nilai sebesar Rp. 2.367.000.

g. Revisi Anggaran DIPA ke 7 Tanggal 22 Desember 2021

Revisi ketujuh ini dilakukan hanya untuk pemutakhiran data petunjuk operasional kegiatan sesuai dengan surat Nomor B.746/BPS/7108.92810/12/2021 Tanggal 22 Desember 2021.

2.2 Pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi

Monitoring evaluasi anggaran dan kegiatan BPS Kabupaten Kepulauan SITARO yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan BPS antara lain melakukan pengumpulan data, analisis informasi, serta melaporkan kepada pimpinan secara bulanan per kegiatan, progres penyerapan anggaran dan progres kegiatan pengadaan barang/jasa. Adapun laporan yang secara rutin dihasilkan yaitu Laporan realisasi daya serap anggaran, Laporan SPI, monitoring pengadaan barang dan jasa, monitoring waktu penyampaian dan realisasi kontrak barang dan jasa, laporan Form Rencana Aksi Triwulan melalui Aplikasi Monev BPS, dan pelaporan Kerjasama melalui Aplikasi Sistem Informasi pelaporan Kerjasama. Selain laporan rutin tersebut, monitoring dan evaluasi juga menghasilkan Laporan Aktivitas yang terbit secara tahunan yang merangkum dan menguraikan seluruh aktivitas BPS Kabupaten Kepulauan SITARO selama Tahun 2021, dalam bentuk narasi dan dilengkapi dengan gambar dan tabel serta menyajikan realisasi sampel kegiatan teknis BPS. Sedangkan untuk monitoring dan

2.3 Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan

Penyelenggaraan administrasi keuangan dan perbendaharaan BPS Kabupaten Kepulauan SITARO yang bersumber dari dana dalam DIPA bersumber dari Anggaran Rupiah Murni (RM). Salah satu hal pokok yang perlu dilakukan oleh satuan kerja dalam proses pencairan dana APBN adalah membuat rekening Pemerintah pada Satuan Kerja/Kementerian Negara/Lembaga yang digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran belanja atau untuk menampung kegiatan lainnya.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga, diatur mengenai Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan Rekening Lainnya pada Bank Umum/Kantor Pos.

Keluaran yang dihasilkan dalam pengelolaan keuangan dan perbendaharaan berupa dokumen pertanggungjawaban pengeluaran uang dan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan.

a. Dokumen pertanggungjawaban pengeluaran uang

Dokumen pertanggungjawaban pengeluaran uang berupa tanda bukti belanja bahan, kuitansi atau daftar pembayaran honor/upah, tanda bukti dan kuitansi pembayaran perjalanan dinas, tanda bukti atau kuitansi belanja operasional untuk mendukung kegiatan, lengkap dengan berkas pengadaannya. Seluruh dokumen pertanggungjawaban tersebut disimpan secara tertib sebagai arsip keuangan. Dalam rangka meminimalisasi kesalahan dalam proses administrasi sebelum pengeluaran anggaran diajukan ke KPPN, perlu dilakukan pemeriksaan bukti pendukung pengeluaran anggaran yang disampaikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), melalui mekanisme Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM). Koordinasi dan Kerjasama antar satuan kerja, Panitia Pelelangan/Pejabat Pengadaan, *subject matter*, Perbendaharaan dan Verifikasi sangat dibutuhkan sehingga dapat memperlancar proses penyelesaian pencairan anggaran. Kegiatan verifikasi secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) tahap yaitu *monitoring* anggaran dan verifikasi anggaran. Pada tahap *monitoring* anggaran dilakukan pengecekan kesesuaian kode akun pada SPP dengan DIPA/POK, dan ketersediaan pagu anggaran serta kesesuaian uraian kegiatan dalam DIPA/POK. Melalui proses *monitoring* anggaran, pada setiap bulan

dilakukan pelaporan realisasi penggunaan anggaran sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan ke Direktorat/Biro di lingkungan BPS. Tahap selanjutnya dilakukan verifikasi dokumen SPP, dengan tujuan untuk memastikan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi keuangan. Pada proses ini diketahui jumlah dokumen SPP yang diterima dan diverifikasi, jumlah dokumen SPP yang batal, dan jumlah SPM yang diterbitkan.

Tabel B.2.3

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2021

Uraian	2021		
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Real Anggaran
BELANJA PEGAWAI	2.581.985.000	2.040.228.159	79,02
BELANJA BARANG	1.392.628.000	1.276.548.152	91,66
BELANJA MODAL	336.500.000	336.500.000	100,00
Jumlah Netto	4.311.113.000	3.653.276.311	84,74

b. Laporan Keuangan

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. BPS Kabupaten Siau Tagulandang Biaro adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pusat Statistik yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara semesteran dan tahunan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPS Kabupaten Siau Tagulandang Biaro mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Tahun 2021 dilakukan 3 kali yaitu Semesteran dan Triwulan dan Tahunan 2021. Dalam penyusunan rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dibutuhkan rekonsiliasi internal data SAIBA dan SIMAK BMN dan Persediaan.

Rekonsiliasi data SAIBA adalah kegiatan penyampaian Laporan Realisasi Anggaran berupa Laporan Realisasi Belanja, Realisasi Pengembalian Belanja, Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah, serta Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah. Proses rekonsiliasi adalah berupa membandingkan ADK dalam SAIBA BPS dengan ADK dalam SPAN KPPN.

2.4 Pengelolaan Kepegawaian

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sangat penting dalam menunjang kegiatan perkantoran. Untuk menjalankan tugasnya dalam menyediakan data sebagai indikator baik dalam hal perencanaan maupun evaluasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta, BPS Kabupaten Kepulauan SITARO senantiasa memperhatikan komposisi SDM sehingga apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi yang diemban dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga, perlu adanya tahapan untuk peningkatan kapasitas SDM dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penilaian kebutuhan diklat dan pengembangan SDM bagi BPS Kabupaten Kepulauan SITARO oleh Pusdiklat BPS
2. Mengusulkan dan mengirimkan pegawai mengikuti diklat dan pengembangan SDM
3. Mengevaluasi yang telah mengikuti diklat dan pengembangan SDM
4. Mendokumentasikan dan mengkompilasi dokumen administrasi kepegawaian
5. Melaksanakan pelayanan administrasi dan database kepegawaian (SIMPEG)
6. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian dan Menyusun laporan kegiatan kepegawaian.

Adapun data kepegawaian BPS Kabupaten Kepulauan SITARO dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel B.2.4
DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PPNPN s.d 31 DESEMBER TAHUN 2021

NO	NAMA	NIP	GOLONGAN	JABATAN
1	RAYMOND A.E. KODOATI, SE, M.Si	196704301993031003	IV/b	KEPALA KANTOR
2	STEFANUS GEORGE LUMI, SE	197509062005021001	III/c	KASUBBAG UMUM
3	JIMS E.S. MAWALI	197503281994031001	III/c	KOORDINATOR FUNGSI STAT. SOSIAL
4	DEYSKE PUASA, SE	197912072010032001	III/c	KOORDINATOR FUNGSI STAT.

				PRODUKSI
5	SUYANTO H. SUPARTO, SE	196512211989031009	III/d	KOORDINATOR FUNGSI STAT. DISTRIBUSI
6	MEITY CHINTYA SINADIA, SE	198605262010032001	III/c	FUNGSIONAL UMUM
7	SATRIO FARLI TANGKUDUNG	199310122016021001	III/b	KOORDINATOR FUNGSI IPDS
8	APRILIA TIFANI SUMENDA, SST	199504202117012001	III/a	BENDAHARA
9	WULANDARI PONTO, SST	199412012017012001	III/a	STAF KOORDINATOR FUNGSI STAT. SOSIAL
10	NADIA TATUM TSANIYA	199801182019122002	III/a	STAF KOORDINATOR FUNGSI STAT. PRODUKSI
11	NURTIA KATIANDAGHO, SST	199409252017012001	III/a	STAF KOORDINATOR FUNGSI STAT. DISTRIBUSI
12	NABELLA INTAN KARASTA, S.Tr.Stat	199609222019012003	III/a	STAF KOORDINATOR FUNGSI STAT. NERWILIS
13	YOSUA NATANAEL, SST	198911182012111001	III/b	STAF KOORDINATOR FUNGSI IPDS
14	ORTJE MANAHAMPI	197202132002122004	III/a	KSK SIAU BARAT SELATAN DAN SIAU TENGAH
15	REYSKE MEYTY JACOBS	197809252006042019	II/d	KSK SIAU TIMUR
16	ANISA SEKARWATI, Amd.Stat	199811022019122002	II/c	KSK SIAU BARAT

17	SENDHY E. BAHESEH	NON PNS		PETUGAS KEBERSIHAN
18	ERNES KAUMBUR	NON PNS		SATPAM
19	SONNY NESARE	NON PNS		SATPAM
20	BRAM HENOCH	NON PNS		SATPAM

Tabel B.2.4

DAFTAR MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2021

NO	NAMA PEGAWAI	MUTASI				NO SK	TMT
		LAMA		BARU			
		JABATAN	SATKER	JABATAN	SATKER		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	NADYA TATUM TSANIYA, S.Tr.Stat	IKATAN DINAS	STIS	STAF STAT. PRODUKSI	BPS KAB. KEPL. SITARO	1129426/K PG TAHUN 2019	1 Dese mber 2019
2	ANISA SEKARW ATI, Amd.Stat	IKATAN DINAS	STIS	STAF TATA USAHA	BPS KAB KEPL, SITARO	1129054/K PG TAHUN 2019	1 Dese mber 2019
3	SATRIO FARLI TANGKU DUNG, SST	STAF STAT. PRODU KSI	BPS KOTA TOMO HON	KASIE IPDS	BPS KAB. KEPL. SITARO	045/71/KP G TAHUN 2021	1 April 2021
4	ANISA SEKARW ATI, Amd.Stat	STAF TATA USAHA	BPS KAB KEPL. SITAR O	KSK KECAMATAN SIAU BARAT	BPS KAB. KEPL.	052/KPG TAHUN 2021	1 Mei 2021
5	INTAN ANGELIA SENDUK,	STAF IPDS	BPS KAB KEPL.	KASIE IPDS	BPS KOTA BITUNG	070/71/KP G TAHUN 2021	1 Nove mber

	SST		SITAR O				2021
6	MEITY CHINTYA SINADIA, SE	KASIE NERWI LIS	BPS KAB KEPL. SITAR O	FUNGSIONAL UMUM	BPS KAB KEPL. SITARO	1230005/K PG TAHUN 2021	30 Dese mber 2021

Tabel B.2.5

DAFTAR KENAIKAN PANGKAT/GAJI BERKALA PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN
2021

No.	Nama Pegawai	Jenis SK	No SK	Tanggal SK
1	Suyanto H Suparto, SE	SK KGB 3D26	B.042/BPS/7108.92810/3/2021	1 Maret 2021
2	Deyske Puasa, SE	SK KGB 3C10	B.041/BPS/7108.92810/3/2021	1 Maret 2021
3	Meity C. Sinadia, SE	SK KGB 3C10	B.042/BPS/7108.92810/3/2021	1 Maret 2021
4	Nabella I. Karasta, S.Tr.Stat	SK KPG 100%	017/71/KPG Tahun 2021	2 Januari 2021
5	Yosua Natanael, SST	SK KGB 3B08	B.654/BPS/7108.92810/11/2021	1 November 2021
6	Anisa Sekarwati, Amd.Stat	SK KPG 100%	1201350/KPG Tahun 2021	1 Desember 2021
7	Nadya T. Tsaniya, S.Tr.Stat	SK KPG 100%	1201342/KPG Tahun 2021	1 Desember 2021

Tabel B.2.6

PERSENTASE PEGAWAI BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2021

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	S2	1	6

2	S1/DIV	11	69
3	DIII	1	6
4	SMA	3	19
TOTAL			100

<https://sitarokab.bps.go.id>

2.5 Pelayanan Umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan

Pelayanan umum, rumah tangga dan perlengkapan sangat penting untuk menunjang operasional sehari-hari perkantoran. Pelayanan ini meliputi:

1. Pemeliharaan sarana dan prasarana yaitu 1 Gedung kantor, halaman kantor, peralatan dan mesin (1 Unit Kendaraan dinas beroda empat, 13 Kendaraan dinas roda dua, 1 PC Unit, 16 PC Unit, 9 Buah Laptop, 3 Buah Notebook serta peralatan dan mesin lainnya), jaringan (listrik, Telepon LAN) serta Pemeliharaan Inventaris Kantor untuk 20 Pegawai.
2. Kebutuhan rumah tangga meliputi kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa (Telepon dan listrik), internet dan email, jasa pramubakti dan satuan pengaman (12 Bulan).
3. Penatausahaan Barang Milik Negara (SIMAK BMN dan Aplikasi Persediaan) baik Bulanan, Triwulanan, Semesteran bahkan Tahunan.

Untuk meningkatkan Pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan terlaksana diperlukan tahapan pengelolaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menginventarisir kebutuhan rumah tangga BPS meliputi kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa (telepon dan listrik), internet dan email, jasa pramubakti dan satuan pengaman.
2. Pengadaan, penatausahaan, pendistribusian dan evaluasi kebutuhan rumah tangga BPS sesuai dengan kebutuhan dan tahapan.
3. Menginventarisir kebutuhan pemeliharaan Gedung, halaman, kendaraan bermotor, peralatan dan mesin dan inventaris kantor.
4. Pendistribusian dan penatausahaan sarana dan prasarana (SIMAK BMN dan Aplikasi Persediaan) serta melaksanakan rekonsiliasi SIMAK BMN ke KPKNL.
5. Pelaporan kegiatan pengelolaan rumah tangga dan sarana/prasarana BPS

3. Pengelolaan Layanan Perkantoran

3.1 Gaji dan Tunjangan

Kegiatan penatausahaan administrasi keuangan meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, pembayaran biaya pindah pegawai karena mutasi dan pensiun, penataan arsip keuangan dan pengelolaan penyelesaian kerugian negara (TPTGR). Dalam aktivitas pembayaran gaji dan tunjangan Tahun 2021, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO) menggunakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL).

Untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan BPS Kabupaten Kepulauan SITARO meliputi pembayaran gaji pokok, pembayaran tunjangan suami/istri, pembayaran tunjangan anak pegawai, pembayaran tunjangan struktural, pembayaran tunjangan pajak penghasilan (PPH), pembayaran tunjangan beras, pembayaran uang makan PNS, pembayaran tunjangan umum, pembayaran uang lembur pegawai dan pembayaran tunjangan kinerja.

- Pembayaran gaji pokok pegawai termasuk gaji bulan ke-13, tunjangan hari raya (THR), serta tunjangan-tunjangan telah tercantum dan diatur dalam undang-undang sebagai payung hukumnya. Ketiga aspek ini merupakan kewajiban sekaligus hak yang perlu didapatkan dan dipenuhi oleh setiap pegawai yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Yang termasuk dalam gaji pokok pegawai Tahun 2021 adalah pembayaran gaji berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang gaji pegawai negeri sipil.
- Pembayaran tunjangan suami/istri ini diberikan bagi PNS yang telah berkeluarga, baik itu suami atau istrinya. Masing-masing akan mendapatkan tunjangan suami/istri dengan besaran 10 persen dari gaji pokok dengan aturan yang berlaku. Salah satu aturan tersebut adalah bagi suami/istri yang berkedudukan sama seperti PNS maka tunjangan keluarganya tidak diberikan kepada kedua-duanya melainkan tetap diberikan kepada salah satu yang gaji pokoknya paling tinggi.
- Pembayaran tunjangan anak pegawai diberikan jika dalam satu keluarga memiliki anak kandung ataupun anak angkat, masing-masing akan mendapatkan bagian dari 2 persen dari gaji pokok. Aturannya adalah anak yang mendapatkan tunjangan berusia maksimal

25 tahun, namun belum memiliki pendapatan sendiri, belum pernah menikah dan masih menjadi tanggungan orang tuanya yang berstatus sebagai PNS. Hal ini diatur dalam PP No.13 Tahun 1980, perubahan dan penambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil.

- Pembayaran tunjangan struktural adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang berkedudukan sebagai pejabat struktural yang didasarkan pada jabatan eselon. Jumlahnya memang lebih besar jika dibandingkan dengan tunjangan jabatan umum. Tata pembayarannya dan besarnya diatur dalam Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2007.
- Pembayaran tunjangan PPh adalah tunjangan untuk pemotongan gaji atas penghasilan yang didapatkan oleh PNS, TNI dan POLRI, baik yang masih aktif kerja ataupun yang telah memasuki masa pensiun. Pemotongan dilakukan secara otomatis dengan dibebankan ke APBN sebagaimana tercantum dalam PMK No. 101/PMK.010/2016 mengenai kenaikan tarif penghasilan tidak kena pajak berlaku sejak Tanggal 1 Januari 2016.
- Pembayaran tunjangan beras diberikan kepada PNS setiap bulan berdasarkan pada harga beras yang berlaku saat ini. Namun biasanya besarnya ditentukan atas harga pembelian oleh Pemerintah kepada Perum Bulog. Tunjangan beras ini terbagi menjadi dua yaitu natura dan uang. Untuk pegawai yang menerima dalam bentuk natura maka harga yang digunakan adalah Rp. 8.047, sedangkan pegawai yang menerima dalam bentuk uang sebesar Rp. 7.242. tunjangan ini hanya dibatasi kepada 2 orang anak saja dengan masing-masing mendapatkan 10kg/bulan.
- Pembayaran uang makan PNS diberikan kepada setiap pegawai per bulan dengan besaran yang berbeda menurut golongan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang perubahan atas PMK Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 dan merujuk ke PMK Nomor 110/PMK.05/2010 tentang tata cara pembayaran uang makan bagi PNS. Uang makan diberikan berdasarkan kehadiran PNS di kantor pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan dan besarnya uang makan yang diberikan kepada PNS per hari sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam PMK. Uang makan tidak diberikan kepada PNS yang tidak hadir kerja, sedang menjalankan perjalanan dinas, sedang menjalankan cuti, sedang menjalani tugas belajar dan sebab-sebab lain yang menyebabkan PNS tidak diberikan uang makan.

Berikut ini satuan biaya uang makan bagi PNS:

1. PNS Golongan I dan II: Rp. 35.000 per hari
 2. PNS Golongan III: Rp. 37.000 per hari
 3. PNS Golongan IV: Rp. 41.000 per hari
- Pembayaran tunjangan umum diberikan dengan tujuan untuk memaksimalkan kinerja serta mendorong pegawai untuk lebih bersemangat mencapai prestasi kerja.
 - Pembayaran uang lembur pegawai diberikan kepada PNS yang melakukan kerja lembur tiap-tiap kali selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh dapat diberikan uang lembur. Besarnya uang lembur untuk tiap-tiap jam penuh kerja lembur bagi PNS adalah sesuai dengan ditetapkan dalam PMK tentang Standar Biaya Umum. Pemberian uang lembur pada hari libur kerja adalah sebesar 200% dari besarnya uang lembur.
 - Pembayaran tunjangan kinerja pegawai berdasarkan pada jabatan tertentu dan kelas jabatan tertentu. Besaran tunjangan kinerja harus berdasarkan kinerja, bobot pekerjaan dan absensi kehadiran. Nilai dan kelas jabatan struktural dan fungsional digunakan untuk menentukan besaran gaji yang adil dan juga selaras dengan beban pekerjaan dan juga tanggung jawab dari jabatan itu sendiri. Nilai dan juga kelas suatu jabatan diperoleh ataupun ditetapkan melalui prosedur yang disebut evaluasi jabatan yang digunakan dalam pemberian tunjangan. Pembayaran tunjangan kinerja diberikan setiap bulan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tunjangan kinerja tidak diberikan kepada pegawai yang tidak memiliki tugas/pekerjaan/jabatan tertentu, pegawai diberhentikan untuk sementara atau di nonaktifkan, pegawai yang diberhentikan dari pekerjaan/jabatan dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai PNS), pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/Instansi Lain, dan pegawai yang cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Dalam pelaksanaan dilingkup BPS Kabupaten Kepulauan SITARO, diperlukan menerima Surat Keputusan mutasi pegawai dari BPS Republik Indonesia dan BPS Provinsi Sulawesi Utara, *update* data ke dalam aplikasi GPP, finalisasi penyusunan daftar pembayaran gaji, rekonsiliasi penggunaan dan sisa dana, pengelolaan Tunjangan Kinerja Pegawai (Tukin) dengan memperhatikan komponen nilai grade, presensi, hukuman disiplin dan CKP sedangkan uang makan komponennya adalah presensi.

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.040.228.159 dan Rp2.540.201.209. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel B.3.1

Perbandingan Belanja Pegawai Sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2019 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.048.519.820	1.236.876.774	(15,23)
Belanja Lembur	31.719.000	30.105.000	5,36
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	960.359.743	1.273.222.248	(24,57)
Jumlah Bruto	2.040.598.563	2.540.204.022	(19,67)
Pengembalian Belanja	370.404	2.813	13.067,58
Jumlah	2.040.228.159	2.540.201.209	(19,68)

3.2 Layanan Perkantoran

1. Satpam dan Petugas Kebersihan/Pramubakti

BPS Kabupaten Kepulauan SITARO memiliki 3 orang satpam dan 1 orang petugas kebersihan dan pramubakti di tahun 2021. Masing-masing bernama Ernes Kaumbur (Satpam), Bram Henoeh (Satpam), Sony Nesare (Satpam) dan Julita Sendhy Elisabeth Baheseh (petugas kebersihan dan pramubakti). Tugas satpam adalah menjaga keamanan dan ketertiban kantor selama 24 jam sedangkan tugas kebersihan dan pramubakti adalah menjaga lingkungan dalam kantor dan halaman kantor agar tetap bersih dan indah serta sebagai

pramubakti bagi pegawai dan tamu yang datang. Untuk satpam dibagi menjadi 2 shift dalam sehari yaitu pagi dan malam secara bergantian, sedangkan untuk petugas kebersihan dan pramubakti bertugas dari senin sampai sabtu dengan mengikuti jam kantor. Dalam sebulan diberikan hak tau fasilitas berupa gaji, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Tabel B.3.2.1 Nama PPNPN (Satpam dan CS) dan Honor per Bulan Tahun 2021

No	Nama	Jabatan	Honor per Bulan (Rp)
1	Ernes Kaumbur	Satpam/Petugas Kemanan	3.232.000
2	Bram Henoch	Satpam/Petugas Kemanan	3.232.000
3	Sony Nesare	Satpam/Petugas Keamanan	3.232.000
3	Julita Sendhy Elisabeth Baheseh	CS/Pramubakti	2.938.000

2. Langganan Koran

Akses informasi terhadap dunia luar baik meliputi pekerjaan maupun informasi terkini lainnya dapat dipenuhi diantaranya melalui media surat kabar (koran). Oleh karena itu, BPS Kabupaten Kepulauan SITARO memfasilitasi hal tersebut dengan berlangganan koran. Dalam tahun 2021, BPS Kabupaten Kepulauan SITARO hanya berlangganan 1 (satu) jenis koran lokal yaitu “Manado Post”.

3. Belanja Pengiriman Surat Dinas

Dalam keseharian kegiatan perkantoran, terdapat kegiatan baik teknis maupun non-teknis melakukan pengiriman dokumen dinas. Pada Tahun 2021, BPS Kabupaten kepulauan SITARO melakukan pengiriman dokumen dinas ke BPS RI, BPS Provinsi Sulawesi Utara, KPKNL Manado, Kanwil DJPb Manado, KPPN dan Instansi lain. Pengiriman berupa surat-surat Dinas Kepegawaian dan Keuangan, Dokume Hasil Pencacahan, Dokumen Laporan Keuangan, Persuratan Penatausahaan BMN, dan lain-lain.

4. Honor Operasional Satuan Kerja

Dalam penyelenggaraan kegiatan keseharian di setiap instansi pemerintah secara umum, diperlukan peraturan perundangan mengenai pengelola keuangan dan pengelola pengadaan kegiatan, maka Pengguna Anggaran (PA) BPS RI yang dalam hal ini dijabat oleh Kepala BPS RI menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di BPS Kabupaten Kepulauan SITARO Tahun 2021 dalam hal ini dijabat oleh Kepala BPS Kabupaten Kepulauan SITARO A.n Raymond Audey Engelbert Kodoati, SE, M.Si. Kemudian KPA menetapkan pejabat lainnya seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pembuat SPM (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Staf Pengelola Keuangan, Pejabat Pengadaan Barang dan jasa. Selain itu, dalam penyelenggaraan perkantoran terkhusus pengelolaan barang milik negara dan perbendaharaan, KPA juga menetapkan petugas pengurus/penyimpan BMN, operator SIMAK BMN dan Operator SAIBA. Setiap pejabat tersebut diatas, diberikan hak berupa honor per bulan atas tugas dan fungsi masing-masing.

- *Tabel B.3.2.4.1 Pengelola Anggaran, PPBJ, PPHP, Operator dan
Pengurus/Penyimpan BMN Tahun 2021*

No	Nama/NIP	Jabatan	Honor (Rp)	Nomor SK dan Tanggal SK
1	Raymond A.E. Kodoati, SE, M.Si	Kuasa Pengguna Anggaran	2.280.000	001/KPA/2021 Tanggal 2 Januari 2021
2	Stefanus George Lumi, SE	Pejabat Penanda Tangan SPM	880.000	001/KPA/2021 Tanggal 2 Januari 2021
3	Aprilia T. Sumenda, SST	Bendahara Pengeluaran	770.000	001/KPA/2021 Tanggal 2 Januari 2021
4	Deyske Puasa, SE	Staf Pengelola Keuangan	570.000	001/KPA/2021 Tanggal 2 Januari 2021
5	Nurtia Katiandagho, SST	Pejabat Penanda Tangan SPM	880.000	015/KPA/2021 Tanggal 27 Januari 2021
6	Intan Angelia Senduk, SST	Pengurus Penyimpan BMN	300.000	005/KPA/2021 Tanggal 2 Januari 2021
7	Nabella Intan Karasta, S.Tr.Stat	Operator SIMAK BMN	150.000	004/KPA/2021 Tanggal 2 Januari 2021

Pada Triwulan ke II, KPA BPS Kabupaten Kepulauan SITARO merubah dan menetapkan Pejabat Pengadaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

- *Tabel B.3.2.4.2 Pejabat Pengadaan Tahun 2021*

No	Nama/NIP	Jabatan	Honor (Rp)	Nomor SK dan Tanggal SK
1	Deyske Puasa, SE	Pejabat Pengadaan	680.000	020/KPA/2021 Tanggal 1 April 2021

Pada Triwulan ke IV tepatnya pada Bulan Oktober 2021, terjadi mutasi/rotasi jabatan dan beberapa pegawai mengalami kenaikan pangkat. Ada pejabat pengurus/penyimpan BMN yang mutasi ke BPS Bitung sehingga KPA harus merubah dan menetapkan Kembali pejabat pengurus/penyimpan BMN dan Staf Pengelola Keuangan.

Tabel B.3.2.4.3 Perubahan jabatan Pengurus/Penyimpan BMN dan Staf Pengelola Keuangan Tahun 2021

No	Nama/NIP	Jabatan	Honor (Rp)	Nomor SK dan Tanggal SK
1	Nadya Tatum Tsaniya, S.Tr.Stat	Pengurus/Penyimpan BMN	300.000	034.a/KPA/2021 Tanggal 1 Oktober 2019
2	Anisa Sekarwati, Amd.Stat	Staf Pengelola Keuangan	570.000	034.b/KPA/2021 Tanggal 1 Oktober 2021

5. Belanja Langganan Listrik

Untuk menunjang operasional dan aktifitas kegiatan perkantoran sehari-hari, BPS Kabupaten Kepulauan SITARO menggunakan listrik berdaya 16.000 VA.

6. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas di BPS Kabupaten Kepulauan SITARO terdiri atas kendaraan dinas roda empat yaitu mobil dinas bagi Kepala Kantor dan kendaraan dinas roda dua bagi Kepala FUNGSI dan KSK yang berjumlah 13 Unit roda dua dalam kondisi baik. Kendaraan dinas senantiasa dipantau kondisi serta diperlihara sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia pada Tahun 2021. Agar kondisi kendaraan dinas tetap terjaga, maka diberikan biaya pemeliharannya per bulan. Pemeriksaan kondisi kendaraan bermotor dilakukan setiap semesteran oleh Kepala BPS Kabupaten Kepulauan SITARO guna mengetahui secara rinci kondisi kendaraan satu per satu untukantisipasi dan agar dilakukan perbaikan di bengkel atas kerusakan tersebut, dan juga setiap tahunnya kendaraan dinas membayar pajak tahunan di Kantor SAMSAT.



Gambar Kendaraan Dinas

7. Gedung Bangunan Negara

BPS Kabupaten Kepulauan SITARO memiliki Gedung kantor dan halaman kantor. Oleh karena itu, diberikan biaya untuk merawat Gedung kantor dan halaman tersebut agar meminimalisir kerusakan dan halaman/pekarangan tetap terjaga keindahan dan kebersihannya.



Gambar B.3.2.7 Gedung Kantor BPS Kabupaten Kepulauan SITARO

8. Sarana Kantor

Selain bangunan Gedung kantor, BPS Kabupaten Kepulauan SITARO juga terdapat BMN lain yang berada didalamnya selain kendaraan dinas. Barang-barang tersebut seperti jaringan listrik, generator, komputer/Laptop, AC, server, mesin handkey, printer, barang inventaris kantor da UPS. Agar BMN tetap terjaga kondisinya, maka disediakan biaya pemeliharaan.





Gambar B.3.2.8 Sarana Kantor BPS Kabupaten Kepulauan SITARO

9. Keperluan sehari-hari perkantoran

Belanja keperluan perkantoran adalah biaya pembelian alat rumah tangga perkantoran yang bersifat habis pakai.

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.276.548.152.

Tabel B.3.2 Belanja Barang Sampai dengan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	278.307.892	21,80
Belanja Barang Non Operasional	528.924.760	41,43
Belanja Barang Persediaan	21.730.000	1,70
Belanja Jasa	51.668.500	4,05
Belanja Pemeliharaan	74.761.500	5,86
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	321.155.500	25,16

Jumlah Bruto	1.276.548.152	100
Pengembalian Belanja	0	0,00
Jumlah	1.276.548.152	100

<https://sitarokab.bps.go.id>

FUNGSI IPDS

SURVEI KEBUTUHAN DATA (SKD) 2021

Pelaksanaan SKD 2021 di PST BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan target responden sebanyak 30 orang seperti yang diperlihatkan pada tabel 2.1. Realisasi responden melampaui target yaitu sebanyak 36 responden yang terdiri dari 29 responden pencacahan manual dari pengunjung PST dan 7 responden dari pengguna online link.

Tabel 2.1 Target dan Realisasi Pengguna Data Wilayah PST BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 2021

Jenis Pendataan	Target	Realisasi			Per- sentase
		Laki- Laki	Perem- puan	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pencacahan Manual (VKD20)	30	19	10	29	120
Pengguna Online Link	0	7	0	7	-
Total	30	26	10	36	120

Dari 36 pengguna data yang berkunjung ke PST BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, terdapat 34 pengguna data (94,44 persen) yang memanfaatkan data BPS sebagai rujukan utama. Selebihnya atau sebanyak 2 orang (5,56 persen) tidak memanfaatkan data BPS sebagai rujukan utama. Dengan kata lain, sebagian besar pengguna data menggunakan data BPS sebagai informasi tambahan atau pendukung kegiatan yang dilakukannya.

2.1 Segmentasi Pengguna Data Menurut Karakteristik

2.1.1 Pengguna Data Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pengguna data yang berjenis kelamin laki – laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Persentase pengguna data berjenis kelamin laki – laki sebesar 72,22 persen, dan sebesar 27,78 persen untuk pengguna data berjenis kelamin perempuan.

2.1.2 Pengguna Data Menurut pendidikan terakhir yang ditamatkan

Berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan, pengguna data kurang dari atau sama dengan SLTA/ sederajat sebesar 33,33 persen. Lebih lanjut, pengguna data lulusan perguruan tinggi sebesar 66,67 dengan rincian lulusan D1/D2/D3 sebesar 8,33 persen, lulusan D4/S1 sebesar 58,33 persen dan lulusan S2/S3 sebesar 0,00 persen. Lebih rinci mengenai pengguna data berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Persentase Pengguna Data Menurut Pendidikan Terakhir Wilayah PST BPS Kab. Kepl. Siau Tangulandang Biaro, 2021

Pendidikan Terakhir	Pengguna Data
(1)	(2)
SLTA/Sederajat	33,33
D1/D2/D3	8,33
D4/S1	58,33
S2/S3	0,00
Jumlah	100,00

2.1.3 Segmentasi Pengguna Data Menurut Pekerjaan Utama

Berdasarkan pekerjaan utama, pengguna data dikelompokkan menjadi Pelajar/Mahasiswa, Peneliti/Dosen, PNS/TNI/Polri, Pegawai BUMN/D, Pegawai Swasta, Wiraswasta dan Lainnya. Konsep pekerjaan utama dalam SKD 2021 adalah pekerjaan responden pada saat pencacahan. Segmentasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi pemanfaatan data BPS.

Tabel 2.3 menunjukkan persentase pengguna data BPS berdasarkan pekerjaan utama. Hasil SKD menunjukkan bahwa sebanyak 16,67 persen pengguna data adalah mahasiswa, sebanyak 50,00 persen pengguna data adalah PNS/TNI/Polri, sebanyak 5,56 persen pengguna data adalah Pegawai BUMN/D, sebanyak 8,33 persen pengguna data adalah Pegawai Swasta. Selebihnya 19,44 persen adalah pengguna data yang menjawab lainnya.

Tabel 2.3 Persentase Pengguna Data Menurut Pekerjaan Utama di PST BPS Kab. Kepl. Siau Tangulandang Biaro, 2021

Pekerjaan Utama	Pengguna Data
(1)	(4)
Pelajar/ Mahasiswa	16,67
Peneliti/Dosen	0,00
PNS/TNI/Polri	50,00
Pegawai BUMN/D	5,56
Pegawai Swasta	8,33
Wiraswasta	0,00
Lainnya	19,44
Jumlah	100,00

2.1.4 Segmentasi Pengguna Data Menurut Instansi/ Institusi Tempat Pekerjaan Utama

Tabel 2.4 menggambarkan persentase pengguna data berdasarkan instansi/institusi tempat pekerjaan utama. Terlihat bahwa sebesar 44,44 persen pengguna data berasal dari Pemerintah daerah. Sementara pengguna data yang bekerja pada BUMN dan BUMD sebesar 5,56 persen.

Tabel 2.4 Persentase Pengguna Data Menurut Instansi/Institusi Tempat Pekerjaan Utama di PST BPS Kab. Kepl. Siau Tangulandang Biaro

Instansi/Institusi Tempat Pekerjaan Utama	Pengguna Data
(1)	(2)
Lembaga Pendidikan & Penelitian Dalam Negeri	27,78
Lembaga Pendidikan & Penelitian Luar Negeri	-
Kementerian & Lembaga Pemerintah	16,67
Lembaga Internasional	-
Media Massa	-
Pemerintah Daerah	44,44
Perbankan	-
BUMN/D	5,56
Swasta Lainnya	5,56
Lainnya	-
Jumlah	100,00

2.2 Segmentasi Pengguna Data Menurut Pemanfaatan Hasil Kunjungan

Pemanfaatan data atau hasil kunjungan dikelompokkan menjadi tugas sekolah/kuliah, skripsi/tesis/disertasi, penelitian, penyebaran informasi, serta perencanaan dan evaluasi. Sebagian besar data dimanfaatkan untuk pemerintahan yaitu sebesar 66,67 persen. Sementara data yang digunakan untuk tugas sekolah sebesar 19,44 persen dan untuk penelitian sebesar 13,89 persen. Lebih lanjut mengenai gambaran pengguna data menurut pemanfaatan hasil kunjungan digambarkan pada tabel 2.5.

Tabel 2.5 Persentase Pengguna Data Menurut Pemanfaatan Hasil Kunjungan Utama di PST BPS Kab. Kepl. Siau Tangulandang Biaro, 2021

Pemanfaatan hasil Kunjungan	Pengguna Data
(1)	(2)
Tugas Sekolah/kuliah	19,44
Pemerintahan	66,67
Penelitian	13,89
Jumlah	100,00

2.3 Segmentasi Pengguna Data Menurut Jenis Layanan yang Digunakan

Gambaran persentase pengguna data berdasarkan jenis layanan terdapat pada tabel 2.6. Pengguna data yang menggunakan layanan Perpustakaan Digital adalah yang paling diminati oleh pengguna data yaitu sebesar 80,56 persen. Layanan lainnya yang banyak digunakan adalah perpustakaan (tercetak) sebesar 16,67 persen. Sementara, pengguna yang menggunakan layanan konsultasi data statistik sangat sedikit atau sebesar 2,78 persen.

Tabel 2.6 Persentase Pengguna Data Menurut Jenis Layanan yang Digunakan di PST BPS Kab. Kepl. Siau Tangulandang Biaro, 2021

Jenis Layanan yang Digunakan	Persentase Pengguna Data
(1)	(2)
Perpustakaan Tercetak	16,67
Perpustakaan Digital	80,56
Penjualan Buku	-
Layanan Data Mikro/Peta digital/ Publikasi	-
Konsultasi Data Statistik	2,78
Konsultasi Kegiatan & Rekomendasi Statistik	-
Jumlah	100,00

PENYUSUNAN PUBLIKASI DAERAH DALAM ANGKA (DDA) 2021



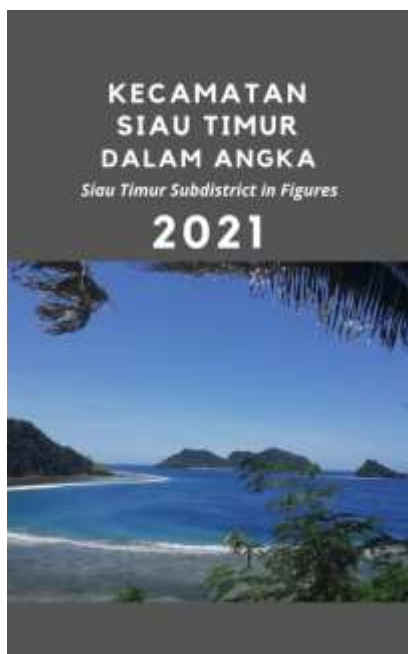
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Dalam Angka 2021 adalah publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Publikasi ini menyajikan data secara komprehensif dari berbagai bidang, dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang keadaan geografis, iklim, ciri-ciri, keadaan sosial dan perekonomian Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Penyusunan Publikasi ini dilakukan sebanyak 2 kali, yang pertama pada bulan Februari disusun DDA percepatan yang merupakan terobosan baru BPS dalam menyediakan data dengan lebih cepat. Namun pada bulan februari hanya disusun sejumlah 10 bab, adapun pada bulan September disusun DDA dengan lebih lengkap yang terdiri dari 13 bab.

Publikasi ini disusun oleh satu orang staf IPDS yaitu saudari Intan A. Senduk, SST. dan diperiksa oleh Kepala BPS selaku penanggung jawab.

Penyusunan publikasi ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat dipublikasikan tepat waktu sesuai jadwal ARC. Terima kasih dan apresiasi untuk para penyedia data baik dinas maupun instansi terkait yang telah membantu dalam menyediakan data untuk penyusunan publikasi ini. Harapan kami kedepan publikasi ini bisa memberikan lebih banyak informasi bagi pemerintah maupun masyarakat selaku pengguna data.

PENYUSUNAN PUBLIKASI KECAMATAN DALAM ANGKA (KCA) 2021



Kecamatan Dalam Angka 2021 adalah publikasi tahunan yang disusun oleh Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) di BPS Kab. Kep. Sitaro. Publikasi ini menyajikan data secara komprehensif dari berbagai bidang, untuk memberikan gambaran tentang keadaan geografis, pemerintahan, ciri-ciri, keadaan sosial dan ekonomi Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Penyusunan publikasi ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat dipublikasikan tepat waktu sesuai jadwal ARC. Terima kasih dan apresiasi untuk para penyedia data baik di kecamatan maupun kelurahan/desa yang telah membantu dalam menyediakan data untuk penyusunan publikasi ini. Harapan kami kedepan publikasi ini bisa memberikan lebih banyak informasi bagi pemerintah maupun masyarakat selaku pengguna data.

PEMBENTUKAN BS2021

Kegiatan tahun 2021 yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pengembangan metodologi Sensus dan Survei (PMSS) dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya di bidang metodologi sensus dan survei antara lain:

- a. Penyusunan desain survei dan pelaksanaan Post Enumeration Survey (PES) SP2021,
- b. Klasifikasi Statistik, Standar Data dan SBR,
- c. Pembangunan sistem pengelolaan kerangka sampel (FRS),
- d. Implementasi Geospatial System,

Seluruh kegiatan ini melibatkan Bidang IPDS BPS Provinsi dan FUNGSI IPDS Kabupaten/Kota sebagai perpanjangan lini dari Direktorat PMSS.

Kegiatan statistik yang diselenggarakan BPS tidak pernah lepas dari master wilayah kerja statistik (wilkerstat). Wilkerstat yang lebih dikenal dengan Master File Desa (MFD) dan Master Blok Sensus (MBS) dijadikan rujukan dalam kegiatan sensus dan survei BPS dari tahap perencanaan sampai dengan diseminasi hasilnya. Master wilkerstat harus selalu dimutakhirkan mengikuti perubahan wilayah dan perkembangan muatannya. Sejak tahun 2010 Sistem Pemutakhiran MFD dan MBS atau MFDONLINE mulai diimplementasikan secara rutin untuk merekam perubahan wilayah yang terjadi sampai tingkat blok sensus (BS). Mengingat master wilkerstat digunakan di setiap tahapan kegiatan statistik dan saling terkait, pemutakhiran master wilkerstat menjadi sangat penting artinya.

Adanya rotasi/mutasi pegawai yang cepat di BPS daerah menyebabkan cepatnya pergantian penanggung jawab kegiatan tersebut. Untuk itu diperlukan kegiatan internalisasi, sosialisasi dan transfer of knowledge untuk memperlancar setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, dengan mengumpulkan penanggung jawab daerah dalam suatu kegiatan peningkatan kapasitas bidang metodologi sensus dan survei.

Selain kegiatan rutin di lingkungan Direktorat PMSS, dalam rangka persiapan Sensus Penduduk 2021 (SP2021) di tahun 2019 dilaksanakan Kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2021 di seluruh desa pada 514 kabupaten/kota. Dalam kegiatan ini desa dibagi habis menjadi wilayah SLS dan non SLS. Output yang dihasilkan adalah peta SLS/Non SLS, serta master dan muatan SLS/Non SLS. Muatan dalam SLS/Non SLS sangat bervariasi di setiap daerah.

Dalam penyusunan metodologi sensus dan survei diperlukan enumeration area sebagai unit penarikan sampel. Sangat bervariasinya muatan pada setiap SLS/Non SLS mengakibatkan harus dibentuk unit penarikan sampel yang lebih seragam dengan muatan yang relatif sama. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan pembentukan blok sensus 2021 (BS2021) sebagai enumeration area untuk kegiatan survei selama 10 tahun ke depan. Muatan enumeration area yang lebih homogen menjadikan kontrol metodologi lebih mudah dan mengurangi bias estimasi. Pembentukan BS2021 ini berdasarkan peta dan muatan hasil Kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2021 tahun 2019. Kegiatan pembentukan BS2021 juga menjadi tanggung jawab BPS Kabupaten/Kota.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan ini diawali dengan Pelatihan Petugas (*Briefing*) yang dilaksanakan 1 hari efektif pada tanggal 8 Mei 2021 (laporan briefing dicantumkan pada lampiran 1). Setelah pelatihan petugas (*Briefing*) selesai dilaksanakan selanjutnya adalah tahap pelaksanaan pembentukan BS2021 yang dilakukan oleh petugas pembentukan BS2021 pada Minggu I April 2021 sampai dengan Minggu V Oktober 2021.

<https://sitarokab.bps.go.id>

FUNGSI STATISTIK SOSIAL

SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL (SAKERNAS) FEBRUARI TAHUN 2021

Umum

Mengingat semakin besar tuntutan Pemerintah, masyarakat dan pemakai data lainnya terhadap pelayanan dan penyediaan data Bidang Statistik Sosial, maka diperlukan upaya optimal dan strategi yang baik, sehingga BPS dapat menjadi Pelopor Data Statistik Terpercaya sesuai dengan misi BPS. Data ketenagakerjaan yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui sensus dan survei antara lain: Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Dari survei-survei tersebut, hanya SAKERNAS yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan.

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai proses kegiatan dan pelaksanaannya serta kendala dan solusi yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan Survei Angkatan Kerja Nasional Tahun 2021. Survei Angkatan Kerja Nasional Semesteran Tahun 2021 berada pada FUNGSI Statistik Kependudukan (BPS Provinsi). SAKERNAS Semester 1 dilaksanakan pada bulan Februari 2021 dan Semester 2 dilaksanakan pada Bulan Agustus 2021. SAKERNAS Februari penyajiannya hanya sampai tingkat nasional dan provinsi, sedangkan untuk SAKERNAS Agustus penyajiannya dapat dilakukan sampai level kabupaten/kota karena jumlah sampelnya mencukupi atau setara dengan pelaksanaan Sakernas tahun-tahun sebelumnya. Hingga saat ini, Sakernas mengalami berbagai perubahan baik waktu pelaksanaan, level estimasi, cakupan, maupun metodologinya.

Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas sejak tahun 1984 menggunakan Konsep dasar Angkatan Kerja (*Standard Labour Force Concept*) yang tertuang dalam *International Conference of Labour Statistician (ICLS)* ke 13 tahun 1982. Pada tahun 2013, *International Labour Organization (ILO)* menyelenggarakan ICLS ke-19 yang menghasilkan beberapa pengembangan konsep definisi variabel-variabel ketenagakerjaan, serta menyesuaikan konsep aktivitas produktif (*Work*) dengan batasan produksi umum Sistem Neraca Nasional (SNA). Selain itu, saat ini isu ketenagakerjaan semakin berkembang, seperti dengan munculnya fenomena pekerja informal (*informal employment*), tuntutan akan pekerjaan layak (*decent work*) dan pekerja berbasis rumahan (*home based worker*). Oleh karena itu dianggap perlu untuk mengumpulkan data yang terkait dengan fenomena tersebut. Perubahan konsep definisi dan ukuran-ukuran statistik ketenagakerjaan pada ICLS 19 dan perkembangan isu ketenagakerjaan menjadi latar belakang perlunya *redesign* kuesioner Sakernas, sehingga diharapkan akan lebih mampu menjawab tuntutan kebutuhan data ketenagakerjaan.

Mulai tahun 2016, kuesioner Sakernas sudah mengadopsi 2 konsep baku ketenagakerjaan dari ICLS ke-13 dan ICLS ke-19 meskipun konsep ICLS ke-19 belum diakomodir secara utuh. Sakernas 2017 dilakukan penyempurnaan alur pertanyaan dengan konsep ICLS ke-19. Pada Sakernas 2018 dilakukan penyempurnaan kembali penerapan konsep ICLS ke-19 mencakup penyempurnaan alur pertanyaan dan penambahan beberapa pertanyaan dalam kuesioner salah satunya menangkap fenomena pekerja berbasis online serta program padat karya yang berasal dari dana desa. Untuk Sakernas 2019 sudah mengadopsi konsep status pekerjaan dari ICLS ke-20 tahun 2018 dan ada tambahan pertanyaan untuk menangkap fenomena ekonomi digital. Sakernas Februari 2021 dilakukan penambahan pertanyaan mengenai migrasi internasional, penyederhanaan pilihan jawaban dan perubahan

urutan pertanyaan pada Subblok V.G. Sedangkan pada Sakernas Agustus 2021 menggunakan konsep ketenagakerjaan ICLS-13, ada penambahan pertanyaan terkait dampak covid-19 terhadap ketenagakerjaan serta adanya penyederhanaan kuesioner agar mudah dipahami oleh responden yang melakukan pencacahan mandiri.

Maksud dan Tujuan

Secara umum, tujuan pengumpulan data melalui Sakernas Tahun 2021 adalah menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Secara khusus, untuk memperoleh estimasi data jumlah penduduk bekerja, jumlah pengangguran, dan indikator ketenagakerjaan lainnya serta perkembangannya di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Cakupan

Besarnya sampel Sakernas Agustus 2021 sebanyak 22.500 blok sensus (BS) yang tersebar di 514 kabupaten/kota di 34 provinsi seluruh Indonesia. Sampel Sakernas Agustus 2021 terdiri dari 7.500 BS panel Februari dan 22.500 BS panel Agustus. Sakernas tidak mencakup rumah tangga korps diplomatik, rumah tangga yang tinggal di blok sensus khusus, dan rumah tangga khusus yang berada di blok sensus biasa.

Adapun variable-variabel yang dikumpulkan dari pencacahan SAKERNAS adalah sebagai berikut:

- * Keadaan umum setiap anggota rumah tangga: nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, bulan dan tahun lahir serta umur
- * Keterangan anggota rumah tangga yang berumur 5 tahun ke atas : partisipasi sekolah, pendidikan, tempat tinggal 5 tahun yang lalu, disabilitas, kegiatan seminggu yang lalu, pertanyaan tambahan terkait konsep baru ketenagakerjaan, kegiatan mencari

pekerjaan/mempersiapkan usaha baru, pekerjaan utama dan tambahan, jam kerja seluruh pekerjaan, serta pengalaman kerja

*** Jadwal Kegiatan**

Rangkaian kegiatan SAKERNAS meliputi pelatihan, pencacahan, pengolahan, analisis, dan tabulasi. Kegiatan SAKERNAS 2021 dilaksanakan secara semesteran yaitu pada bulan Februari dan Agustus 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Jadwal Kegiatan SAKERNAS Tahun 2021

NO	KEGIATAN	Sakernas Februari	Sakernas Agustus
PERSIAPAN			
1.	Penyusunan Kuesioner dan Buku Pedoman	September-Oktober 2019	
2.	Workshop Intama	5 – 7 November 2019	
3.	Pelatihan Innas	19 – 23 November 2019	
4.	Pengiriman <i>softfile</i> instrumen ke daerah	November 2019	Juni 2021
5.	Pencetakan dokumen di BPS Provinsi dan Pengiriman Dokumen dari BPS Provinsi ke BPS Kab/Kota	Januari 2021	22 Juni – 12 Juli 2021
6.	Pelatihan Inda	13 – 19 Januari 2021	
7.	Pelatihan Petugas Lapangan	20 – 26 Januari 2021	13 – 24 Juli 2021
PELAKSANAAN LAPANGAN			
1.	Pemutakhiran Rumah Tangga	27 Januari – 7 Februari 2021	27 Juli – 7 Agustus 2021
2.	Pengawasan dan Pemeriksaan Pemutakhiran Rumah Tangga	28 Januari – 10 Februari 2021	28 Juli – 12 Agustus 2021
3.	Pemilihan Sampel Rumah Tangga	29 Januari – 15 Februari 2021	29 Juli – 14 Agustus 2021
4.	Pencacahan Rumah Tangga	8 – 29 Februari 2021	8 – 31 Agustus 2021
5.	Pengawasan dan Pemeriksaan Pencacahan Rumah Tangga	8 Februari – 6 Maret 2021	8 Agustus – 4 September 2021
PENGOLAHAN			

1.	<i>Receiving, batching</i> , editing dan coding (BPS Kab/Kota)	11 Februari – 6 Maret 2021	10 Agustus – 4 September 2021
2.	Data entri Sakernas di BPS Kab/Kota	11 Februari – 6 Maret 2021	10 Agustus – 6 September 2021
3.	Pengecekan Kelengkapan Data dan Evaluasi Data oleh BPS Kab/Kota	20 Februari – 6 Maret 2021	24 Agustus – 4 September 2021
4.	Pengiriman data Sakernas dari BPS Kab/Kota ke BPS Provinsi	2 – 9 Maret 2021	1 – 9 September 2021
5.	Pengecekan Kelengkapan data dan evaluasi data oleh BPS Provinsi	2 – 13 Maret 2021	2 – 14 September 2021
6.	Pengiriman raw data Sakernas ke BPS RI (Subdit IPD)	5 – 15 Maret 2021	7 – 15 September 2021
7.	Pengecekan kelengkapan data di Subdit IPD	16 – 20 Maret 2021	16 – 22 September 2021
8.	Penyerahan Data Sakernas dari Subdit IPD ke Subdit Stat Naker	20 Maret 2021	23 September 2021
9.	Penyusunan Penimbang	23 – 29 Maret 2021	24-30 September 2021
PENYAJIAN			
1.	Evaluasi dan pembahasan hasil di BPS RI	30 Maret – 30 April 2021	1 – 30 Oktober 2021
2.	Pengiriman bahan rilis ke BPS Provinsi	1 Mei 2021	30 Oktober 2021
3.	Press release	5 Mei 2021	5 November 2021
4.	Penyusunan publikasi di BPS RI	Mei 2021	November 2021
5.	Pencetakan publikasi	Juni 2021	Desember 2021

Pembiayaan

Kegiatan Sakernas 2021 merupakan kegiatan yang pembiayaannya berada pada DIPA BPS Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Adapun mata anggaran yang digunakan yaitu pada output publikasi/laporan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan (054.01.06.2905.005.100 dan 054.01.06.2905.005.101).

Target Sampel

Responden dalam Sakernas Semester I Tahun 2021 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sejumlah 111 sampel rumah tangga dan Sakernas Tahunan sebanyak 337 sampel rumah tangga.

Daftar Petugas

Petugas Sakernas terbagi menjadi 2 yaitu petugas Sakernas Semester I (Februari) dan petugas Sakernas Semester II (Agustus) dan Tahunan Tahun 2021. Petugas Sakernas Semester I dan Semester II dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Daftar Petugas Sakernas Semester I dan II Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2021

NO	NAMA PETUGAS	JABATAN
1.	Cindy Sanda	PCL
2.	Kristianus B Mokodompis	PCL
3.	Ortje Manahampi	PCL
4.	Reyske M. Jacobs	PCL
5.	Wulandari Ponto, SST.	PML
6.	Ridwan Setiawan, S.Tr.Stat.	PML

Tabel 2. Daftar Petugas Sakernas Tahunan Kabupaten Kepulauan Sitaro
Tahun 2021

NO	NAMA PETUGAS	JABATAN
1.	Novry Sariu	PCL
2.	Wahyuni Aggoh	PCL
3.	Brian Linggar	PCL
4.	Tivany Makienggung	PCL
5.	Widyan Ruitang	PCL
6.	Santi Balo	PCL
7.	Diana M Kandati	PCL
8.	Randy Tahulending	PCL
9.	Davy Lomendehe	PCL
10.	Van Eiffel Antameng	PCL
11.	Thelda Turali	PCL
12.	Erick Salindeho	PCL
13.	Edward Derek	PCL
14.	Joniver Mona	PCL
15.	Jims E S Mawali	PML
16.	Wulandari ponto, SST	PML
17.	Meity C Sinadia, SE	PML
18.	Anisa Sekarwati, Amd. Stat	PML
19.	Satrio F Tangkudung, SST	PML
20.	Nabella I Karasta, S.Tr. Stat	PML

Pelatihan Petugas

Pelatihan petugas lapangan untuk Sakernas dilakukan 2 kali yaitu pada bulan Januari (untuk Sakernas Semester I) dan pada bulan Juli (untuk Sakernas Semester II dan Tahunan). Pelatihan petugas lapangan Semester I berlangsung selama 3 (tiga) hari efektif pada rentang waktu tanggal 20 – 23 Januari 2021 yang bertempat di Penginapan *Little House*, Tatehadeng Siau Timur. Pelatihan petugas lapangan Semester II dilaksanakan 2 gelombang. Gelombang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2021 yang bertempat di Kantor BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Gelombang kedua dilaksanakan pada tanggal 31 Juli yang bertempat di Aula Kantor Camat Tagulandang. Inda dalam pelatihan tersebut adalah Wulandari Ponto, SST. Dokumentasi dari pelatihan petugas terdapat pada Lampiran 1.

Pemutakhiran Rumah Tangga (*Updating*)

Pemutakhiran rumah tangga Sakernas Semester I menggunakan SAK20.P dengan bentuk form daftar rumah tangga hasil Sensus Penduduk 2010 atau *update* terakhir dalam bentuk *preprinted*. Probis pemutakhiran pada Sakernas Semester II dan Tahunan berbeda dengan probis pemutakhiran Sakernas Semester I dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Probis Sakernas Semester II dan Tahunan dilaksanakan dengan 2 cara yaitu *Door to door* (Zona Hijau) dan Verifikasi Kortek didampingi Ketua/Pengurus SLS (Zona Merah). Untuk Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menggunakan probis untuk wilayah Zona Hijau yaitu *Door to door*. Secara garis besar, pemutakhiran rumah tangga berdasarkan hasil suatu pendataan pada suatu wilayah (blok sensus) akan terdapat tiga kejadian, yaitu

1. Rumah tangga yang tetap (*nonmover*),
2. Rumah tangga pindah keluar atau ke dalam blok sensus (*in mover* dan *out mover*), dan
3. Rumah tangga mekar (*spread up*).

Dokumentasi dari pemutakhiran rumah tangga terdapat pada Lampiran 2

Pencacahan

Pencacahan lapangan Sakernas Semester I dilaksanakan mulai tanggal 8 – 29 Februari 2021. Pencacahan dilakukan pada 111 rumah tangga sampel. Pencacahan lapangan Sakernas Semester II dan Tahunan dilaksanakan mulai tanggal 8 – 31 Agustus 2021. Untuk sampel Sakernas Tahunan adalah sebanyak 337 rumah tangga.

Secara umum, pelaksanaan pencacahan Sakernas di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berjalan dengan baik dan lancar meskipun ada kendala-kendala yang ditemui di lapangan. Dokumentasi dari pencacahan lapangan terdapat pada Lampiran 3.

Pengolahan

Pengolahan hasil pencacahan Sakernas Tahun 2021 dilakukan oleh FUNGSI IPDS BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berkoordinasi dengan FUNGSI Statistik Sosial BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Pengolahan tersebut dilakukan dengan cara mengentry isian kuesioner pada Aplikasi yang telah tersedia. Kemudian dilanjutkan dengan proses validasi yang dilakukan oleh seluruh PML.

Permasalahan dan Solusi

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pencacahan Sakernas 2021 di antaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Permasalahan dan Solusi Sakernas Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2021

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Rumah tangga yang suami istri bekerja, susah ditemui sehingga petugas berulang kali mendatangnya. ART lain tidak ada yang bisa memberi keterangan yang diinginkan	Tetap mengujungi rumah tangga sampel sampai batas waktu pencacahan. Jika belum bisa ditemui sampai batas waktu pencacahan, rumah tangga sampel tersebut dinyatakan NON RESPON

2.	Kejenuhan responden yang merasa didatangi berulang-ulang oleh petugas BPS terkait dengan banyaknya Survei di BPS dan responden selalu terpilih sebagai sampel, sehingga saat pendataan petugas pun sulit untuk melakukan probing yang lebih dalam lagi.	Diisi sesuai pengakuan responden, dan dilakukan <i>probing</i> lebih mendalam.
----	---	--

Pelaksanaan Survei Angkatan kerja Nasional (SAKERNAS) Semesteran dan Tahunan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2021 dari tahapan pembagian petugas hingga pelaksanaan lapangan sudah diusahakan semaksimal mungkin. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki lagi. Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya masukan dan saran yang membangun guna perbaikan kualitas data BPS kedepannya.

Umum

Pada era Sustainable Development Goals (SDGs), Data Revolution, Big Data, dan Nawacita seperti sekarang ini, informasi capaian pembangunan merupakan sumber data utama bagi para pemangku kebijakan dalam merencanakan pembangunan nasional. Indikator statistik digunakan oleh kementerian/lembaga dan berbagai pihak untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pengukuran akuntabilitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, beragam data yang tersedia untuk indikator statistik yang sama seringkali menyulitkan pengguna data dalam melakukan pemilihan data yang akan digunakan.

Saat ini, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan sandaran utama pemenuhan kebutuhan pemerintah dalam mengimplementasikan pembangunan nasional agar sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan tujuan pembangunan internasional (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs).

Dalam pelaksanaannya, Susenas Maret menggunakan dua kuesioner yaitu Kuesioner Kor Modul Kesehatan dan Perumahan (VSEN20.K) dan Kuesioner Konsumsi/Pengeluaran (VSEN20.KP). Kuesioner Kor (VSEN20.K) mencakup keterangan demografi, migrasi dan akte kelahiran, pendidikan, ketenagakerjaan, TIK, korban kejahatan, gangguan fungsional, kesehatan, imunisasi, ASI dan MP-ASI, penolong persalinan, KB, akses terhadap makanan, perumahan, akses terhadap layanan keuangan, kepemilikan barang, dan perlindungan sosial. Sedangkan Kuesioner Konsumsi/Pengeluaran (VSEN20.KP) mencakup keterangan pengeluaran dan konsumsi rumah tangga, untuk pengeluaran kesehatan juga dicatat berdasarkan *out of pocket* serta pendapatan, penerimaan, dan pengeluaran bukan konsumsi.

Pendataan Susenas September mengalami adaptasi tertentu dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Pendataan Susenas September menggunakan satu kuesioner yaitu Kuesioner Modul Hansos (VSEN20.MH) yang mencakup pertanyaan mengenai konsumsi pengeluaran, pertanyaan terkait lingkungan hidup, pengasuhan anak, perlindungan sosial, dan keamanan. Adapun perbedaan kuesioner antara Susenas Maret dan Susenas September yaitu kuesioner september dirancang sesederhana mungkin untuk membatasi waktu pertemuan dengan responden, kuesioner KP dibuat ringkas, modul hansos hanya menanyakan indikator SDGs dan beberapa pertanyaan tambahan terkait proteksi sosial yang digunakan dalam analisis Covid-19.

Cakupan

Kegiatan SUSENAS dilaksanakan secara semesteran yaitu Susenas Semester I dilaksanakan pada bulan Maret dan Susenas Semester II dilaksanakan pada bulan September. Untuk Susenas Maret di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, yaitu sejumlah 514 kabupaten/kota dengan sampel yang berjumlah 550 sampel rumah tangga sedangkan untuk Susenas September hanya sebanyak 110 sampel rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Jadwal Kegiatan

Rangkaian kegiatan SUSENAS meliputi pelatihan, pencacahan, pengolahan. Kegiatan SUSENAS 2021 dilaksanakan secara semesteran yaitu pada bulan Maret dan September 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Jadwal Kegiatan SUSENAS Tahun 2021

NO	KEGIATAN	SUSENAS Maret	SUSENAS September
1.	Penyempurnaan Pedoman dan Kuesioner	September – Desember 2019	
2.	Workshop Intama	21 – 25 Oktober 2019	
3.	<i>Upload</i> Dokumen Susenas	8 November – 21 Desember 2019	6 – 9 Agustus 2021
4.	Pelatihan Innas	13 – 24 Januari 2021	12 – 14 Agustus 2021
5.	Pelatihan Inda	-	18 – 28 Agustus 2021
6.	Pelatihan Petugas	22 Januari – 10 Februari 2021	31 Agustus – 14 September 2021
7.	Updating / Identifikasi Rumah Tangga	18 – 23 Februari 2021	16 – 20 September 2021
8.	Pemilihan Sampel Rumah Tangga	22 – 28 Februari 2021	-
9.	Pencacahan Rumah Tangga Sampel	1 – 20 Maret 2021	21 – 30 September 2021
10.	Penyerahan Hasil Pencacahan ke BPS Kab/Kota	6 – 29 Maret 2021	17 September – 11 Oktober 2021
11.	Pengolahan Data Susenas	13 Maret – 12 April 2021	21 September – 21 Oktober 2021
12.	Pengiriman Data ke BPS Provinsi	16 – 25 April 2021	15 – 27 Oktober 2021
13.	Pengiriman Data ke BPS Pusat	23 April – 2 Mei 2021	26 Oktober – 3 November 2021

Pembiayaan

Kegiatan SUSENAS 2021 merupakan kegiatan yang pembiayaannya berada pada DIPA BPS Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Adapun mata anggaran yang digunakan yaitu pada output publikasi/laporan statistik kesejahteraan rakyat yang terbit tepat waktu (054.01.06.2906.003.051).

Target Sampel

Responden dalam Susenas Maret Tahun 2021 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sejumlah 550 sampel rumah tangga dan Susenas September sebanyak 110 sampel rumah tangga.

Daftar Petugas

Petugas Susenas terbagi menjadi 2 yaitu petugas Susenas Maret dan petugas Susenas September Tahun 2021. Petugas Susenas Maret dan Susenas September dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Daftar Petugas Susenas Maret Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2021

NO	NAMA PETUGAS	JABATAN
1.	Novry Sariu	PCL
2.	Yuniati Saul	PCL
3.	Novri Koyongian	PCL
4.	Cindy Sanda	PCL
5.	Wahyuni Anggoh	PCL
6.	Tita Salatun	PCL
7.	Brian Linggar	PCL
8.	Tivany Makienggung	PCL
9.	Andi Palandi	PCL
10.	Santi Balo	PCL
11.	Ajianto Bawekes	PCL
12.	Andres Lahengko	PCL
13.	Lisyen Makalare	PCL
14.	Randy Tahulending	PCL

15.	Inggrid Kenang	PCL
16.	Diana M Kandati	PCL
17.	Van Eifel Antameng	PCL
18.	Isye Kalebos	PCL
19.	Joniver Mona	PCL
20.	Inggrid Zachawerus	PCL
21.	Thelda Turali	PCL
22.	Nalia Malohing	PCL
23.	Davy Lomendehe	PCL
24.	Erick Salindeho	PCL
25.	Edward R Derek	PCL
26.	Sri Emping	PCL
27.	Norma I Gaghunting	PCL
28.	Yohnita Manarima	PCL
29.	Sterry F Tarome	PCL
30.	Kristianus B Mokodompis	PCL
31.	Vendy Tatimu	PML
32.	Jims E S Mawali	PML
33.	Nurtia Katiandagho, SST	PML
34.	Wulandari Ponto, SST	PML
35.	Meity C Sinadia, SE	PML
36.	Ortje Manahampi	PML
37.	Intan Senduk, SST	PML
38.	Deyske Puasa, SE	PML
39.	Reyske Jacobs	PML
40.	Ridwan Setiawan, S.Tr.Stat	PML

41.	Nabella I Karasta, S.Tr. Stat	PML
-----	-------------------------------	-----

Daftar Petugas Susenas September Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2021

NO	NAMA PETUGAS	JABATAN
1.	Wahyuni Anggoh	PCL
2.	Eka P Tatoda	PCL
3.	Novry Sariu	PCL
4.	Alisye C P Ramenusa	PCL
5.	Thelda Turali	PCL
6.	Ortje Manahampi	PCL
7.	Reyske Jacobs	PCL
8.	Jims E S Mawali	PML
9.	Satrio F Tangkudung, SST	PML
10.	Wulandari Ponto, SST	PML

Pelatihan Petugas

Pelatihan petugas lapangan untuk Susenas dilakukan 2 kali yaitu pada bulan Februari (untuk Susenas Maret) dan pada bulan Agustus (untuk Susenas September). Pelatihan petugas lapangan Susenas Maret dilaksanakan 2 gelombang. Gelombang pertama dilaksanakan pada tanggal 27 – 30 Januari 2021 dan Gelombang kedua dilaksanakan pada tanggal 3 – 6 Februari 2021. Tempat pelatihan Gelombang 1 dan 2 yaitu di Penginapan *Little House*, Tatehadeng Siau Timur. Ina dalam pelatihan tersebut adalah Jims E S Mawali. Dokumentasi dari pelatihan petugas terdapat pada Lampiran 1.

Pemutakhiran Rumah Tangga (*Updating*)

Pemutakhiran rumah tangga Susenas Maret menggunakan VSEN20.P dengan bentuk form daftar rumah tangga hasil Sensus Penduduk 2010 atau *update* terakhir dalam bentuk *preprinted*. Untuk Susenas September pemutakhiran rumah tangga diganti dengan

identifikasi yang hanya dilakukan di rumah tangga-rumah tangga sampel pada Susenas Maret dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Daftar yang dipakai pada pemutakhiran September adalah VSEN20.IDENT. Dokumentasi dari pemutakhiran rumah tangga terdapat pada Lampiran 2.

Pencacahan

Pencacahan lapangan Susenas Maret dilaksanakan mulai tanggal 1 – 20 Maret 2021. Pencacahan dilakukan pada 550 rumah tangga sampel. Pencacahan lapangan Susenas September dilaksanakan mulai tanggal 21 – 30 September 2021. Untuk sampel Susenas September adalah sebanyak 110 rumah tangga.

Secara umum, pelaksanaan pencacahan Susenas di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berjalan dengan baik dan lancar meskipun ada kendala-kendala yang ditemui di lapangan. Dokumentasi dari pencacahan lapangan terdapat pada Lampiran 3.

Pengolahan

Pengolahan hasil pencacahan Susenas Tahun 2021 dilakukan oleh FUNGSI IPDS BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berkoordinasi dengan FUNGSI Statistik Sosial BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Pengolahan tersebut dilakukan dengan cara mengentry isian kuesioner pada Aplikasi yang telah tersedia. Kemudian dilanjutkan dengan proses validasi yang dilakukan oleh seluruh PML.

Permasalahan dan Solusi

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pencacahan Susenas 2021 di antaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Permasalahan dan Solusi Susenas Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro Tahun 2021

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Respon responden bermacam-macam, ada yang menerima petugas dengan baik namun ada juga petugas yang diterima dengan tidak baik atau susah ditemui sehingga harus dikunjungi ulang berkali-kali	Tetap mengujungi rumah tangga sampel dan menjelaskan maksud serta tujuan pendataan
2.	Beban kuesioner terkadang dikeluhkan oleh responden karena proses wawancara yang memakan waktu lama dan responden merasa bosan sehingga membutuhkan kesabaran dan kepiawaian petugas dalam menghadapi responden supaya tidak jenuh, dan petugas harus memilih waktu yang tepat	Tetap berusaha melakukan <i>probing</i> yang mendalam serta proses wawancara dapat dilakukan dengan cepat tanpa mengurangi maksud dan isi yang ada dalam kuesioner

Pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2021 dari tahapan pembagian petugas hingga pelaksanaan lapangan sudah diusahakan semaksimal mungkin. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki lagi. Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya masukan dan saran yang membangun guna perbaikan kualitas data BPS kedepannya.

Umum

Sejak dimulainya orde reformasi sekitar satu dekade yang lalu, pemerintah melakukan reformasi secara menyeluruh di berbagai bidang. Kegiatan tersebut diarahkan dalam rangka penyelenggaraan dan penegakkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih dan transparan (Good and Clean Governance). Namun demikian keberhasilan reformasi tersebut masih belum terlihat menyeluruh pada semua bidang pemerintahan. Reformasi birokrasi di bidang penegakkan hukum dan hak azasi manusia (HAM) masih nampak berjalan di tempat. Berbeda dengan bidang lainnya, reformasi di bidang penegakkan hukum melibatkan empat lembaga negara/kementerian sekaligus, yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, Pengadilan dan Kementerian Hukum dan HAM (Menhukham).

Keempat institusi pemerintahan tersebut masing-masing melakukan kegiatan penegakkan hukum dan HAM yang saling berkaitan antara satu institusi dengan institusi lainnya. Keberhasilan Polri untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya semata-mata tidak akan banyak berpengaruh terhadap keberhasilan penegakkan hukum dan HAM, jika tidak disertai dengan peningkatan kinerja lembaga Kejaksaan, Pengadilan dan institusi lain yang terkait. Keberhasilan reformasi di bidang penegakkan hukum dan HAM pada gilirannya nanti akan mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

Politik dan keamanan merupakan dua hal yang selalu terkait dan saling mempengaruhi. Adakalanya politik mempengaruhi keamanan, atau sebaliknya situasi keamanan melahirkan ide-ide kebijakan politik. Perkembangan politik dan keamanan yang semakin dinamis tersebut perlu mendapatkan pemantau dan monitoring. Ini artinya

diperlukan alat untuk memantau dan memonitor perkembangan situasi politik dan keamanan. Karena itu diperlukan adanya data yang dapat menggambarkan perkembangan antar waktu dan wilayah.

Untuk memenuhi permintaan data yang semakin banyak khususnya data yang berkaitan dengan penegakan hukum yang menjadi salah satu agenda prioritas pada pemerintahan saat ini, maka Badan Pusat Statistik selain menerbitkan publikasi statistik politik dan statistik kriminal juga menerbitkan statistik penegakan hukum dan diharapkan terkumpul data tersebut dapat menggambarkan situasi politik dan keamanan di suatu wilayah tertentu. Output dari kegiatan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat untuk memberikan gambaran dan perkembangan situasi politik dan keamanan antar waktu dan antar wilayah. Informasi ini setidaknya dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penentu kebijakan di bidang politik dan keamanan.

Maksud dan Tujuan

Kegiatan Pengumpulan Data Statistik Politik dan Keamanan bertujuan untuk:

- 1). Menghimpun data statistik politik dan keamanan
- 2). Memberikan gambaran mutakhir perkembangan situasi bidang politik dan keamanan
- 3). Memberikan gambaran perbandingan perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar waktu dan antar wilayah.

Cakupan

Pengumpulan data Statistik Politik dan Keamanan 2021 mencakup data tingkat provinsi dan kabupaten/kota tahun 2021 di seluruh wilayah Indonesia

Jadwal Kegiatan

Rangkaian kegiatan pengumpulan data Polkam Tahun 2021 dilaksanakan mulai dari April - Mei 2021.

Pembiayaan

Kegiatan Pendataan Polkam 2021 merupakan kegiatan yang pembiayaannya berada pada DIPA BPS Kepulauan Siau tagulandang Biaro. Adapun mata anggaran yang digunakan yaitu pada output publikasi/laporan statistik ketahanan sosial (054.01.06.2907.006.200).

Target Sampel

Responden dalam kegiatan Pendataan Polkam 2021 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah Kepolisian Sektor Siau Timur (POLSEK Siau Timur), Kepolisian Sektor Siau Barat (POLSEK Siau Barat, Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Daftar Petugas

Petugas pada kegiatan Pendataan Polkam 2021 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terdiri dari dua pegawai organik BPS. Adapun diantaranya merupakan petugas pencacah dan pengawas yang dapat dirinci sebagai berikut ini:

Daftar Petugas Pendataan Polkam Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2021

NO	NAMA PETUGAS	JABATAN
1.	Wulandari Ponto, SST	PCL
2.	Jims E S Mawali	PML

Pencacahan

Pencacahan Polkam langsung menuju target sampel dengan menggunakan kuesioner POLKAM-20. Secara umum, pelaksanaan pencacahan Polkam 2021 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berjalan dengan baik dan lancar.

3.1.1 Permasalahan dan Solusi

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Pencacahan Polkam Tahun 2021 di antaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Permasalahan dan Solusi Pencacahan Polkam Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2021

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Kesulitan menemui penanggung jawab di instansi yaitu pada saat petugas datang yang bersangkutan sedang tidak ada ditempat.	Petugas mengunjungi kembali instansi yang sebelumnya membuat janji dengan penanggung jawab di instansi tersebut.

Pelaksanaan Pencacahan POLKAM di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2021 dari tahapan pembagian petugas hingga pelaksanaan lapangan sudah diusahakan semaksimal mungkin. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki lagi. Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya masukan dan saran yang membangun guna perbaikan kualitas data BPS kedepannya

FUNGSI STATISTIK PRODUKSI

STATISTIK PERTANIAN HORTIKULTURA (SPH)

Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan cukup penting dalam perekonomian Indonesia. Salah satu subsektor pertanian yang mempunyai peranan yang sangat strategis adalah tanaman pangan yang meliputi tanaman padi dan palawija. Subsektor tanaman pangan memiliki peran yang sangat strategis dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Karena itu, informasi mengenai produksi tanaman pangan dan informasi pendukung lainnya yang akurat dan terkini sangat dibutuhkan oleh pemerintah sebagai masukan dalam formulasi dan penentuan kebijakan, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Salah satu informasi penting yang dibutuhkan dalam perhitungan produksi tanaman pangan adalah informasi luas tanaman padi dan palawija (luas tanam, luas panen, dan luas puso) yang dikumpulkan secara rutin melalui kegiatan Statistik Pertanian (SP). Selain informasi mengenai luas tanaman padi dan palawija, dalam kegiatan SP juga dikumpulkan sejumlah informasi pendukung, seperti luas lahan pertanian, informasi penggunaan pupuk dan benih, serta alat dan mesin pertanian (alsintan).

Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) merupakan kegiatan mengumpulkan data mengenai tanaman hortikultura yang meliputi empat kelompok tanaman, yaitu: Sayuran dan Buah-buahan Semusim (SBS), Buah-buahan dan Sayuran Tahunan (BST), Tanaman Biofarmaka (TBF), dan Tanaman Hias (TH), serta Statistik Perbenihan (BN). Kegiatan SPH ini dilaksanakan oleh Subdirektorat Statistik Hortikultura, Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan BPS RI.

Data tanaman hortikultura dikumpulkan oleh Mantri Tani/KCD/PPL dengan menggunakan formulir SPH-SBS, SPH-BST, SPH-TBF, SPH-TH, dan SPH-BN dari seluruh kecamatan yang ada di Indonesia. Data yang dikumpulkan dalam SPH-SBS, SPH-BST, SPHTBF, dan SPH-TH meliputi data luas tanam/jumlah tanaman baru, luas panen/jumlah tanaman produktif, besarnya produksi, dan harga petani. Sementara itu,

data yang dikumpulkan dalam SPH-BN meliputi data produksi, perdagangan, dan penggunaan benih.

Periode waktu pengumpulan data pada setiap jenis SPH berbeda-beda. Data SPH-SBS dikumpulkan setiap bulan. Data SPH-BST, SPH-TBF, dan SPH-TH dikumpulkan setiap triwulan, sedangkan data SPH-BN dikumpulkan setahun sekali.

Tujuan

Tujuan Pengumpulan Data statistik pertanian adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi mengenai luas tanaman komoditas tanaman pangan (padi dan palawija).
2. Memperoleh informasi penggunaan lahan, alat/mesin dan kelembagaan pertanian, serta perbenihan.

Tujuan pelaksanaan **Pengumpulan Data Hortikultura** adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan data luas panen, produksi, tanaman rusak, tanaman baru, harga dan produktivitas dari tanaman sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat-obatan;
2. Mendapatkan data jumlah produsen benih, luas penangkaran, produksi benih, jumlah pedagang benih, jumlah benih yang diperdagangkan, serta jumlah penggunaan benih.

Landasan Hukum

Pengelolaan statistik pertanian yang dilaksanakan telah didasari pada beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2000.

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2389/M Tahun 2000.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen.
8. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000.
9. Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen.
10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/KPTS/OT.210/1/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/KPTS/OT.140/9/2005 Tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.
13. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 001 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

Pengelolaan statistik hortikultura yang dilaksanakan telah didasari pada beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854).
3. Keputusan Menteri Pertanian No. 511/Kpts/PD.310/9/2006, tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura.

Naskah Kesepakatan bersama Nomor $\frac{443/TU-010/A/5/06}{I/V/KS/2006}$ Tahun 2006 antara Departemen Pertanian dengan Badan Pusat Statistik tentang Pelaksanaan Kegiatan *Data Entry* SP (Survei Pertanian) melalui Formulir SP Elektronik.

Cakupan

Pengumpulan data Statistik Pertanian (SP) tanaman pangan mencakup seluruh kecamatan di wilayah Republik Indonesia.

Cakupan wilayah pengumpulan data hortikultura adalah seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan cakupan komoditas data hortikultura yang dikumpulkan melalui daftar isian SPH sebanyak 90 komoditas, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelompok Komoditas	Jumlah Komoditas
1	Sayuran	25
2	Buah-buahan	26
3	Tanaman Hias	24
4	Tanaman Biofarmaka	15
Jumlah		90

Dokumen yang Digunakan

Daftar yang dipakai untuk pengumpulan data produktivitas tanaman pangan serta jadwal pelaksanaannya adalah seperti berikut:

No.	Nama Daftar Isian	Frekuensi Pengumpulan	Keterangan
1.	SP-Padi	Bulanan	Laporan Statistik Pertanian Tanaman Padi
2.	SP-Palawija	Bulanan	Laporan Statistik Pertanian Tanaman Palawija
3.	SPH-SBS	Bulanan	Laporan Statistik Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim
4.	SPH-BST	Triwulan	Laporan Statistik Tanaman Buah-buahan dan Tanaman Sayuran Tahunan
5.	SPH-TBF	Triwulan	Laporan Statistik Tanaman Biofarmaka
6.	SPH-TH	Triwulan	Laporan Statistik Tanaman Hias
7.	SPH-BN	Tahunan	Laporan Statistik Perbenihan Hortikultura
8.	SP-Lahan	Tahunan	Laporan Statistik Pertanian Penggunaan Lahan

9.	SP-Benih TP	Tahunan	Laporan Statistik Pertanian Perbenihan Tanaman Pangan
10.	SP-Alsintan	Tahunan	Laporan Statistik Pertanian Alat/mesin dan Kelembagaan Pertanian Tanaman Pangan

Indikator Pertanian (Survei Pertanian)

Pengumpulan Data

Data luas panen diperoleh dari Laporan SP yang mencakup laporan luas tanaman padi (SP-PADI) dan luas tanaman palawija (SP-PALAWIJA). Pengumpulan data SP dilakukan pada tingkat kecamatan yang dilakukan oleh KCD/Mantri Tani (Mantan)/Petugas Pengumpul Data dan dibuat rangkap 4 (arsip KCD, BPS Kabupaten/Kota, Distan Kabupaten/Kota, dan BPS Provinsi). Petugas pengumpul data mendapatkan data luas tanaman padi dan palawija dengan menggunakan system blok pengairan, laporan petani kepada kepala desa, bnyaknya benih yang digunakan, eye estimate (pandangan mata) berdasarkan luas baku, dan sumber informasi lainnya.

BPS Kabupaten/Kota memeriksa kelengkapan data dan melakukan validasi isian Daftar SP-Padi dan SP-Palawija, memasukkan data (data entry) dengan menggunakan Program Komputer yang tersedia, kemudian mengirimkan hasilnya ke BPS Provinsi. Kelancaran pemasukan dokumen SP dan akurasi isiannya menjadi tanggungjawab Distan Provinsi, dan Distan Kabupaten/Kota, sedangkan pengolahan data SP menjadi tanggung jawab BPS.

Target dan Realisasi Pengumpulan Data

Pengumpulan data indikator pertanian didasarkan pada jumlah kecamatan yang ada pada masing-masing Kabupaten. Berikut merupakan target dan realisasi Tahun 2021:

No	Daftar Isian	Target	Realisasi
1	SP-Padi	120	120
2	SP-Palawija	120	120
3	SP-Lahan	10	10
4	SP-Benih TP	10	10
5	SP-Alsintan	10	10

Pengumpulan Data

Data tanaman hortikultura dikumpulkan oleh mantra tani/KCD/PPL dengan menggunakan berbagai formulir SPH. KCD/Mantri Tani/Petugas Pengumpul Data mengumpulkan data dari lapangan (di tingkat kecamatan), dan menyampaikan hasil dari pengumpulan data ke Dinas Pertanian (Diperta) Kabupaten/Kota. Petugas pengumpul data mendapatkan data berdasarkan informasi dari petani/kelompok tani, laporan petani/kelompok tani kepada kepala desa, banyaknya benih yang digunakan, eye estimate (perkiraan pengamatan lapang) berdasarkan luas baku, dan sumber informasi lain.

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota memeriksa kelengkapan data dan kebenaran isian laporan kemudian membuat rekapitulasi SPH menjadi RKSPH. Dokumen RKSPH dikoordinasikan dengan BPS Kabupaten/Kota, kemudian RKSPH dikirim ke Diperta Provinsi.

BPS Kabupaten/Kota memeriksa kelengkapan data dan melakukan validasi isian Daftar SPH, memasukkan data (data entry) dengan menggunakan Program Komputer yang tersedia, kemudian mengirimkan hasilnya ke BPS Provinsi. Dinas Pertanian Provinsi memeriksa kelengkapan data dan melakukan validasi isian laporan RKSPH dan membuat rekapitulasi RKSPH menjadi RPSPH. Hasil RPSPH tersebut dikoordinasikan/disinkronkan dengan BPS Provinsi, kemudian RPSPH hasil koordinasi yang telah dilegalisasi oleh masing-masing instansi untuk kepentingan penyusunan Angka Sementara (ASEM) Hortikultura dan Angka Tetap (ATAP) Hortikultura tahunan.

BPS, Direktorat Jenderal Hortikultura dan PUSDATIN Pertanian, saling berkoordinasi untuk melakukan kompilasi dan validasi data hortikultura di tingkat pusat untuk menghasilkan data nasional.

Target dan Realisasi Pengumpulan Data

Pengumpulan data hortikultura didasarkan pada jumlah kecamatan yang ada pada masing-masing Kabupaten. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terdiri dari 10 kecamatan, sehingga daftar isian masing-masing SPH berjumlah 10 dokumen untuk setiap frekuensi pengumpulan. Berikut merupakan target dan realisasi Tahun 2021:

No	Daftar Isian	Target	Realisasi
1	SPH-SBS	120	120

2	SPH-BST	40	40
3	SPH-TBF	40	40
4	SPH-TH	40	40
5	SPH-BN	10	10

Secara keseluruhan, kegiatan Pengumpulan Data Indikator Pertanian dan Survei Hortikultura tahun 2021 sudah berjalan dengan baik, ketepatan jadwal pelaksanaan di masing-masing tahapan sudah sesuai. Agar pelaksanaan kegiatan ini lebih baik ke depannya, maka hasil laporan ini bisa menjadi dasar perencanaan kegiatan pengumpulan data selanjutnya.

<https://sitarokab.bps.go.id>

Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan cukup penting dalam perekonomian Indonesia. Salah satu subsektor pertanian yang mempunyai peranan yang sangat strategis adalah subsektor tanaman pangan, yang meliputi tanaman padi dan palawija. Peranan penting subsektor tanaman pangan adalah dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia.

Mengingat pentingnya peran subsektor tanaman pangan, dibutuhkan informasi mengenai produksi tanaman pangan yang akurat dan menggambarkan kondisi terkini. Salah satu informasi penting yang dibutuhkan dalam perhitungan produksi tanaman pangan adalah hasil per hektar (produktivitas) yang dikumpulkan secara rutin setiap subround melalui Survei Ubinan.

Tujuan

Tujuan pelaksanaan Survei Ubinan tanaman pangan adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi mengenai produktivitas (hasil per hektar) komoditas tanaman pangan (padi dan palawija).
2. Memperoleh informasi pendukung lainnya, seperti koordinat lokasi ubinan, cara penanaman, sistem penanaman jajar legowo (khusus padi), penggunaan pupuk, penanggulangan OPT, dan lain-lain.

Landasan Hukum

Pelaksanaan pendataan Laporan Triwulanan Pemotongan Ternak oleh Badan Pusat Statistik dilandasi oleh:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik.
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2000.

- f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2389/M Tahun 2000.
- g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen.
- h. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000.
- i. Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- j. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004.
- k. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/KPTS/OT.210/1/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
- l. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/KPTS/OT.140/9/2005 Tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.
- m. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 001 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.
- n. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

Cakupan

Pengumpulan data produktivitas (Survei Ubinan) mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pengumpulan Data

Survei Ubinan dilakukan rutin setiap tahun dalam tiga periode, yaitu subround/SR I (periode Januari-April), SR II (periode Mei-Agustus), dan SR III (periode September-Desember). Pemutakhiran rumah tangga suatu subround dilakukan pada bulan terakhir subround sebelumnya. Unit pencacahan Survei Ubinan adalah rumah tangga usaha tanaman pangan yang melakukan panen pada subround tertentu. Tujuan Survei Ubinan adalah memperoleh tingkat produktivitas padi dan palawija setiap subround. Hasil survei dapat disajikan menurut wilayah program yang diadakan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) apabila terdapat keterwakilan sampel pada wilayah program dan nonprogram.

Survei Ubinan tahun ke-t menggunakan master frame tahun t-1 Semester 1. Misal, Survei Ubinan 2018 menggunakan master frame 2017 Semester 1 yang mencakup 514 kabupaten/kota. Kerangka sampel (sampling frame) dibentuk dengan menggunakan data hasil Sensus Pertanian (ST) 2013. Pemutakhiran rumah tangga juga memanfaatkan data hasil sensus atau survei terkini BPS untuk kemudahan dalam pendaftaran rumah tangga pertanian tanaman pangan yang akan melakukan panen pada subround tertentu, dan mengoptimalkan cakupan rumah tangga pada blok sensus.

Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang digunakan dalam Survei Ubinan ada 2 jenis, yaitu kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus dan kerangka sampel untuk pemilihan rumah tangga. Kerangka sampel tersebut dibangun dari kecamatan-kecamatan yang eligible, yaitu kecamatan yang memiliki informasi luas panen padi (padi sawah, padi ladang) dan/atau palawija (jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar) hasil pendataan Survei Pertanian (SP) tahun sebelumnya.

Target dan Realisasi Pengumpulan Data

Pengumpulan data tanaman pangan / ubinan didasarkan pada eligible sampel rumah tangga yang ada pada masing-masing Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Berikut merupakan target dan realisasi Tahun 2021:

No	Daftar Isian	Target	Realisasi
1	SubRound I (Januari – April)	18	10
2	SubRound II (Mei – Agustus)	35	35
3	SubRound III (September – Desember)	14	14

Pada Subround I terjadi perbedaan nilai antara target yang dicacah dan realisasi yang dicacah. Hal ini dikarenakan responden yang tidak tercacah sebanyak 8 orang diperkirakan panen pada bulan Maret – April sedangkan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro mulai diberlakukan lockdown sehingga tidak boleh bepergian ke luar daerah. Hal ini menyebabkan petugas tidak bisa melaksanakan pencacahan di Tagulandang karena adanya pemberlakuan lockdown terkait fenomena COVID-19.

Dokumentasi Kegiatan



Secara keseluruhan, kegiatan Pengumpulan Data Statistik Tanaman Pangan tahun 2021 sudah berjalan dengan baik, ketepatan jadwal pelaksanaan di masing-masing tahapan sudah sesuai. Agar pelaksanaan kegiatan ini lebih baik ke depannya, maka hasil laporan ini bisa menjadi dasar perencanaan kegiatan pengumpulan data selanjutnya.

Latar Belakang

Subsektor peternakan merupakan salah satu subsektor yang memberikan kontribusi pada perekonomian nasional serta mampu menyerap tenaga kerja, sehingga dapat diandalkan dalam upaya perbaikan perekonomian nasional. Selain itu, ketersediaan produk peternakan secara langsung akan meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya untuk pemenuhan kalori dan protein hewani. Pemenuhan konsumsi masyarakat atas kalori dan protein hewani akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Peranan data dan informasi sangat diperlukan sebagai dasar perencanaan dan pengembangan pembangunan. Sesuai Undang-Undang RI No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah ditetapkan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyebutkan bahwa Statistik Dasar diselenggarakan oleh BPS. Lebih lanjut sesuai dengan Pasal 233 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, Subdirektorat Statistik Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik peternakan.

Untuk memenuhi permintaan akan kebutuhan data berupa produksi daging hasil peternakan, BPS melakukan pengumpulan data melalui Rumah Potong Hewan (RPH) dan Tempat Pemotongan Hewan (TPH). Pengumpulan data menggunakan metode pencacahan lengkap terhadap seluruh RPH/TPH yang ada di wilayah Republik Indonesia. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah ternak yang dipotong, produksi hasil pemotongan ternak, asal ternak yang dipotong, dan alasan pemotongan ternak betina.

Agar data yang dihasilkan akurat dan up to date sebagai bahan perencanaan dan dasar kebijakan di bidang peternakan, diperlukan suatu pedoman yang mengatur jadwal kegiatan, tata cara pengumpulan, pengolahan, dan penyajian statistik peternakan.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau 13.466, luas daratan 1.922.570 km² dan luas perairan 3.257.483 km². Hal ini bisa kita lihat pada data dan informasi geospasial produk Badan Informasi Geospasial (BIG) yaitu peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (www.bakosurtanal.go.id). Perairan Indonesia yang luasnya melebihi luas daratan menghasilkan produk perikanan yang melimpah. Produk yang dihasilkan dari sektor perikanan merupakan sumber protein hewani untuk memenuhi gizi dan sangat baik bagi kesehatan masyarakat Indonesia.

Dalam perencanaan pengembangan produksi perikanan, pemerintah memerlukan dukungan data statistik perikanan. Oleh karena itu kegiatan pengumpulan data statistik perikanan semakin penting dan perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak yang terkait. Peranan data dan informasi sangat diperlukan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah ditetapkan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data statistik perikanan yang secara rutin dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Data Statistik Perusahaan Perikanan, Pelabuhan Perikanan (PPS/PPN/PPP/PPI) & Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan Tempat pendaratan Ikan Tradisional. Kegiatan pengumpulan datanya dilakukan secara tahunan dan triwulanan.

Pengumpulan data statistik perikanan baik primer maupun sekunder merupakan salah satu upaya menyediakan data statistik yang berguna untuk bahan perencanaan dan kebijakan di bidang perikanan.

Tujuan

Tujuan pengumpulan data Laporan Triwulanan Pemotongan Ternak adalah:

- a. Mendapatkan produksi hasil pemotongan ternak di RPH/TPH.
- b. Mendapatkan jumlah ternak yang dipotong menurut wilayah asal ternak.
- c. Mendapatkan jumlah ternak yang dipotong menurut kepemilikan ternak.
- d. Mendapatkan jumlah pemotongan ternak di luar RPH/TPH.

Survei Perusahaan Perikanan dan PP-TPI/PIT bertujuan untuk:

- a. mendapatkan data statistik perikanan khususnya dari perusahaan perikanan yang berbadan hukum dan TPI secara tahunan yang akurat berupa gambaran yang jelas tentang struktur usaha perusahaan perikanan dan TPI
- b. mendapatkan data produksi perikanan laut secara triwulanan yang mencakup produksi yang dijual/dilelang melalui TPI, dan melalui Tempat Pendaratan Ikan Tradisional; dan
- c. Informasi umum pelabuhan perikanan di Indonesia

Landasan Hukum

Pelaksanaan pendataan Laporan Triwulanan Pematangan Ternak oleh Badan Pusat Statistik dilandasi oleh:

- a. Undang-Undang RI No.16 tahun 1997 tentang Statistik.
- b. Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
- c. Peraturan Presiden RI No. 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
- d. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik
- e. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik No. 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah

Cakupan

Pengumpulan data pematangan ternak di RPH/TPH dilaksanakan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. RPH/TPH yang melakukan kegiatan pematangan ternak (sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan babi), meliputi seluruh RPH/TPH yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum. Termasuk dalam laporan ini adalah dinas-dinas yang menangani fungsi peternakan. Rumah Potong Ayam/Unggas tidak dicakup pada pendataan ini.

Perusahaan perikanan yang dicakup adalah seluruh perusahaan perikanan yang berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan atau budidaya ikan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan cakupan untuk PP-TPI/PIT adalah seluruh pelabuhan perikanan, pendaratan ikan tradisional dan tempat pelelangan ikan yang ada di seluruh Indonesia.

Petugas Lapangan

Petugas lapangan yang terlibat dalam pengumpulan data Laporan Triwulanan Pemotongan Ternak adalah Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), dan/atau Staf BPS Kabupaten/Kota yang diberi tugas. Sementara itu, petugas pengolah data peternakan adalah Staf BPS Provinsi atau yang diberi tugas. Bila diperlukan dalam pengumpulan atau pengolahan data dapat merekrut mitra statistik.

Petugas lapangan yang melakukan pengumpulan data Perusahaan Perikanan dan PP-TPI/PIT adalah Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) atau staf BPS Kabupaten/Kota yang ditugaskan, sedangkan sebagai petugas pengawas/pemeriksa adalah Kepala FUNGSI Statistik produksi/staf BPS Kabupaten/Kota yang ditugaskan. Pengawasan lapangan terutama dilakukan pada perusahaan perikanan dan PP-TPI/PIT yang sulit dalam memberikan data, sedangkan pemeriksaan dokumen dilakukan pada semua dokumen hasil pencacahan untuk memeriksa kelengkapan isian, konsistensi, dan kewajaran data. Jika ditemukan isian yang tidak lengkap, tidak konsisten, atau tidak wajar agar dilakukan kunjungan ulang (revisit) sebelum dilakukan entri data/pengolahan data.

Dokumen yang Digunakan

Jenis dokumen yang digunakan dalam pengumpulan data Laporan Triwulanan Pemotongan Ternak yaitu:

- a. Daftar-RPH/TPH adalah daftar yang digunakan untuk mengumpulkan data pemotongan ternak di RPH dan TPH.

Dokumen yang digunakan dalam pengumpulan data Laporan Triwulanan PP-TPI yaitu:

- a. Daftar – PP-TPI : daftar ini digunakan untuk mencatat informasi triwulanan di seluruh kategori Pelabuhan Perikanan yang terdiri dari PPS, PPN, PPP dan PPI serta mendata produksi ikan di TPI yang ada didalam pelabuhan tersebut.

Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan Laporan Triwulanan Pemotongan ternak disajikan seperti berikut:

Jadwal Pelaksanaan Laporan Triwulanan Pemotongan Ternak

Kegiatan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Periode Data	Jan-Mar	Apr-Jun	Jul-Sep	Okt-Des
Pengumpulan Data	1-14 Apr	1-14 Jul	1-14 Okt	1-14 Jan
Pemeriksaan Dokumen di Kab/Kota	1-14 Apr	1-14 Jul	1-14 Okt	1-14 Jan
Pengiriman Dokumen ke BPS Provinsi	8-14 Apr	8-14 Jul	8-14 Okt	8-14 Jan
Pemeriksaan Dokumen di BPS Provinsi	8-21 Apr	8-21 Jul	8-21 Okt	8-21 Jan
Entry Data	8-21 Apr	8-21 Jul	8-21 Okt	8-21 Jan
Validasi Awal di BPS Provinsi	15-22 Apr	15-22 Jul	15-22 Okt	15-22 Jan
Validasi dan Kompilasi di BPS RI	23-28 Apr	23-28 Jul	23-28 Okt	23-28 Jan
Pengiriman Data untuk Penghitungan PDB	29 Apr	29 Jul	29 Okt	29 Jan
Upload Tabulasi	29 Apr	29 Jul	29 Okt	29 Jan
Pembahasan	23 Apr – M1 Mei	23 Jul – M1 Ags	23 Okt – M1 Nov	23 Jan – M1 Feb
Pers Release	M1 Mei	M1 Ags	M1 Nov	M1 Feb
Penyusunan Publikasi	M2 Feb – Apr 2017			
ARC Publikasi	M1 Mei 2017			
Pencetakan Publikasi	Mei 2017			
Pengiriman Publikasi	Jun 2017			

Keterangan:

t = tahun berjalan (*current year*)

Jadwal kegiatan Laporan Triwulanan Perikanan disajikan seperti berikut:

Uraian	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
PP-TPI Triwulanan												
a. Pengumpulan data	Tw 4t-1			Tw 1 (t)			Tw 2 (t)			Tw 3 (t)		
b. Pengiriman Dokumen ke BPS		Tw 4t-1			Tw 1 (t)			Tw 2 (t)			Tw 3 (t)	
c. Pengolahan Data			Tw 4t-1			Tw 1 (t)			Tw 2 (t)			Tw 3 (t)

Pengumpulan Data

Daftar RPH/TPH digunakan untuk memperoleh data produksi ternak di Rumah Pemotongan Hewan/Tempat Pemotongan Hewan yang dilaporkan setiap triwulan. Data yang dicatat mencakup jumlah ternak yang dipotong, keterangan asal ternak yang dipotong, rata-rata berat ternak hidup dan produksi hasil pemotongan, rata-rata harga ternak hidup dan produksi hasil pemotongan serta jumlah sapi dan kerbau betina yang dipotong menurut alasan pemotongan. Satu Daftar-RPH/TPH digunakan untuk mencacah satu RPH/TPH.

Pada tahun 2016, Daftar RHP/TPH mengalami penambahan variabel yang dikumpulkan, yaitu: produksi dan harga daging, kepemilikan ternak yang dipotong, dan pemotongan di luar RPH/TPH. Daftar RPH/TPH juga digunakan untuk mencatat pemotongan di luar RPH/TPH pada kabupaten/kota yang tidak ada RPH/TPH dengan menanyakan kepada dinas yang menangani fungsi peternakan.

Keterangan yang dikumpulkan dalam Daftar RPH/TPH meliputi 9 (sembilan) blok, yaitu :

- a. Blok I : Pengenalan Tempat
- b. Blok II : Catatan
- c. Blok III : Jumlah Ternak yang Dipotong di RPH/TPH
- d. Blok IV : Rata-rata Berat Ternak Hidup dan Produksi Hasil Pemotongan pada RPH/TPH
- e. Blok V : Rata-rata Harga Ternak Hidup dan Produksi Hasil Pemotongan pada RPH/TPH
- f. Blok VI : Jumlah Sapi dan Kerbau Betina yang Dipotong Menurut Alasan Pemotongan
- g. Blok VII : Keterangan Asal Ternak yang Dipotong
- h. Blok VIII : Jumlah Ternak yang Dipotong Menurut Kepemilikan Ternak
- i. Blok IX : Jumlah Pemotongan Ternak Di Luar RPH/TPH Berdasarkan Hasil Wawancara
- j. Blok X : Keterangan Responden
- k. Blok XI : Keterangan Petugas

Target dan Realisasi Pengumpulan Data

Pengumpulan data pemotongan ternak didasarkan pada jumlah Tempat Pemotongan Ternak yang ada pada masing-masing Kabupaten. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terdiri dari 1 tempat, sehingga daftar isian Laporan RPH/TPH berjumlah 1 untuk setiap frekuensi pengumpulan. Berikut merupakan target dan realisasi Tahun 2021:

Tabel 2.2 Target dan Realisasi Pengumpulan Data Pemotongan Ternak 2021

No	Daftar Isian	Target	Realisasi
1	RPH/TPH	4 triwulan	4 triwulan
2	KPPT	12 bulan	12 bulan

Dokumentasi Kegiatan



Survei Perusahaan Perikanan, TPI/PPI/PP

Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data Laporan Triwulanan PP-TPI/PIT adalah pencacahan lengkap (complete enumeration) terhadap seluruh perusahaan perikanan berbadan hukum dan seluruh PP-TPI/PIT. Periode data yang dikumpulkan untuk perusahaan perikanan adalah data tahun sebelumnya, sedangkan PP-TPI/PIT adalah triwulan sebelumnya.

Oleh karena metode pengumpulan data dilakukan secara lengkap terhadap semua unit, maka harus didasarkan pada direktori (daftar nama dan alamat) perusahaan

perikanan, Pelabuhan perikanan dan TPI serta Tempat pendaratan tradisional (PIT) yang lengkap dan akurat.

Secara garis besar, pelaksanaan lapangan untuk Survei Perusahaan Perikanan, Pelabuhan perikanan dan TPI seperti tertera di bawah ini.

- a. Matching direktori dengan instansi terkait (baik di pusat maupun daerah) dan hasil pencacahan tahun sebelumnya. Hasil matching tersebut kemudian dilakukan updating di lapangan oleh BPS daerah. Hasil dari updating lapangan diperoleh direktori baru dengan keterangan terhadap setiap unit/obyek yaitu: aktif, tutup sementara, tutup, tidak memenuhi syarat, dan untuk Pelabuhan Perikanan ditambah informasi apakah ada TPI atau tidak. Hasil updating direktori tersebut kemudian digunakan sebagai dasar/target pencacahan di lapangan.
- b. Pencacahan dilakukan terhadap semua unit/obyek dalam direktori dengan ketentuan:
 - 1) Pencacahan harus dilakukan terhadap semua unit/obyek, dengan keterangan kondisi hasil pencacahan: aktif (dokumen terisi), tutup sementara/tutup (dokumen tetap diisi dengan keterangan resmi); dan
 - 2) Jika ditemukan perusahaan/PP-TPI/PIT baru yang memenuhi syarat untuk dicacah (perusahaan/PP-TPI/PIT baru atau lama yang terlewat cacah pada tahun sebelumnya), maka harus dilakukan pencacahan.
- c. Berdasarkan hasil pencacahan tersebut kemudian dibuat direktori baru (yang sudah ter-update) dan digunakan sebagai target pencacahan tahun berikutnya. Untuk mengantisipasi adanya perusahaan/PP-TPI/PIT yang tidak terjaring, setiap tahun dilakukan matching kembali dengan instansi terkait.
- d. Demikian seterusnya kembali ke point b, sehingga diharapkan cakupan hasil pencacahan benar-benar menggambarkan keadaan di lapangan.

Pengumpulan data pada Perusahaan Perikanan, dan PP/TPI dilakukan dengan memberikan kuesioner/daftar isian untuk diisi oleh responden pada unit/obyek survei tersebut. Sedangkan pada Tempat Pendaratan Ikan Tradisional (PIT), pengumpulan data dilakukan dengan wawancara.

Pada dasarnya, produksi penangkapan ikan di laut dapat didekati dengan pengumpulan data melalui tempat pendaratan ikan (pelabuhan perikanan maupun pendaratan tradisional), dengan pemikiran bahwa semua ikan hasil tangkapan akan didaratkan melalui tempat pendaratan seperti yang tergambar pada skema di bawah ini.

PENGGUNAAN 2 KUESIONER TRIWULANAN (DAFTAR PP-TPI & DAFTAR-PIT)



Keterangan *): Tempat Pendaratan Ikan Tradisional, tempat pendaratan seperti ini tetap dilakukan pendataan dengan menggunakan Daftar-PIT

Untuk transaksi penjualan ikan di laut dan ikan yang langsung dibawa ke luar negeri tidak dapat dipantau dengan pengumpulan data melalui tempat pendaratan ikan/pelabuhan perikanan.

Target dan Realisasi Pengumpulan Data

Pengumpulan data perikanan didasarkan pada jumlah Tempat Pelelangan Ikan yang ada pada masing-masing Kabupaten. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terdiri dari 1 tempat, sehingga daftar isian Laporan PP-TPI/PIT berjumlah 1 untuk setiap frekuensi pengumpulan. Berikut merupakan target dan realisasi Tahun 2019:

Tabel 2.2 Target dan Realisasi Pengumpulan Data PP-TPI 2021

No	Daftar Isian	Target	Realisasi
1	PP-TPI/PIT	4 triwulan	4 triwulan

Dokumentasi Kegiatan



Secara keseluruhan, kegiatan Pengumpulan Data Statistik Peternakan RPH/TPH dan Perikanan (PP-TPI) tahun 2021 sudah berjalan dengan baik, ketepatan jadwal pelaksanaan di masing-masing tahapan sudah sesuai. Agar pelaksanaan kegiatan ini lebih baik ke depannya, maka hasil laporan ini bisa menjadi dasar perencanaan kegiatan pengumpulan data selanjutnya.

. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Kepala (Perka) Badan Pusat Statistik (BPS) No. 7 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja BPS yang telah dilakukan perubahan melalui Perka No. 114 tahun 2016 dan terakhir melalui Perka No. 9 tahun 2017 mengamanatkan Direktorat Statistik Industri untuk melaksanakan penyelenggaraan statistik industri besar dan sedang, industri kecil dan rumah tangga, pertambangan dan energi, dan konstruksi. Fungsi penyelenggaraan statistik-statistik tersebut dilakukan oleh masing-masing subdirektorat di lingkup Direktorat Statistik Industri. Subdirektorat Statistik Industri Besar dan Sedang, dan Subdirektorat Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga menyelenggarakan kegiatan survei-survei statistik industri manufaktur. Sementara Subdirektorat Statistik Pertambangan dan Energi, dan Subdirektorat Statistik Konstruksi melaksanakan fungsi dalam menyelenggarakan survei-survei pertambangan, energi, dan konstruksi.

Seperti diketahui bahwa sektor industri manufaktur, pertambangan, energi, dan konstruksi merupakan komponen utama dalam pembangunan nasional. Berdasarkan data BPS¹ tahun 2018, kontribusi sektor tersebut mencapai 39,73 persen. Kontribusi ini jauh di atas sektor pertanian dan perdagangan yang masing-masing mencapai 12,81 persen dan 13,02 persen. Selain kontribusi nilai tambah, tahun 2018 sektor industri manufaktur, pertambangan, energi, dan konstruksi mampu menyediakan lapangan pekerjaan sebesar 28,81 juta orang². Jumlah ini mencapai 23,23 persen dari 124,01 juta angkatan kerja nasional.

Kekayaan sumber daya alam dan pemanfaatannya bagi perekonomian terus ditingkatkan dihadapkan pada lesunya pasar komoditas internasional dan perekonomian dunia yang melambat³. Pengembangan sektor sekunder terutama industri manufaktur, pertambangan, energi dan konstruksi menjadi salah satu faktor penting bagi Indonesia untuk menjadi negara maju dan keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap). Pembangunan perekonomian nasional

1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2018 No. 15/02/Th.XXII, 6 Februari 2019 juga tak bisa terlepas dari kebutuhan energi di tengah isu pengembangan energi terbarukan. Dilain pihak, pengembangan infrastruktur dasar utamanya jalan,

bandara, dan pelabuhan dalam rangka mendorong daya saing dan pengembangan sektor-sektor lain terus ditingkatkan. Oleh karena itu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2021 - 2024, sektor industri manufaktur, pertambangan, energi dan konstruksi berperan dalam meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, ekspor dan daya saing perekonomian serta mampu meningkatkan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan⁴.

Perkembangan perekonomian khususnya sektor sekunder yang meningkat tak bisa dihindarkan dari kebutuhan bahan baku terutama mineral, energi dan pengembangan infrastruktur. Keterkaitan antar sektor tak bisa dihindarkan sehingga dalam pengambilan kebijakan membutuhkan dukungan data. Data yang mampu menggambarkan keadaan sebenarnya sehingga pengembangan khususnya sektor sekunder dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Perencanaan, perumusan kebijakan maupun evaluasi sektor industri manufaktur pertambangan, energi dan konstruksi membutuhkan data yang aktual dan akurat. Terlebih dinamika dan tantangan dalam pengembangan sektor industri manufaktur pertambangan, energi, dan konstruksi memasuki era industri 4.0 semakin berat. Konvergensi teknologi informasi dan komunikasi mulai meningkat. Konvergensi tersebut ditandai dengan konektivitas dan interaksi antara manusia, mesin dan sumber daya (resources) yang mengalami peningkatan. Konvergensi era industri 4.0 terwujud dalam digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi yang akan mendorong produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern.

Menyikapi tantangan dan peluang tersebut, perbaikan terus dilakukan pada survei-survei dilingkup Direktorat Statistik Industri sehingga dapat menghasilkan data statistik yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna data. Perbaikan-perbaikan tersebut harus terus dikomunikasikan hingga pada tingkat pelaksana lapangan. Salah satu kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang dihasilkan adalah dilakukannya penyegaran dan bimbingan teknis secara serempak dari semua kegiatan survei di lingkup Direktorat Statistik Industri.

Tujuan

Secara umum kegiatan Survei Industri Manufaktur, Pertambangan, Energi, dan Konstruksi menghasilkan data dan indikator statistik sektor industri manufaktur, pertambangan, energi, dan konstruksi. Data dan indikator tersebut antara lain:

1. Direktori Usaha/Perusahaan Skala Besar dan Sedang/Menengah
2. Indeks Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur bulanan/triwulanan
3. Indeks Konstruksi Triwulanan
4. Profil Usaha

Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan Survei Industri Manufaktur, Pertambangan, Energi, dan Konstruksi adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
- d. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 3 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subbagian, dan FUNGSI Perwakilan BPS di Daerah.
- e. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.
- f. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 1 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subdirektorat, Subbagian, Subbidang, dan FUNGSI Badan Pusat Statistik.
- g. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 45 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan survei industri mikro dan kecil.

Cakupan

Cakupan wilayah seluruh kegiatan Survei Industri Manufaktur, Pertambangan, Energi, dan Konstruksi dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Sementara cakupan kegiatan mencakup beberapa kategori dalam KBLI 2015 yaitu:

Kategori B : Pertambangan dan Penggalian

Kategori C : Industri Pengolahan

Kategori D : Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin

Kategori E : Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi

Kategori F : Konstruksi

Kegiatan Lapangan

Kegiatan Lapangan dalam pelaksanaan Survei Industri Manufaktur, Pertambangan, Energi, dan Konstruksi meliputi:

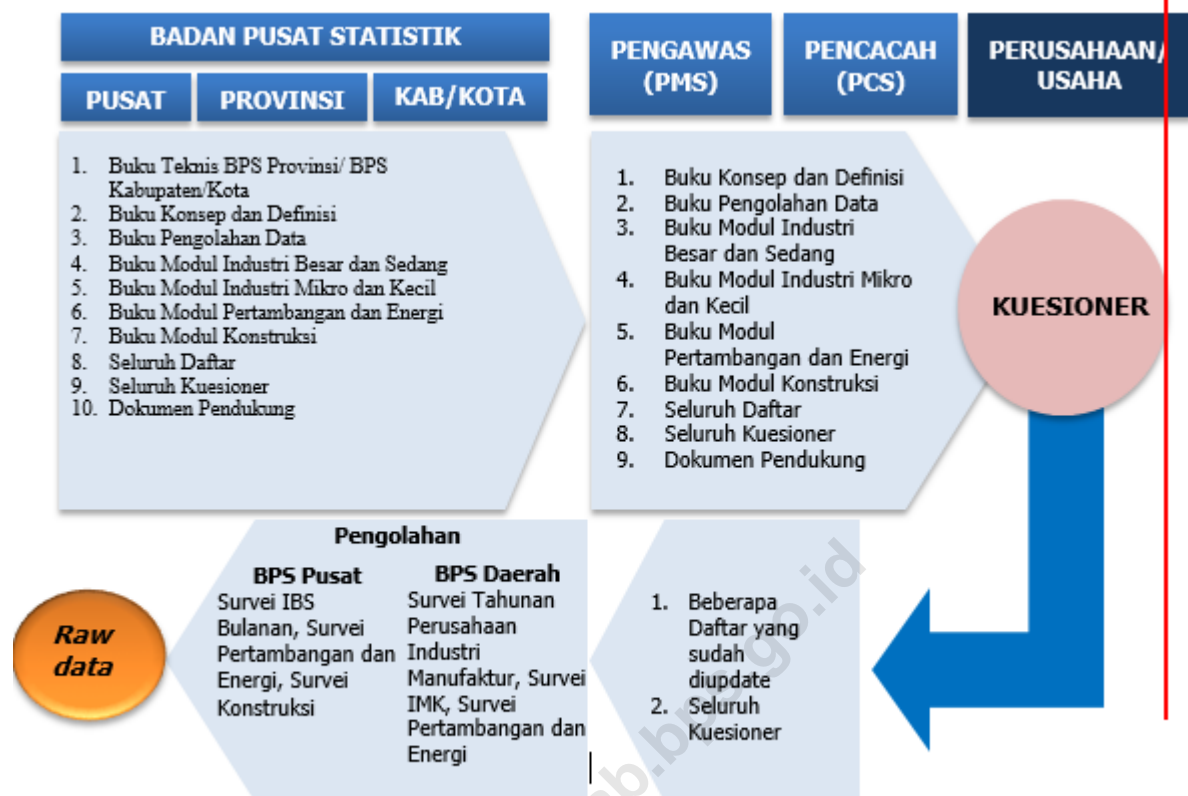
- a. Pemutakhiran (updating) direktori dilakukan untuk menjangkau perusahaan baru dan memutakhirkan kondisi perusahaan terkini. Pemutakhiran direktori dilaksanakan dalam penyelenggaraan kegiatan dalam statistik industri manufaktur besar dan sedang, statistik pertambangan dan energi, dan statistik konstruksi.
- b. Pendaftaran bangunan dan rumah tangga (listing) dilaksanakan untuk mendapatkan daftar bangunan, rumah tangga, dan jumlah anggota rumah tangga (ART) di setiap blok sensus. Listing dilaksanakan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik industri mikro dan kecil.
- c. Pendataan/pencacahan usaha/perusahaan dilakukan untuk mengumpulkan data karakteristik usaha/perusahaan yang meliputi penyelenggaraan statistik industri manufaktur, statistik pertambangan dan energi serta statistik konstruksi.

Petugas Lapangan

Petugas lapangan dalam pelaksanaan Survei Industri Manufaktur, Pertambangan, Energi, dan Konstruksi terdiri atas petugas pencacah (PCS) dan petugas pengawas/pemeriksa (PMS). Petugas lapangan kegiatan survei industri manufaktur, pertambangan, energi, dan konstruksi diutamakan organik kecuali sampel usaha rumah tangga dapat menggunakan mitra.

Instrumen dan Alur

Alur instrumen Survei Industri Manufaktur, Pertambangan, Energi, dan Konstruksi secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Arus Dokumen Survei Industri Manufaktur, Pertambangan, Energi, dan Konstruksi

Referensi Waktu Survei

Referensi data survei merupakan referensi data yang dikumpulkan dari usaha/perusahaan dengan keterangan t adalah waktu berlangsungnya kegiatan pelaksanaan survei.

1. *Updating Direktori* : Referensi data yang dikumpulkan Januari – Desember (t-1)
2. *Survei Industri Mikro dan Kecil Tahunan (VIMKyy Tahunan)* : Referensi data yang dikumpulkan September (t-1) – Agustus (t).
3. *Survei Migas, Survei Non-Migas, Survei Galian Badan Hukum (BH), Survei Galian Usaha Rumah Tangga (URT), Survei Perusahaan Air Bersih, Survei Perusahaan Listrik, Survei Perusahaan Gas, Survei Kilang, Survei Geothermal, dan Survei Captive Power* : Referensi data yang dikumpulkan Januari – Desember (t-1).
4. *Updating Direktori Perusahaan Konstruksi (UDP)* : Referensi data yang dikumpulkan Januari – Desember (t).
5. *Survei Perusahaan Konstruksi Tahunan (SKTH-yy)* : Referensi data data yang

dikumpulkan Januari – Desember (t).

6. *Survei Usaha Konstruksi Perorangan (SKP-yy) : Referensi data yang dikumpulkan Januari – Desember (t-1)*

<https://sitarokab.bps.go.id>

Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Tahunan

Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mencatat informasi dalam pengumpulan data ini adalah wawancara langsung antara petugas lapangan dengan responden

Target dan Realisasi Pengumpulan Data

Berikut merupakan target dan realisasi Survei Industri Mikro dan Kecil Tahunan (VIMK20-Tahunan) Tahun 2021:

No	Daftar Isian	Target	Realisasi
1	Survei VIMK20-Tahunan	29 sampel	29 sampel

Dokumentasi Kegiatan



Pengumpulan Data

Pengumpulan statistik pertambangan dan energi oleh Subdirektorat Statistik Pertambangan dan Energi dilakukan melalui Survei Perusahaan Air Bersih, Survei Galian URT, dan Survei Captive Power. Pendekatan survei selain Survei Captive Power dan Survei Galian URT dilakukan secara cacah lengkap (complete enumeration).

Kerangka sampel menggunakan direktori yang diupdate setiap tahun melalui kegiatan Updating Perusahaan Pertambangan dan Energi dengan data perusahaan awal berasal dari kegiatan Sensus Ekonomi 2016. Metode sampling dilakukan hanya untuk kegiatan yang menggunakan metode pengumpulan data sample survey, yaitu Survei Perusahaan Pertambangan Non Migas, Survei Captive Power dan Survei Galian URT.

Metode pemilihan sampel perusahaan yang digunakan adalah probability sampling, dengan cara pengambilan sampel secara systematic berulang. Penggantian Sampel dilakukan untuk usaha/perusahaan terpilih sampel yang tidak ditemukan atau tutup, bila masih memiliki kemungkinan untuk penggantian. Penggantian ditentukan oleh Subditrektorat Statistik Pertambangan dan Energi. Sampel pengganti memiliki klasifikasi atau skala usaha yang sama atau pada diklasifikasi dan skala terdekat.

Pengumpulan data survei ini adalah kombinasi pencacahan langsung, yaitu dengan mendatangi perusahaan terpilih dengan membawa kuesioner dan menjelaskan secara garis besar tujuan survei dan materi pertanyaan pada kuesioner. Tujuan mendatangi perusahaan secara langsung adalah untuk mengecek keberadaan perusahaan dan kegiatannya, serta untuk memperoleh keterangan dari orang yang bertanggung jawab dalam pemberian data perusahaan.

Target dan Realisasi Pengumpulan Data

Berikut merupakan target dan realisasi Survei Pertambangan, Energi dan Penggalian, Captive Power dan Updating Direktori :

No	Daftar Isian	Target	Realisasi
1	Galian URT	7	7
2	Survei Perusahaan Air Bersih	2	2

3	Survei Captive Power	7	7
4.	Updating Desa Galian	7	7

Dokumentasi Kegiatan



Survei Konstruksi (Updating Perusahaan Konstruksi, SKTH dan SKP)

Updating Direktori Perusahaan Konstruksi

Secara garis besar, tujuan dari Pengutipan dan *Updating* Direktori Perusahaan Konstruksi adalah:

- a. memperbarui Direktori Konstruksi kondisi terakhir;
- b. memperoleh informasi tentang nama perusahaan, status perusahaan, kualifikasi perusahaan, badan hukum/badan usaha, tahun mulai beroperasi secara komersial, dan bidang pekerjaan utama;
- c. memperoleh informasi tentang aktivitas perusahaan konstruksi yang digunakan sebagai dasar pengambilan sampel survei perusahaan konstruksi pada tahun berikutnya.

Survei Konstruksi Tahunan

Survei perusahaan konstruksi tahunan bertujuan untuk memperoleh data perusahaan konstruksi keadaan tahun 2019, tentang struktur dan ciri-ciri sektor konstruksi di Indonesia melalui data jumlah perusahaan konstruksi, banyaknya tenaga kerja dan balas jasa, pemakaian tenaga listrik, pemakaian bahan bakar, pendapatan dan pengeluaran pekerjaan konstruksi, bahan/ material yang digunakan, pembentukan barang modal, dan lain-lain dalam periode tahun 2019.

Survei Konstruksi Perorangan

Secara umum Survei Usaha Konstruksi Perorangan (SKP20) bertujuan untuk mengetahui profil usaha konstruksi perorangan di Indonesia yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan kegiatan ekonomi secara makro. Secara khusus tujuan SKP20 adalah mendapatkan informasi dasar tentang berbagai informasi mengenai kegiatan, seperti: Rataan banyaknya usaha, Rataan banyaknya tenaga kerja, Pengeluaran untuk tenaga kerja, Struktur input dan output, Struktur permodalan, Kendala dan prospek usaha, dan Keterangan lain yang berkaitan dengan usaha konstruksi perorangan.

Target dan Realisasi Pengumpulan Data

Berikut merupakan target dan realisasi Survei Konstruksi yang meliputi Updating Perusahaan Konstruksi, SKTH dan SKP

No	Daftar Isian	Target	Realisasi
1	Updating Direktori Perusahaan Konstruksi	5	3
2	SKTH (Survei Konstruksi Tahunan)	5	5
3	SKP (Survei Konstruksi Perorangan)	30	30

Dokumentasi Kegiatan



Secara keseluruhan, kegiatan Pengumpulan Data Statistik Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Tahunan, Survei Pertambangan, Energi dan Penggalian, Captive Power dan Updating Direktori, Survei Konstruksi (Updating Perusahaan Konstruksi, SKTH dan SKP) tahun 2021 sudah berjalan dengan baik, ketepatan jadwal pelaksanaan di masing-masing tahapan sudah sesuai. Agar pelaksanaan kegiatan ini lebih baik ke depannya, maka hasil laporan ini bisa menjadi dasar perencanaan kegiatan pengumpulan data selanjutnya

<https://sitarokab.bps.go.id>

FUNGSI STATISTIK DISTRIBUSI

LAPORAN KEGIATAN STATISTIK DATA TRANSPORTASI

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kepulauan dimana pembangunan sektor transportasi dirancang untuk tiga tujuan yaitu: mendukung gerak perekonomian, stabilitas nasional, dan juga mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah dengan memperluas jangkauan arus distribusi barang dan jasa. Saat ini Badan Pusat Statistik (BPS) dituntut menjadi pelopor data statistik terpercaya untuk semua khususnya statistik transportasi yang lingkupnya lebih lengkap, teliti, cermat, dan tepat waktu, serta berorientasi pada kebutuhan pemakai data.

Data transportasi yang dikumpulkan meliputi statistik transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara disajikan untuk publikasi bulanan (Berita Resmi Statistik Transportasi/BRS, Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi/LBDSE/Rapat Kabinet, Laporan Presiden dan Wakil Presiden, Indikator Ekonomi, dan Website BPS) dan publikasi tahunan (Statistik Indonesia dan Statistik Transportasi) serta sebagai bahan *supply* kebutuhan data Lembaga Internasional (ESCAP, World Bank), *supply* kebutuhan internal BPS (Subdit. Neraca Jasa, Subdit. Stat. Lingkungan Hidup, Subdit. Stat. Pariwisata, BPS Provinsi), dan Pemangku kepentingan lainnya.

TUJUAN

Pendataan survei statistik transportasi bertujuan untuk:

1. Mendapatkan data jumlah Bis Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Jumlah Truk/angkutan barang menurut Badan Hukum, tahun pembuatan, bahan bakar, dan daya angkut.
2. Mendapatkan data panjang jalan Kabupaten/Kota.
3. Mendapatkan data bongkar muat barang, kunjungan kapal dan penumpang di pelabuhan laut.

Jadwal Kegiatan

Rangkaian kegiatan Statistik Data Transportasi meliputi briefing, pencacahan, pengolahan. Untuk kegiatan analisis dan tabulasi data dilakukan oleh BPS Provinsi Sulawesi Utara yang dirilis setiap bulan dalam Berita Resmi Statistik (BRS). Kegiatan pengumpulan data transportasi laut dilaksanakan setiap bulan di tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Jadwal Kegiatan Statistik Transportasi Laut Tahun 2021

NO	KEGIATAN	WAKTU
1.	Briefing PCL dan PML	Januari 2021
2.	Pencacahan	1 – 10 setiap bulan
3.	Editing dan Entri Data	1-15 setiap bulan

Pembiayaan

Statistik Transportasi Laut merupakan kegiatan yang pembiayaannya berada pada DIPA BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Adapun mata anggaran yang digunakan yaitu pada output publikasi/laporan statistik distribusi yang terbit tepat waktu (054.01.06.2902.004.001).

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data statistik transportasi laut dilakukan untuk mendata semua pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Untuk transportasi laut dikumpulkan dari 4 pelabuhan, yaitu:

1. Pelabuhan Ulu Siau, di Kelurahan Tatahadeng Kecamatan Siau Timur
2. Pelabuhan Pehe Siau, di Desa Pehe Kecamatan Siau Barat

3. Pelabuhan Tagulandang, di Kelurahan Bahoi Kecamatan Tagulandang
4. Pelabuhan Biaro, di Desa Tope dan Lamanggo Kecamatan Biaro

Pengumpulan data statistik transportasi laut dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

1. Pengisian form (blanko) oleh sumber data/responden (self enumeration). Form (blanko) dikirim ke sumber data melalui petugas lapangan kemudian form (blanko) yang sudah diisi akan diambil kembali oleh petugas lapangan.
2. Pengambilan dokumen ke sumber data/responden. Petugas lapangan mengambil dokumen yang berisi data-data rutin dari sumber data/responden yang berkaitan dengan statistik transportasi.

Bila masih ditemukan isian dokumen tidak lengkap dan tidak konsisten serta dokumen masih kurang kelengkapannya maka petugas melakukan konfirmasi dan klarifikasi ke sumber data. Data transportasi angkutan laut, diperoleh melalui pengisian atau menyalin data dari Sistem Informasi Manajemen Operasional Pelabuhan (Simoppel) yang berada di Kantor Unit Pengelola Pelabuhan Kelas III Ulu Siau.

Daftar Petugas

Petugas pengumpulan data Statistik Transportasi Laut Tahun 2021 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terdiri dari dua pegawai organik yang terdiri sebagai petugas pencacah dan pengawas.

Daftar Petugas Survei Statistik Transportasi Laut BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2021

NO	NAMA PETUGAS	JABATAN
1.	Nurtia Katiandagho, SST	PCL
2.	Suyanto Hadi Suparto, SE	PML

Pencacahan

Sebelum melakukan kegiatan pengumpulan data Statistik Transportasi Laut Tahun 2021 dilakukan *briefing* kepada seluruh petugas. Selain itu juga dilakukan persiapan berbagai dokumen seperti kuesioner dan surat tugas.

Secara umum, pelaksanaan pengumpulan data Statistik Transportasi Laut setiap bulan (Januari-Desember 2021) di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berjalan dengan baik dan lancar. Petugas mampu memenuhi seluruh target sampel setiap bulannya. Akan tetapi adanya pandemi Covid-19 menyebabkan pengumpulan data dilakukan lewat sarana telepon. Dokumentasi dari pelaksanaan lapangan terdapat pada Lampiran 1.

Pengolahan

Pengolahan hasil pengumpulan data Statistik Transportasi Laut Tahun 2021 dilakukan oleh FUNGSI Statistik Distribusi BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Pengolahan tersebut dilakukan dengan cara mengentry isian kuesioner pada form pada <http://transportasi.bps.go.id/simpelbrs/> setiap bulan.

Permasalahan dan Solusi

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan data Statistik Transportasi Laut 2021 di antaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Permasalahan dan Solusi Statistik Transportasi Laut
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2021

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Dalam waktu tiga bulan tertentu responden lama/lupa memberikan data	Petugas rutin menghubungi responden

2.	Saat pemeriksaan masih terdapat data yang tidak konsisten	Petugas mengkonfirmasi isian data baik dengan petugas PCL maupun responden
----	---	--

Pelaksanaan pengumpulan data Statistik Transportasi Laut di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2021 dari tahapan pembagian petugas hingga pelaksanaan lapangan sudah diusahakan semaksimal mungkin. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki lagi. Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya masukan dan saran yang membangun guna perbaikan kualitas data BPS kedepannya

<https://sitarokab.bps.go.id>

Latar Belakang

Perkembangan harga barang dan jasa pada wilayah perdesaan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam pemantauan kebijakan khususnya pada level rumah tangga baik dari sisi produksi maupun konsumsi. Perubahan harga barang dan jasa ini pada gilirannya akan mempengaruhi pola produksi maupun pola konsumsi yang terjadi di masyarakat. Selain itu, adanya perubahan pendapatan masyarakat, pola penawaran dan permintaan barang dan jasa, serta perubahan sikap dan perilaku turut berperan dalam perubahan pola produksi dan konsumsi masyarakat selama beberapa tahun terakhir.

Survei Harga Perdesaan (SHPed) dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) secara rutin setiap bulan meliputi pemantauan perkembangan harga komoditas hasil pertanian beserta harga faktor-faktor produksi yang digunakan petani dari sisi produksi dan pemantauan perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga di wilayah perdesaan dari sisi konsumsi. Pemantauan perkembangan harga barang dan jasa dari kedua sisi ini dimanfaatkan guna perhitungan NTP berupa Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar oleh petani (Ib). Selain itu, pemantauan perkembangan harga barang dan jasa dari sisi konsumsi berguna untuk membangun Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) yang digunakan dalam perhitungan tingkat inflasi atau deflasi di wilayah perdesaan.

Tujuan

Tujuan pengumpulan data harga produsen dan konsumen sektor pertanian di perdesaan adalah:

- 1) Memperoleh data Harga Produsen sektor pertanian (subsektor hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan)
- 2) Memperoleh data harga biaya produksi dan penambahan barang modal sektor pertanian (subsektor hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan)
- 3) Memperoleh data penunjang perhitungan NTP subsektor hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan
- 4) Memperoleh data *Proxy Indicator* kesejahteraan petani perdesaan di sektor pertanian melalui pendataan upah buruh tani
- 5) Memperoleh data harga konsumen perdesaan yang akurat, lengkap dan kontinu
- 6) Memperoleh data indeks harga/inflasi perdesaan

Cakupan

Pengumpulan data harga perdesaan di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro dilakukan pada Kecamatan Siau Timur dan Kecamatan Tagulandang.

Jenis data yang dikumpulkan adalah harga eceran barang dan jasa keperluan rumah tangga perdesaan di pasar kecamatan untuk kelompok makanan dan non makanan. Harga eceran barang dan jasa keperluan rumah tangga perdesaan di pasar maupun di luar pasar dalam kecamatan terpilih untuk kelompok konstruksi, jasa dan transportasi dan kelompok aneka perlengkapan rumah tangga dan lainnya. Selain itu data yang dikumpulkan adalah daftar harga produsen yang diterima petani dan harga yang dibayar petani untuk keperluan biaya produksi pada Subsektor Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan, dan Perikanan.

Jadwal Kegiatan

Rangkaian kegiatan Survei Harga Perdesaan meliputi briefing, pencacahan, pengolahan. Kegiatan pengumpulan Survei Harga Perdesaan dilaksanakan setiap bulan di tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Jadwal Kegiatan Statistik Transportasi Laut Tahun 2021

NO	KEGIATAN	WAKTU
1.	Briefing PCL dan PML	Januari 2021
2.	Pencacahan	1 – 15 setiap bulan
3.	Editing dan Entri Data	1-20 setiap bulan

Pembiayaan

Survei Harga Perdesaan merupakan kegiatan yang pembiayaannya berada pada DIPA BPS Kabupaten Kepulauan Siau tagulandang Biaro. Adapun mata anggaran yang digunakan yaitu pada output publikasi/laporan statistik harga (054.01.06.2903.009.300).

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara langsung kepada responden (pedagang atau penyedia jasa). Harga/tarif yang ditanyakan adalah harga barang dan tarif jasa yang ditransaksikan langsung kepada konsumen.

Daftar Petugas

Petugas pengumpulan data Survei Harga Perdesaan Tahun 2021 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terdiri dari empat pegawai organik yang terdiri sebagai petugas pencacah dan pengawas.

Daftar Petugas Survei Harga Perdesaan BPS Kabupaten
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2021

NO	NAMA PETUGAS	JABATAN
1.	Ortje Manahampi	PCL
2.	Reyske M. Jacobs	PCL
3.	Nurtia Katiandagho, SST	PCL
4.	Suyanto Hadi Suparto, SE	PML

Pencacahan

Sebelum melakukan kegiatan pengumpulan data Survei Harga Perdesaan Tahun 2021 dilakukan *briefing* kepada seluruh petugas. Selain itu juga dilakukan persiapan berbagai dokumen seperti kuesioner dan surat tugas.

Secara umum, pelaksanaan pengumpulan data Survei Harga Perdesaan setiap bulan (Januari-Desember 2021) di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berjalan dengan baik dan lancar.

Pengolahan

Pengolahan hasil pengumpulan data Survei Harga Perdesaan Tahun 2021 dilakukan oleh FUNGSI Statistik Distribusi BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Pengolahan tersebut dilakukan dengan cara mengentry isian kuesioner pada form pada <https://webentry.bps.go.id/shped/> setiap bulan.

Permasalahan dan Solusi

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pencacahan Survei Harga Perdesaan Tahun 2021 di antaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Permasalahan dan Solusi Survei Harga Perdesaan Kabupaten
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2021

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Responden tidak berada ditempat dan responden sibuk melayani pembeli	Petugas PCL membuat janji/kunjungan diwaktu yang tepat
2.	Ada beberapa komoditi yang sulit dicari/tidak dijual dipasaran	Pada saat pengolahan/entri data petugas PML menghapus komoditas tersebut
3.	Hasil wawancara dengan responden cenderung harganya stagnan/kenaikan/penurunan harga komoditas	Petugas PCL melakukan <i>probing</i> dan mengecek kualitas komoditas

Pelaksanaan pengumpulan data Survei Harga Perdesaan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2021 dari tahapan pembagian petugas hingga pelaksanaan lapangan sudah diusahakan semaksimal mungkin. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki lagi. Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya masukan dan saran yang membangun guna perbaikan kualitas data BPS kedepannya

LAPORAN KEGIATAN INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah dikeluarkan oleh pemerintah sejak tahun 2000. Kebijakan ini, diarahkan untuk mempercepat pembangunan daerah secara adil dan merata di seluruh Indonesia. Selain itu, dengan adanya otonomi daerah diharapkan pula mampu mengatasi masalah perimbangan keuangan antar wilayah di Indonesia. Dana perimbangan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah Dana Alokasi Umum (DAU).

Salah satu variabel yang digunakan untuk menghitung DAU adalah Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK) yang didapat dari Survei Harga Kemahalan Kontruksi (SHKK). Survei tersebut dilakukan 4 kali dalam setahun yaitu pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Data yang dikumpulkan meliputi harga bahan bangunan/kontruksi, harga sewa alat berat kontruksi, dan upah jasa kontruksi.

IKK adalah suatu indeks yang menggambarkan tingkat perbandingan harga barang kontruksi antar wilayah. SHKK menjadi penting karena untuk menghitung IKK diperlukan data dari survei tersebut termasuk bobot/diagram timbang.

Tujuan

Tujuan dilakukan SHKK adalah mengumpulkan data harga yang menjadi komponen dalam perhitungan IKK. Data yang dimaksud yaitu: harga bahan bangunan/konstruksi, harga sewa alat berat konstruksi, dan upah jasa konstruksi.

Cakupan

Pengumpulan data SHKK dilakukan di seluruh kabupaten/kota di 34 provinsi Indonesia. Pencacahan dilakukan setiap tanggal 20 s.d. 30 pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Responden yang dicacah adalah pedagang grosir, produsen, pedagang

eceran, Dinas PU atau SKPD lainnya, jasa perawatan alat berat serta pemborong/kontraktor. Data yang dikumpulkan yaitu:

1. Harga bahan bangunan/konstruksi
2. Harga sewa alat berat/konstruksi
3. Upah jasa konstruksi

Jadwal Kegiatan

Rangkaian kegiatan SHKK meliputi briefing, pencacahan, pengolahan. Kegiatan pengumpulan data SHKK dilaksanakan secara triwulanan, dengan rincian sebagai berikut:

Jadwal Kegiatan SHKK Tahun 2021

NO	KEGIATAN	WAKTU
1.	Briefing PCL dan PML	Januari 2021
2	Briefing PCL dan PML Kuesioner Baru	7 – 10 Juli 2021
3.	Pencacahan	20 – 30 Januari, April, Juli, Oktober
3.	Editing dan Entri Data	20 – 30 Januari, April, Juli, Oktober

Pembiayaan

Survei Harga Kemahalan Kontruksi (SHKK) merupakan kegiatan yang pembiayaannya berada pada DIPA BPS Kabupaten Kepulauan Siau tagulandang Biaro. Adapun mata anggaran yang digunakan yaitu pada output publikasi/laporan statistik harga konstruksi (054.01.06.2903.012.100).

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data SHKK dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dan responden. Responden yang dicacah adalah pedagang grosir, produsen, pedagang eceran, Dinas PU atau SKPD lainnya, jasa perawatan alat berat serta pemborong/kontraktor.

Daftar Petugas

Petugas pengumpulan data SHKK Tahun 2021 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terdiri dari tiga pegawai organik dan satu mitra KSK yang terdiri sebagai petugas pencacah dan pengawas.

Daftar Petugas SHKK BPS Kabupaten
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2021

NO	NAMA PETUGAS	JABATAN
1.	Joniver Mona	PCL
2.	Ortje Manahampi	PCL
3.	Nurtia Katiandagho, SST	PCL
4.	Suyanto Hadi Suparto, SE	PML

Pencacahan

Sebelum melakukan kegiatan pengumpulan data SHKK Tahun 2021 dilakukan *briefing* kepada seluruh petugas. Selain itu juga dilakukan persiapan berbagai dokumen seperti kuesioner dan surat tugas.

Secara umum, pelaksanaan pengumpulan data SHKK setiap triwulanan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berjalan dengan baik dan lancar. Dokumentasi dari pelaksanaan lapangan terdapat pada Lampiran 1.

Pengolahan

Pengolahan hasil pengumpulan data SHKK Tahun 2021 dilakukan oleh FUNGSI Statistik Distribusi BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Pengolahan data triwulan 1 s.d 2 dilakukan dengan cara mengentry isian kuesioner pada form pada <https://webentry.bps.go.id/ikkonline/>. Setelah diterapkan kuesioner baru (berbasis responden) maka pengolahan data triwulan 3 s.d 4 dilakukan dengan cara mengentry isian kuesioner pada form pada <https://webentry.bps.go.id/shkk/>.

Permasalahan dan Solusi

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pencacahan SHKK 2021 di antaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Permasalahan dan Solusi SHKK Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2021

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Responden sulit untuk diwawancarai/ sibuk melayani pembeli	Petugas PCL membuat janji/kunjungan diwaktu yang tepat
2.	Berbeda satuan komoditi	Melakukan pengecekan isian kepada responden dan mengkonfersi ke satuan nasional
3.	Responden merasa bosan	Petugas PCL kembali memberikan penjelasan tentang survei dan tetap tenang

Pelaksanaan pengumpulan data SHKK di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2021 dari tahapan pembagian petugas hingga pelaksanaan lapangan sudah diusahakan semaksimal mungkin. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki lagi. Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya masukan dan saran yang membangun guna perbaikan kualitas data BPS kedepannya.

Latar Belakang

Sektor pariwisata mempunyai peran penting dalam pembangunan perekonomian Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, terutama sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kegiatan pariwisata merupakan mata rantai kegiatan yang sangat panjang dan luas dari berbagai kegiatan yang menampung penyerapan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja serta dapat mendorong kegiatan ekonomi lainnya. Disamping itu, kegiatan kepariwisataan akan memperluas pemerataan pembangunan, memperkuat persatuan dan kesatuan serta memperkenalkan budaya Kabupaten Siau Tagulandang Biaro.

Meningkatnya kegiatan pariwisata di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro juga memberikan efek domino terhadap perkembangan industri perhotelan dan akomodasi penginapan lainnya, yang ikut serta berperan dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Perkembangan kemajuan industri perhotelan tersebut dapat diikuti melalui indikator tingkat penghunian kamar hotel/akomodasi, jumlah kamar yang terjual/digunakan dan rata-rata lamanya tamu menginap. Untuk memenuhi kebutuhan data tentang akomodasi tersebut, maka dilakukan kegiatan pencacahan sampel perusahaan/usaha jasa akomodasi (VHTL) secara rutin setiap tahun. Data/informasi ini diharapkan dapat dijadikan landasan perencanaan dan evaluasi, baik oleh instansi pemerintah maupun swasta, untuk menentukan kebijakan terkait usaha tersebut.

Tujuan

Adapun tujuan pencacahan Survei Usaha Penyedia Jasa Akomodasi (V-HTL) antara lain:

1. Mendapatkan karakteristik spesifik (profil) kegiatan usaha/perusahaan akomodasi;
2. Mendapatkan gambaran karakteristik tenaga kerja kegiatan usaha/perusahaan akomodasi;
3. Mendapatkan gambaran struktur pendapatan dan biaya/pengeluaran serta penambahan dan pengurangan barang modal;
4. Mendapatkan data bahan baku yang digunakan oleh usaha akomodasi;
5. Mendapatkan data/informasi jumlah tamu usaha akomodasi dan keterkaitannya dengan kepemilikan modal dan lingkungan;

Cakupan

Pengumpulan data Survei Perusahaan/Usaha Penyedia Jasa Akomodasi (V-HTL) dilakukan secara lengkap di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Pencacahan dilakukan setiap tahun dengan jenis usaha/perusahaan hotel berbintang, hotel non bintang, dan penyedia jasa akomodasi lainnya. Kerangka sampel usaha/perusahaan yang digunakan adalah daftar usaha/perusahaan hasil direktori jasa akomodasi.

Jadwal Kegiatan

Rangkaian kegiatan Survei Perusahaan/Usaha Penyedia Jasa Akomodasi (V-HTL) meliputi briefing, pencacahan, pengolahan. Kegiatan pengumpulan data dilaksanakan setiap tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Jadwal Kegiatan SHKK Tahun 2021

NO	KEGIATAN	WAKTU
1.	Briefing PCL dan PML	September 2021
2.	Pencacahan	September – Oktober
3.	Editing dan Entri Data	September - November

Pembiayaan

Survei Perusahaan/Usaha Penyedia Jasa Akomodasi (V-HTL) merupakan kegiatan yang pembiayaannya berada pada DIPA BPS Kabupaten Kepulauan Siau tagulandang Biaro. Adapun mata anggaran yang digunakan yaitu pada output publikasi/laporan statistik harga konstruksi (054.01.06.2908.004.200).

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data Survei Perusahaan/Usaha Penyedia Jasa Akomodasi (V-HTL) dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dan responden.

Daftar Petugas

Petugas pengumpulan data Survei Usaha Penyedia Jasa Akomodasi (V-HTL) Tahun 2021 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terdiri dari empat pegawai organik yang terdiri sebagai petugas pencacah dan pengawas.

Daftar Petugas Survei V-HTL BPS Kabupaten
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2021

NO	NAMA PETUGAS	JABATAN
1.	Reyske Jacobs	PCL
2.	Ortje Manahampi	PCL
3.	Nurtia Katiandagho, SST	PCL
4.	Suyanto Hadi Suparto, SE	PML

Pencacahan

Sebelum melakukan kegiatan pengumpulan data Survei Perusahaan/Usaha Penyedia Jasa Akomodasi (V-HTL) Tahun 2021 dilakukan *briefing* kepada seluruh petugas. Selain itu juga dilakukan persiapan berbagai dokumen seperti kuesioner dan surat tugas.

Secara umum, pelaksanaan pengumpulan data Survei Perusahaan/Usaha Penyedia Jasa Akomodasi (V-HTL) di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berjalan dengan baik dan lancar. Dokumentasi dari pelaksanaan lapangan terdapat pada Lampiran 1.

Pengolahan

Pengolahan hasil pengumpulan data Survei Perusahaan/Usaha Penyedia Jasa Akomodasi (V-HTL) Tahun 2021 dilakukan oleh FUNGSI Statistik Distribusi BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Pengolahan data dilakukan dengan cara mengentry isian kuesioner pada form pada <https://webentry.bps.go.id/pariwisata/>.

Permasalahan dan Solusi

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pencacahan Survei Perusahaan/Usaha Penyedia Jasa Akomodasi (V-HTL) di antaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Permasalahan dan Solusi Survei V-HTL Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2021

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Responden sulit untuk diwawancarai karena sibuk	Petugas PCL membuat janji/kunjungan diwaktu yang tepat
2.	Laporan keuangan tidak lengkap	Informasi mengenai pendapatan/pengeluaran usaha akomodasi disesuaikan dengan jawaban responden
3.	Saat pemeriksaan isian kuesioner terdapat data yang tidak konsisten	Petugas PML melakukan konfirmasi dengan PCL/responden terkait

Pelaksanaan pengumpulan data Survei Usaha/Perusahaan Jasa Akomodasi (V-HTL) di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2021 dari tahapan pembagian petugas

hingga pelaksanaan lapangan sudah diusahakan semaksimal mungkin. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki lagi. Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya masukan dan saran yang membangun guna perbaikan kualitas data BPS kedepannya.

<https://sitarokab.bps.go.id>

Latar Belakang

Pembangunan daerah adalah salah satu unsur dari program pembangunan nasional secara keseluruhan. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya penataan sistem perekonomian daerah baik tingkat kabupaten/kota maupun desa ke arah peningkatan pendayagunaan potensi ekonomi secara lebih efektif dan efisien. Upaya penataan sistem perekonomian tersebut tentunya berkaitan erat dengan masalah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain, bagaimana suatu pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada, meningkatkan pendapatan daerahnya, dan mengalokasikannya untuk kesejahteraan masyarakat.

Dengan melihat potensi suatu daerah dari sisi pendapatan dan pengeluaran, maka dapat disusun kebijakan yang tepat, baik oleh pemerintah daerah itu sendiri, pemerintah pusat, maupun para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka aktivitas pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka dirasa perlu untuk menyusun Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, begitu halnya dengan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro.

Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah antara lain:

1. Menyediakan data tahunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Menyediakan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDesa) dan realisasi APBDesa

3. Mendapatkan indikator tentang efektifitas kinerja keuangan daerah dan penggunaannya untuk belanja daerah
4. Mengurangi *time lag* penyajian data keuangan daerah

Cakupan

Pencacahan Survei Statistik Keuangan dilakukan oleh KSK/Staf BPS Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Responden Survei Statistik Keuangan merupakan instansi pemerintah daerah, kepala desa maupun pihak swasta (lembaga keuangan). Periode pencacahan Survei Statistik Keuangan yaitu tahunan dimana dilakukan pada pertengahan tahun.

Jadwal Kegiatan

Rangkaian kegiatan Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah meliputi briefing, pencacahan, pengolahan. Kegiatan pengumpulan data Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara tahunan, dengan rincian sebagai berikut:

Jadwal Kegiatan SHKK Tahun 2021

NO	KEGIATAN	WAKTU
1.	Briefing PCL dan PML	Agustus 2021
2.	Pencacahan	Agustus – September
3.	Editing dan Entri Data	September - Oktober

Pembiayaan

Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah merupakan kegiatan yang pembiayaannya berada pada DIPA BPS Kabupaten Kepulauan Siau tagulandang Biaro. Adapun mata anggaran yang digunakan yaitu pada output publikasi/laporan statistik keuangan pemerintah daerah (054.01.06.2908.005.053).

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dan responden ataupun pengisian form (blanko) oleh sumber data/responden (self enumeration).

Daftar Petugas

Petugas pengumpulan data Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terdiri dari tiga pegawai organik yang terdiri sebagai petugas pencacah dan pengawas.

Daftar Petugas Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah
BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2021

NO	NAMA PETUGAS	JABATAN
1.	Reyske Jacobs	PCL
2.	Ortje Manahampi	PCL
3.	Nurtia Katiandagho, SST	PCL
4.	Suyanto Hadi Suparto, SE	PML

Pencacahan

Sebelum melakukan kegiatan pengumpulan data Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 dilakukan *briefing* kepada seluruh petugas. Selain itu juga dilakukan persiapan berbagai dokumen seperti kuesioner dan surat tugas.

Secara umum, pelaksanaan pengumpulan data Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berjalan dengan baik dan lancar. Dokumentasi dari pelaksanaan lapangan terdapat pada Lampiran 1.

Pengolahan

Pengolahan hasil pengumpulan data Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 dilakukan oleh FUNGSI Statistik Distribusi BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Pengolahan data dilakukan dengan cara mengentry isian kuesioner pada form pada <http://webentry.bps.go.id/statkeu>.

Permasalahan dan Solusi

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pencacahan Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah 2021 di antaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Permasalahan dan Solusi Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2021

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Data keuangan pemerintah daerah/desa sulit diperoleh	Petugas PCL melakukan kunjungan berulang kali
2.	Isian data keuangan desa tidak lengkap dan konsisten	Petugas PCL melakukan konfirmasi dengan responden
3.	Format keuangan pemerintah daerah/desa berbeda dengan format kuesioner BPS	Petugas PML melakukan briefing singkat mengenai cara pengisian kuesioner

Pelaksanaan pengumpulan data Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2021 dari tahapan pembagian petugas hingga pelaksanaan lapangan sudah diusahakan semaksimal mungkin. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki lagi. Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya masukan dan saran yang membangun guna perbaikan kualitas data BPS kedepannya.

Latar Belakang

Sektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peran strategis dalam pembangunan. Selain memberikan sumbangan yang berarti dalam menciptakan lapangan usaha, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan, sektor perdagangan juga dapat mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Peran perdagangan dalam suatu daerah sangat penting, sehingga perlu diketahui profil usaha perdagangan baik di tingkat nasional maupun tingkat provinsi, gambaran mengenai data perdagangan domestik, serta perdagangan antar wilayah.

Perdagangan antar wilayah merupakan perdagangan dan pendistribusian barang dari satu provinsi ke provinsi lain yang berbeda dalam negara yang sama. Ketersediaan dan kebutuhan komoditas di setiap provinsi yang berbeda-beda serta fluktuasi dan disparitas harga barang pokok antar daerah yang cukup tinggi menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan antar wilayah.

Dengan dilaksanakannya Survei Perdagangan tahun 2021, diharapkan akan menghasilkan gambaran mengenai profil kegiatan ekonomi usaha/perusahaan di sektor perdagangan, baik pada tingkat provinsi maupun nasional dan menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) serta gambaran mengenai peta perdagangan antar wilayah provinsi di Indonesia, yang dapat dijadikan acuan dibangunnya sistem distribusi perdagangan yang lebih efisien.

Maksud dan Tujuan

Survei Perdagangan Antar Wilayah Tahun 2021 mempunyai tujuan untuk:

1. Mendapatkan profil sektor perdagangan,
2. Mendapatkan nilai perdagangan,
3. Mendapatkan nilai (Rp) dan volume (Kg) perdagangan antar wilayah,
4. Mendapatkan peta perdagangan antar wilayah,
5. Mengetahui moda transportasi utama yang digunakan.

Cakupan

Survei Perdagangan Tahun 2021 mencakup 488 kabupaten/kota yang terdiri dari 34 ibukota provinsi dan 454 kabupaten/kota dengan jumlah sampel sebanyak 31.540 usaha/perusahaan.

Survei Perdagangan Antar Wilayah (PAW) Tahun 2021 mencakup semua usaha/perusahaan dengan skala UMB pada kategori B (Pertambangan dan Penggalian) dan kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor), dengan kriteria usaha tersebut melakukan penjualan barang ke provinsi lain/luar negeri atau usaha yang melakukan pembelian bahan baku/penolong/barang dagangan dari provinsi lain/luar negeri.

Jadwal Kegiatan

Rangkaian kegiatan Survei Perdagangan Antar Wilayah meliputi briefing, pencacahan, pengolahan. Kegiatan Survei Perdagangan Antar Wilayah dilaksanakan setahun sekali, dengan rincian sebagai berikut:

Jadwal Pelaksanaan Survei Perdagangan Antar Wilayah Tahun 2021

NO	KEGIATAN	WAKTU
1.	Briefing Petugas Lapangan	September
2.	Pencacahan dan Pengawasan Lapangan	September – Oktober
3.	Pemeriksaan Dokumen	Oktober – November
4.	Entri data	Oktober – November

Pembiayaan

Survei Perdagangan Antar Wilayah Tahun 2021 merupakan kegiatan yang pembiayaannya berada pada DIPA BPS Kabupaten Kepulauan Siau tagulandang Biaro. Adapun mata anggaran yang digunakan yaitu pada output publikasi/laporan statistik distribusi yang terbit tepat waktu (054.01.06.2902.005.910).

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data usaha/perusahaan terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dan responden. Untuk usaha/perusahaan yang relatif besar, pengumpulan data mungkin lebih dari satu kali kunjungan.

Daftar Petugas

Petugas Survei Perdagangan Antar Wilayah Tahun 2021 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terdiri dari dua pegawai organik dan satu orang mitra KSK yang terdiri sebagai petugas pencacah dan pengawas.

Daftar Petugas Survei Perdagangan Antar Wilayah BPS Kabupaten
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2021

NO	NAMA PETUGAS	JABATAN
1.	Joniver Mona	PCL
2.	Nurtia Katiandagho, SST	PCL
3.	Suyanto Hadi Suparto, SE	PML

Pencacahan

Sebelum melakukan kegiatan pengumpulan data Survei Perdagangan Antar Wilayah Tahun 2021 dilakukan *briefing* kepada seluruh petugas. Selain itu juga dilakukan persiapan berbagai dokumen seperti kuesioner dan surat tugas.

Secara umum, pelaksanaan pengumpulan data Survei Perdagangan Antar Wilayah Tahun 2021 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berjalan dengan baik dan lancar. Petugas mampu memenuhi seluruh target sampel. Akan tetapi adanya pandemi Covid-19 menyebabkan jadwal pelaksanaan mengalami kemunduran dari jadwal yang seharusnya dimulai Minggu ke-II Maret. Dokumentasi dari pelaksanaan lapangan terdapat pada Lampiran 1.

Pengolahan

Pengolahan daftar sampel utama (VPAW.20-DSPU) dan sampel pengganti (VPAW.20-DSPP) dilakukan oleh FUNGSI Statistik Distribusi BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Pengolahan tersebut dilakukan dengan cara mengentry isian kuesioner pada form <http://ipd.bps.go.id/vpdn>. Sedangkan pengolahan hasil pencacahan (VPAW-20) dilakukan oleh Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Sulawesi Utara.

Permasalahan dan Solusi

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pencacahan Survei Perdagangan Antar Wilayah Tahun 2021 di antaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Permasalahan dan Solusi Survei Perdagangan Antar Wilayah Tahun 2021
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2021

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Nama usaha, alamat, kategori di VPAW.20-DSPU tidak tercatat lengkap sehingga petugas PCL kesusahan mencari usaha/perusahaan	- Petugas PCL melakukan konfirmasi dengan petugas PML - Petugas PCL mencari beberapa informasi di sekitar wilayah usaha/perusahaan
2.	Sampel usaha yang pindah alamat	- Petugas PCL mencari beberapa informasi di sekitar wilayah usaha/perusahaan
3.	Sampel pengganti secara <i>Purposive</i>	Petugas PCL berkoordinasi dengan perangkat Desa/Kelurahan, KSK, Mitra terkait pemilihan sampel pengganti yang sesuai
4.	Responden yang sulit di wawancarai	Petugas PCL membuat janji terlebih dahulu dengan penanggungjawab usaha/perusahaan
5.	Saat pemeriksaan masih terdapat data yang tidak konsisten	Petugas PML mengkonfirmasi isian data baik dengan petugas PCL maupun responden

Pelaksanaan pengumpulan data Survei Perdagangan Antar Wilayah Tahun 2021 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2021 dari tahapan pembagian petugas hingga pelaksanaan lapangan sudah diusahakan semaksimal mungkin. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki lagi. Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya masukan dan saran yang membangun guna perbaikan kualitas data BPS kedepannya.

Latar Belakang

Sektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan di bidang ekonomi yang mempunyai peran strategis dalam rangka pembangunan yang berwawasan nusantara. Sektor perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta memberikan sumbangan yang berarti dalam menciptakan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan.

Pasar sebagai salah satu sarana distribusi mempunyai peran penting dalam kegiatan perekonomian, baik bagi produsen, pelaku kegiatan perdagangan, maupun konsumen. Terdapat beberapa jenis pasar yakni pasar tradisional/rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko modern/swalayan. Oleh karena itu perlu disusun direktori pasar berdasarkan jenisnya, baik yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta.

Penyusunan Direktori Pasar dan Pusat Perdagangan sudah dilaksanakan pada tahun 2017. Untuk itu diperlukan pemeliharaan terhadap direktori yang ada sehingga dilakukan penyusunan direktori pasar untuk mengetahui apakah aktivitas pasar dan pusat perbelanjaan tersebut masih ada, sudah tutup, pindah atau ada yang baru.

Selain dengan melakukan pemeriksaan ke dinas terkait, pemutakhiran data pasar dilakukan dengan memanfaatkan *big data*. Pemanfaatan *big data* yang disertai kolaborasi lintas institusi, mendukung untuk menghasilkan informasi yang lengkap dalam penyusunan *frame* pasar. Dengan menggabungkan dua metode ini, diharapkan dapat diperoleh daftar pasar yang lengkap dan mutakhir.

Tujuan

Secara umum tujuan penyusunan direktori pasar dan pusat perdagangan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan *frame* pasar yang terdiri dari nama dan alamat pasar/pusat perdagangan di seluruh Indonesia
2. Mendapatkan jumlah pasar menurut klasifikasinya

Cakupan

Pasar yang didaftar adalah seluruh pasar baik pasar rakyat, pusat perbelanjaan, maupun toko swalayan yang berada di seluruh kabupaten/kota di 34 provinsi. Termasuk di dalamnya pasar khusus seperti pasar bunga, pasar ikan, pasar hewan, pasar barang-barang bekas dan lain-lain yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta.

Jadwal Kegiatan

Rangkaian kegiatan Penyusunan Direktori Pasar dan Pusat Perdagangan Tahun 2021 meliputi briefing, pencacahan, dan pengolahan. Kegiatan Penyusunan Direktori Pasar dan Pusat Perdagangan dilaksanakan setahun sekali, dengan rincian sebagai berikut:

Jadwal Pelaksanaan Survei Perdagangan Antar Wilayah Tahun 2021

NO	KEGIATAN	WAKTU
1.	Briefing Petugas Lapangan	September
2.	Pencacahan dan Pengawasan Lapangan	September – Oktober
3.	Pemeriksaan Dokumen	Oktober
4.	Entri data	Oktober

Pembiayaan

Penyusunan Direktori Pasar dan Pusat Perdagangan Tahun 2021 merupakan kegiatan yang pembiayaannya berada pada DIPA BPS Kabupaten Kepulauan Siau tagulandang Biaro. Adapun mata anggaran yang digunakan yaitu pada output publikasi/laporan statistik distribusi yang terbit tepat waktu (054.01.06.2902.006.001).

Metode Pengumpulan Data

Data Penyusunan Direktori Pasar, diperoleh melalui pengisian atau menyalin data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Pengelola Pasar Ampera Siau Timur dan Kantor Kecamatan Tagulandang

Daftar Petugas

Petugas Penyusunan Direktori Pasar dan Pusat Perdagangan Tahun 2021 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terdiri dari dua pegawai organik yang terdiri sebagai petugas pencacah dan pengawas.

Daftar Petugas Penyusunan Direktori Pasar dan Pusat Perdagangan
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2021

NO	NAMA PETUGAS	JABATAN
1.	Nurtia Katiandagho, SST	PCL
2.	Suyanto Hadi Suparto, SE	PML

Pencacahan

Sebelum melakukan kegiatan pengumpulan data Penyusunan Direktori Pasar dan Pusat Perdagangan Tahun 2021 dilakukan *briefing* kepada seluruh petugas. Selain itu juga dilakukan persiapan berbagai dokumen seperti kuesioner dan surat tugas.

Secara umum, pelaksanaan pengumpulan data Penyusunan Direktori Pasar dan Pusat Perdagangan Tahun 2021 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berjalan

dengan baik dan lancar. Petugas mampu memenuhi seluruh target sampel. Akan tetapi adanya pandemi Covid-19 menyebabkan jadwal pelaksanaan mengalami kemunduran dari jadwal yang seharusnya dimulai sejak bulan Juli Tahun 2021. Dokumentasi dari pelaksanaan lapangan terdapat pada Lampiran 1.

Pengolahan

Pengolahan daftar Penyusunan Direktori Pasar dan Pusat Perdagangan Tahun 2021 dilakukan oleh FUNGSI Statistik Distribusi BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Pengolahan tersebut dilakukan dengan cara mengentry isian kuesioner pada form <http://ipd.bps.go.id/vpdn>.

Permasalahan dan Solusi

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Direktori Pasar dan Pusat Perdagangan Tahun 2021 di antaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Permasalahan dan Solusi Penyusunan Direktori Pasar dan Pusat Perdagangan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2021

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Data pasar yang diperoleh dari Bidang Pasar dan Pengelola Pasar berbeda	Petugas PML dan PCL melakukan konfirmasi kepada Dinas terkait
2.	Pada saat pencacahan data yang dimiliki tidak terupdate	Petugas pengelola pasar melakukan perhitungan manual
3.	Pengelola pasar sulit ditemui di jam kerja karena sibuk dan tugas luar sehingga tidak dapat ditemui	Membuat janji kapan ada waktu untuk dilakukan pencacahan dan melakukan kunjungan ulang.

Pelaksanaan pengumpulan data Penyusunan Direktori Pasar dan Pusat Perdagangan Tahun 2021 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2021 dari tahapan

pembagian petugas hingga pelaksanaan lapangan sudah diusahakan semaksimal mungkin. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki lagi. Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya masukan dan saran yang membangun guna perbaikan kualitas data BPS kedepannya.

FUNGSI NERWILLIS

PENGELUARAN RUMAH TANGGA DAN INSTITUSI NIRLABA

1.1 SKKRT

1.1.1 Latar Belakang

Rumah tangga merupakan konsumen terbesar dalam perekonomian Indonesia. Tahun 2019, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) menyumbang lebih dari separuh dalam PDB Indonesia yaitu sebesar 56,62%. Sayangnya, belum tersedia indikator untuk mengestimasi PKRT secara triwulanan. Susenas yang sebelumnya menjadi data dasar penghitungan PKRT triwulanan, mulai tahun 2015 hanya tersedia semesteran (Maret dan September). Dalam memenuhi tujuan estimasi PKRT triwulanan, maka diselenggarakan survei yang mencakup kebutuhan data-data tersebut. Survei yang dimaksudkan adalah Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga (SKKRT).

1.1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga (SKKRT) Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- * Mengetahui pola pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) triwulanan
- * Mendapatkan gambaran pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) menurut karakteristik rumah tangga
- * Memperoleh indikator pendukung pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) triwulanan

1.1.3 Cakupan

Survei SKKRT dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia sejumlah 514 kabupaten/kota dan berjumlah 15.420 sampel setiap triwulannya. Sampel bersifat panel untuk triwulan I sampai triwulan IV dan dikumpulkan secara *purposive sampling* dengan alokasi menurut kategori pendapatan. Adapun variable-variabel yang dikumpulkan dari pencacahan SKKRT adalah sebagai berikut:

- * Karakteristik rumah tangga: pendidikan dan lapangan usaha KRT, jumlah ART, pendapatan dan kategori pendapatan rumah tangga, serta klasifikasi daerah (perdesaan/perkotaan)
- * Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) menurut 12 divisi COICOP
- * Keterangan konsumsi barang dari belanja *off-line* atau *on-line*
- * Keterangan konsumsi jasa dari belanja *on-line*.
- * Keterangan pembiayaan konsumsi rumah tangga

1.2 SKLNPRT

1.2.1 Latar Belakang

Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah lembaga formal maupun informal yang dibentuk oleh perorangan atau kelompok masyarakat dalam rangka menyediakan barang/jasa secara gratis atau dengan harga yang tidak signifikan secara ekonomi (terlibat dalam produksi non-pasar) kepada anggotanya/rumah tangga/kelompok masyarakat. LNPRT tidak dikendalikan oleh pemerintah. LNPRT merupakan mitra pemerintah yang menyediakan jasa sosial kemasyarakatan. Pengeluaran konsumsi LNPRT merupakan salah satu komponen PDB. Minimnya informasi dan data administratif mengenai LNPRT menyebabkan diselenggarakannya survei yang mencakup

data-data tersebut. Survei yang dilaksanakan adalah Survei Khusus Lembaga Non-profit yang Melayani Rumah Tangga Triwulanan (SKLNPRT).

1.2.2 Maksud dan Tujuan

Secara sistematis kegiatan SKLNPRT Tahun 2021 dimaksudkan untuk mencapai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

- * Menyusun indikator pengeluaran konsumsi LNPRT dalam PDB
- * Menyusun indikator pendapatan dan pengeluaran LNPRT triwulanan
- * Mengetahui pola pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan

1.2.3 Cakupan

Kegiatan SKLNPRT dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, yaitu sejumlah 514 kabupaten/kota dengan sampel yang berjumlah 5.140 sampel. Sampel bersifat panel untuk Triwulan I sampai Triwulan IV dengan jenis lembaga yang dijadikan sampel sebagai berikut:

- * Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Partai Politik
- * Organisasi Sosial (Orsos)
- * Organisasi Profesi (Orprof)
- * Perkumpulan Sosial/Kebudayaan/Olah Raga dan Hobi
- * Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- * Lembaga Keagamaan
- * Organisasi Bantuan Kemanusiaan/Beasiswa (OBK)

1.3 Updating Direktori LNPRT

1.3.1 Latar Belakang

Perkembangan saat ini menunjukkan Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) terus bermunculan. LNPRT sebagai bagian dari Lembaga Non Profit (LNP), berperan sebagai mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti penegakan hukum, pengentasan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, Badan Pusat Statistik (BPS) perlu melakukan kegiatan pengumpulan data direktori melalui pendekatan dinas/instansi untuk mengetahui jumlah populasi LNPRT. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung BPS dalam rangka penyusunan neraca nasional khususnya sektor LNPRT.

1.3.2 Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan kegiatan *Updating* Direktori LNPRT Tahun 2021 memiliki beberapa maksud dan tujuan, antara lain yaitu sebagai berikut:

- * Mendapatkan populasi LNPRT *by name by address*
- * Memperbaiki klasifikasi pelaku LNPRT berdasarkan COPNI

1.3.3 Cakupan

Kegiatan pengumpulan data direktori LNPRT dilakukan di 34 provinsi dan 511 kabupaten/kota. Sampel untuk setiap provinsi/kabupaten/kota sebanyak 10 unit. Unit sampel dari kegiatan *Updating* Direktori LNPRT adalah dinas provinsi/kabupaten/kota yang berpotensi memiliki daftar LNPRT dan sumber data lainnya.

PERENCANAAN

2.1 SKKRT

2.1.1 Jadwal Kegiatan

Rangkaian kegiatan SKKRT meliputi briefing, pencacahan, pengolahan, analisis, dan tabulasi. Kegiatan SKKRT 2021 dilaksanakan secara triwulanan mulai dari bulan April hingga Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Jadwal Kegiatan SKKRT Tahun 2021

NO	KEGIATAN	WAKTU
1.	Briefing PCL dan PML	April 2021
2.	Pencacahan * Triwulan I 2021 * Triwulan II 2021 * Triwulan III 2021 * Triwulan IV 2021	23 Maret - 7 April 20 - 30 Juni 20 - 30 September 1 - 11 Desember
3.	Editing dan Entri Data * Triwulan I 2021 * Triwulan II 2021 * Triwulan III 2021 * Triwulan IV 2021	8 - 14 April 1 - 7 Juli 1 - 7 September 12 - 18 Desember
4.	Analisis dan Tabulasi * Triwulan I 2021 * Triwulan II 2021 * Triwulan III 2021 * Triwulan IV 2021	14 - 21 April 8 - 14 Juli 8 - 14 April 19 - 31 Desember

2.1.2 Pembiayaan

Kegiatan SKKRT 2021 merupakan kegiatan yang pembiayaannya berada pada DIPA BPS Kepulauan Siau tagulandang Biaro. Adapun mata anggaran yang digunakan yaitu pada output publikasi/laporan neraca statistik pengeluaran serta komponen

penyusunan komponen pengeluaran rumah tangga dan institusi nirlaba triwulanan/tahunan dan penyusunan SUT/IO sisi uses (054.01.06.2895.007.051).

2.1.3 Target Sampel

Responden dalam SKKRT 2021 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sejumlah 30 sampel rumah tangga panel per triwulan. Apabila sampel berubah, sampel pengganti juga diambil secara *purposive sampling*. Pengambilan sampel berdasarkan pengkategorian pendapatan dengan alokasi sebagai berikut:

Target Sampel SKKRT Tahun 2021

NO	KATEGORI TOTAL PENDAPATAN	JUMLAH SAMPEL
1.	< 4 Juta Rupiah	6
2.	4-5,99 Juta Rupiah	9
3.	6-7,99 Juta Rupiah	9
4.	> 8 Juta Rupiah	6
TOTAL SAMPEL		30

Selain mempertimbangkan pengkategorian rumah tangga, pemilihan sampel juga mempertimbangkan lapangan usaha Kepala Rumah Tangga (KRT). Rumah tangga sampel yang lapangan usaha KRT-nya adalah administrasi pemerintah (berkode 15) hanya diperbolehkan maksimal tiga rumah tangga.

Untuk triwulan dua dan seterusnya, jika terdapat sampel rumah tangga yang *non-respon*, pindah, atau tidak ditemukan, maka penggantian sampel diperbolehkan selama berada dalam kategori pendapatan yang sama. Selain itu, jika ada rumah tangga yang mengalami pergeseran kategori pendapatan, maka sesuaikan kode kategori pendapatannya dan tetap dicatat dengan nomor urut sampel yang sama.

2.1.4 Daftar Petugas

Petugas SKKRT Tahun 2021 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terdiri dari enam pegawai organik sebagai pencacah serta dua pegawai organik BPS sebagai pengawas dan pemeriksa dokumen sebagai mana yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Daftar Petugas SKKRT Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2021

NO	NAMA PETUGAS	JABATAN
1.	Ortje Manahampi	PCL
2.	Reyske M. Jacobs	PCL
3.	Wulandari Ponto, SST.	PCL
4.	Nurtia Katiandagho, SST.	PCL
5.	Nadya Tatum Tsaniya, S.Tr.Stat.	PCL
6.	Anisa Sekarwati, A.Md.Stat.	PCL
7.	Meity C. Sinadia, SE.	PML
8.	Nabella Intan Karasta, S.Tr.Stat.	PML

2.2 SKLNPRT

2.2.1 Jadwal Kegiatan

Rangkaian kegiatan SKLNPRT meliputi briefing, pencacahan, pengolahan, analisis, dan tabulasi. Kegiatan SKLNPRT 2021 dilaksanakan secara triwulanan mulai dari bulan April hingga Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Jadwal Kegiatan SKLNPRT Tahun 2021

NO	KEGIATAN	WAKTU
1.	Briefing PCL dan PML	Maret 2019
2.	Pelaksanaan pencacahan dan pengawasan lapangan SKLNPRT Triwulan 1	April 2019
3.	Pelaksanaan pencacahan dan pengawasan lapangan SKLNPRT Triwulan 2	Juli 2019
4.	Pelaksanaan pencacahan dan pengawasan lapangan SKLNPRT Triwulan 3	Oktober 2019
5.	Pelaksanaan pencacahan dan pengawasan lapangan SKLNPRT Triwulan 4	Desember 2019

2.2.2 Pembiayaan

Kegiatan SKLNPRT 2021 merupakan kegiatan yang pembiayaannya berada pada DIPA BPS Kepulauan Siau tagulandang Biaro. Adapun mata anggaran yang digunakan yaitu pada output publikasi/laporan neraca statistik pengeluaran serta komponen penyusunan komponen pengeluaran rumah tangga dan institusi nirlaba triwulanan/tahunan dan penyusunan SUT/IO sisi uses (054.01.06.2895.007.051).

2.2.3 Target Sampel

Responden SKLNPRT 2021 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sejumlah 10 sampel lembaga panel per triwulan dengan ketentuan bahwa lembaga no profit yang dicacah merupakan lembaga no profit yang melayani rumah tangga di mana entitas legal maupun sosial dibentuk oleh perorangan/kelompok masyarakat dan tidak dikendalikan oleh pemerintah. Selain itu, lembaga no profit juga menyediakan barang/jasa secara gratis dengan harga tidak signifikan secara ekonomi pada anggotanya/rumah tangga/kelompok masyarakat. Sampel diambil secara *purposive sampling* dengan kategori yaitu sebagai berikut:

Target Sampel SKLNPRT Tahun 2021

NO	LAPANGAN USAHA	JUMLAH SAMPEL
1.	Organisasi Kemasyarakatan	2
2.	Organisasi Sosial	1
3.	Organisasi Profesi dan Serikat Buruh	1
4.	Organisasi Kebudayaan, Olahraga, dan Rekreasi	1
5.	Partai Politik	2
6.	Lembaga Keagamaan	3
TOTAL SAMPEL		10

2.2.4 Daftar Petugas

Petugas SKLNPRT 2019 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terdiri dari enam pegawai organik BPS sebagai pencacah serta dua pegawai organik BPS sebagai pengawas dan pemeriksa dokumen sebagai mana yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Daftar Petugas SKLNPRT Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2021

NO	NAMA PETUGAS	JABATAN
1.	Ortje Manahampi	PCL
2.	Reyske M. Jacobs	PCL
3.	Wulandari Ponto, SST.	PCL
4.	Nurtia Katiandagho, SST.	PCL
5.	Nadya Tatum Tsaniya, S.Tr.Stat.	PCL
6.	Anisa Sekarwati, A.Md.Stat.	PCL
7.	Meity C. Sinadia, SE.	PML
8.	Nabella Intan Karasta, S.Tr.Stat.	PML

2.3 Updating Direktori LNPRT

2.3.1 Jadwal Kegiatan

Rangkaian kegiatan pengumpulan data Direktori LNPRT Tahun 2021 dilaksanakan mulai dari Bulan Januari hingga Desember 2021. Rangkaian kegiatan antara lain persiapan dan perencanaan, pencacahan, pengolahan, dan analisis di mana dapat dirinci sebagai berikut:

Jadwal Kegiatan *Updating* Direktori LNPRT Tahun 2021

KEGIATAN	JADWAL
Persiapan dan Perencanaan	Januari - Februari 2021
Perancangan format pengumpulan data dan pedoman	
Pencetakan pedoman	
Pengiriman pedoman ke daerah	
Pengumpulan Data	Maret - Juli 2021
Pengawasan	Maret - Juli 2021
Entri Data	Juli - Oktober 2021
Cleaning Data	Oktober - November 2021
Tabulasi	November - Desember 2021
Laporan	Desember 2021

2.3.2 Pembiayaan

Kegiatan *Updating* Direktori LNPRT 2021 merupakan kegiatan yang pembiayaannya berada pada DIPA BPS Kepulauan Siau tagulandang Biaro. Adapun mata anggaran yang digunakan yaitu pada output publikasi/laporan neraca statistik pengeluaran serta komponen penyusunan komponen pengeluaran rumah tangga dan institusi nirlaba triwulanan/tahunan dan penyusunan SUT/IO sisi uses (054.01.06.2895.007.051).

2.3.3 Target Sampel

Responden dalam kegiatan *Updating* Direktori LNPRT 2021 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sejumlah 10 dinas atau instansi. Dinas atau instansi yang menjadi sampel yaitu yang berpotensi memiliki daftar LNPRT dan sumber data lainnya.

2.3.4 Daftar Petugas

Petugas pada kegiatan *Updating* Direktori LNPRT 2021 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terdiri dari dua pegawai organik BPS. Adapun diantaranya merupakan petugas pencacah dan pengawas yang dapat dirinci sebagai berikut ini:

Daftar Petugas *Updating* Direktori LNPRT Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2021

NO	NAMA PETUGAS	JABATAN
1.	Nabella Intan Karasta, S.Tr.Stat.	PCL
2.	Meity C. Sinadia, SE.	PML

PELAKSANAAN

3.1 SKKRT

3.1.1 Pencacahan

Sebelum melakukan kegiatan pencacahan SKKRT Tahun 2021 dilakukan *briefing* kepada seluruh petugas. Selain itu juga dilakukan persiapan berbagai dokumen seperti kuesioner dan surat tugas.

Secara umum, pelaksanaan pendataan SKKRT selama empat triwulan (April-Desember 2021) di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berjalan dengan baik dan lancar. Petugas mampu memenuhi seluruh target sampel setiap triwulannya. Akan tetapi adanya pandemi Covid-19 menyebabkan kendala dalam pemilihan sampel. Selain itu terdapat perubahan jadwal pencacahan pada triwulan III 2021. Dokumentasi dari pelaksanaan lapangan terdapat pada Lampiran 1.

3.1.2 Pengolahan

Pengolahan hasil pencacahan SKKRT Tahun 2021 dilakukan oleh FUNGSI Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Pengolahan tersebut dilakukan dengan cara mengentry isian kuesioner pada form excel offline untuk triwulan I dan pada <http://webentry.bps.go.id/nrtin/> pada triwulan II sampai triwulan IV.

3.1.3 Permasalahan dan Solusi

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pencacahan SKKRT 2021 di antaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Permasalahan dan Solusi SKKRT Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro Tahun 2021

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Responden kesulitan mengingat harga barang yang telah dikonsumsi selama tiga bulan terakhir.	Melakukan estimasi harga.
2.	Responden tidak memiliki catatan keuangan sehingga isian konsumsi rumah tangga kurang akurat.	Diisi sesuai pengakuan responden, dan dilakukan <i>probing</i> lebih mendalam.
3.	Rincian Total tidak terisi dengan benar karena kelalaian petugas.	Memperbaiki isian kuesioner.
4.	Terdapat isian di konsumsi rumah tangga selama seminggu yang lalu namun tidak terdapat isian di konsumsi rumah tangga selama tiga bulan yang lalu.	Memastikan kembali kepada pencacah mengenai keadaan yang sebenarnya.

3.2 SKLNPRT

3.2.1 Pencacahan

Sebelum melakukan kegiatan pencacahan SKLNPRT Tahun 2021 dilakukan *briefing* kepada seluruh petugas. Selain itu juga dilakukan persiapan berbagai dokumen seperti kuesioner dan surat tugas.

Secara umum, pelaksanaan pendataan SKLNPRT selama empat triwulan (April-Desember 2021) di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berjalan dengan baik dan lancar. Petugas mampu memenuhi seluruh target sampel setiap triwulannya. Dokumentasi dari pelaksanaan lapangan terdapat pada Lampiran 3.

3.2.2 Pengolahan

Proses *entry* hasil pendataan SKLNPRT 2021 di BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dilaksanakan oleh FUNGSI Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro setiap selesai melakukan pencacahan. *Entry* data dilakukan secara *online* di alamat website <http://webentry.bps.go.id/nrtin/>.

3.2.3 Permasalahan dan Solusi

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pencacahan SKLNPR T 2021 di antaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Permasalahan dan Solusi SKLNPR T Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2021

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Lembaga jarang melakukan kegiatan sehingga isian kuesioner sedikit	Diisi sesuai pengakuan responden, dan dilakukan <i>probing</i> lebih mendalam.
2.	Pengurus lembaga sulit ditemui di jam kerja karena sibuk sehingga tidak dapat diganggu.	Membuat janji kapan ada waktu untuk dilakukan pencacahan dan melakukan kunjungan ulang.
3.	Keuangan lembaga tidak dicatat dan pengeluaran biasanya langsung dibayar saat itu juga dengan melakukan iuran mendadak.	Diisi sesuai pengakuan responden, dan dilakukan <i>probing</i> lebih mendalam.
4.	Rincian Total tidak terisi dengan benar karena kelalaian petugas.	Memperbaiki isian kuesioner.

3.3 Updating Direktori LNPRT

3.3.1 Pencacahan

Sebelum melakukan kegiatan *Updating* Direktori LNPRT Tahun 2021 dilakukan *briefing* kepada petugas pengumpul data. Selain itu juga dilakukan persiapan berbagai dokumen seperti daftar LNPRT tahun sebelumnya dan surat tugas.

Secara umum, pelaksanaan pendataan *Updating* Direktori LNPRT Tahun 2021 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berjalan dengan baik dan lancar. Petugas mampu memenuhi seluruh target sampel. Dokumentasi pelaksanaan lapangan terdapat pada Lampiran 5.

3.3.2 Pengolahan

Data hasil pencacahan dientri melalui Sistem Informasi Updating Direktori Non-Profit (SiUDIN) dengan alamat <http://pengolahan.bps.go.id/neraca/siudin/>. Melalui SiUDIN BPS RI, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota dapat melakukan monitoring dan tabulasi hasil pengumpulan data direktori LNPRT secara *real time*.

Dalam SiUDIN, terdapat dua menu entri data, yaitu data dinas dan data lembaga. Data dinas merupakan unit sampel dari kegiatan pengumpulan data direktori LNPRT, yaitu dinas atau sumber data lain yang berpotensi memiliki daftar LNPRT. Sedangkan data lembaga adalah daftar LNPRT yang diperoleh dari dinas atau sumber data lainnya.

3.3.3 Permasalahan dan Solusi

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan *Updating* Direktori LNPRT Tahun 2021 di antaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Permasalahan dan Solusi *Updating* Direktori LNPRT Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2021

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Badan Kesbangpol tidak mengetahui pasti apakah lembaga non profit yang ada di direktori masih aktif.	Diasumsikan LNPRT yang terdaftar masih aktif.
2.	Dinas membutuhkan waktu lama dalam memberikan data.	Melakukan kunjungan ulang ke dinas.

Pelaksanaan Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga (SKKRT), Survei Khusus Lembaga Non-profit yang Melayani Rumah Tangga Triwulanan (SKLNPRT), dan *Updating* Direktori LNPRT di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2021 dari tahapan pembagian petugas hingga pelaksanaan lapangan sudah diusahakan semaksimal mungkin. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki lagi. Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya masukan dan saran yang membangun guna perbaikan kualitas data BPS kedepannya.

Latar Belakang

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB terbagi menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu yang menjadi tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode.

Pemerintah, privat sektor, dan masyarakat memiliki peran dalam menggerakkan PDRB melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki wilayah. Oleh karena itu, pengumpulan data realisasi APBD sangat penting dilakukan melihat sektor tersebut memiliki kontribusi pada perekonomian. Selain itu, kegiatan ini juga terintegrasi dengan pengumpulan data produksi air oleh PDAM. Data dikumpulkan secara triwulanan, untuk memenuhi permintaan data BPS RI dan BPS Provinsi Sulawesi Utara yang melakukan penghitungan PDRB triwulanan.

Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data series yang berkesinambungan setiap triwulan dan setiap tahunnya. Adapun data yang dimaksud yaitu:

- * Data realisasi belanja pegawai
- * Data realisasi belanja barang dan jasa

- * Data realisasi belanja modal
- * Data realisasi belanja bantuan sosial
- * Data realisasi retribusi daerah
- * Data volume air yang disalurkan
- * Data pendapatan penjualan air bersih

Cakupan

Kegiatan pengumpulan data realisasi APBD dan produksi air PDAM setiap triwulannya dilakukan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan sampel Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan dan Perusahaan Daerah Air Minum.

Jadwal Kegiatan

Rangkaian kegiatan pengumpulan data realisasi APBD dan produksi air PDAM Tahun 2021 dilaksanakan secara triwulanan yaitu pada Bulan Januari, April, Juli, dan Oktober di mana dapat dirinci sebagai berikut:

Jadwal Kegiatan Pendataan Realisasi APBD dan Produksi Air Tahun 2021

KEGIATAN	JADWAL
Triwulan IV Tahun 2019	Januari 2021
Triwulan I Tahun 2021	April 2021
Triwulan II Tahun 2021	Juli 2021
Triwulan III Tahun 2021	Oktober 2021

Pembiayaan

Kegiatan pendataan Realisasi APBD dan produksi air Tahun 2021 merupakan kegiatan yang pembiayaannya berada pada DIPA BPS Kepulauan Siau tagulandang Biaro. Adapun

mata anggaran yang digunakan yaitu pada output laporan statistik neraca pengeluaran serta komponen penyusunan komponen pengeluaran pemerintah triwulanan/tahunan dan penyusunan SUT/IO sisi uses (054.01.06.2895.007.101).

Target Sampel

Instansi yang menjadi responden dalam kegiatan pendataan Realisasi APBD dan produksi air 2021 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan PDAM Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Daftar Petugas

Petugas pada kegiatan pendataan Realisasi APBD dan produksi air 2021 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terdiri dari satu pegawai organik BPS yang merupakan petugas pencacah di mana dapat dirinci sebagai berikut ini:

Daftar Petugas Pendataan Realisasi APBD dan Produksi Air
Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2021

NO	NAMA PETUGAS	JABATAN
1.	Nabella Intan Karasta, S.Tr.Stat.	PCL
2.	Meity Chintya Sinadia, SE.	PML

Pencacahan

Sebelum melakukan kegiatan pendataan Realisasi APBD dan produksi air Tahun 2021 dilakukan *briefing* kepada petugas pengumpul data. Selain itu juga dilakukan persiapan berbagai dokumen seperti surat permohonan data dan surat tugas.

Secara umum, pelaksanaan pendataan Realisasi APBD dan produksi air 2021 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berjalan dengan baik dan lancar sehingga

petugas mampu memenuhi seluruh target sampel. Akan tetapi pada pendataan triwulan II sedikit ditemukan kendala dengan adanya WFH (*Work From Home*), petugas tetap melakukan pendataan secara online melalui aplikasi *whatsapp*. Dokumentasi pelaksanaan lapangan terdapat pada Lampiran 1.

Pengolahan

Pengolahan data Realisasi APBD dan produksi air triwulanan dilakukan oleh Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Sulawesi Utara. Oleh karena itu, dilakukan *pen-scan-an* pada hasil pengumpulan data dan kemudian dikirimkan melalui email ke Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik.

Permasalahan dan Solusi

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan data Realisasi APBD dan produksi air di antaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Permasalahan dan Solusi Pendataan Realisasi APBD dan Produksi Air
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2021

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Surat permintaan data hilang dan responden lupa untuk menyiapkan data yang diminta.	Dilakukan <i>follow up</i> secara berkala kepada responden.

Pengumpulan data Realisasi APBD dan produksi air triwulanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2021 dari tahapan pembagian petugas hingga pelaksanaan lapangan sudah diusahakan semaksimal mungkin. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki lagi. Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya masukan dan saran yang membangun guna perbaikan kualitas data BPS kedepannya

1.1 PMTB

1.1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan Prioritas Nasional tahun 2018 yaitu “Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata” program “Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja” dibutuhkan data investasi fisik atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang telah didisagregasi menurut institusi dan lapangan usaha. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan kegiatan Penyusunan Disagregasi PMTB.

Dengan dilaksanakannya kegiatan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2021 diharapkan akan menghasilkan data rinci penambahan dan pengurangan barang modal menurut jenis aset tetap, sektor institusi, dan lapangan usaha sebagai dasar untuk perumusan berbagai kebijakan dan analisis investasi secara makro maupun mikro. Selain itu, hasil dari Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2021 ini juga dapat digunakan sebagai sumber data dalam penyusunan stok kapital.

1.1.2 Maksud dan Tujuan

Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2021 bertujuan untuk memperoleh data yang akan mendukung perhitungan disagregasi PMTB, serta meningkatkan kualitas data neraca nasional lain yang terkait dengan investasi. Tersedianya data PMTB yang rinci akan membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan iklim investasi dan mempermudah investor dalam berusaha, serta membantu dunia usaha dalam menentukan arah kebijakan usahanya.

1.1.3 Cakupan

Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2021 dilaksanakan pada 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia. Kegiatan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB tahun 2021 hanya mencakup sektor dinas.

1.2 INVENTORI

1.2.4 Latar Belakang

Inventori merupakan barang persediaan yang dikuasai oleh suatu unit dengan tujuan untuk digunakan sendiri, dijual, atau diberikan pada unit lain. Inventori memiliki peran penting dalam keberlangsungan kegiatan perekonomian baik dalam ruang lingkup mikro maupun makro. Bertolak dari pentingnya peran inventori dalam perekonomian baik dari lingkup mikro maupun makro, diperlukan ketersediaan data inventori melalui metode penghitungan inventori yang tepat. Kelemahan penghitungan inventori yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini secara bertahap mulai diperbaiki melalui ketersediaan data yang lebih baik. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan informasi inventori yang lebih rinci melalui pelaksanaan Survei Khusus Studi Penyusunan Perubahan Inventori (SKSPPI).

1.2.5 Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan kegiatan SKSPPI Tahun 2021 memiliki beberapa maksud dan tujuan, antara lain yaitu sebagai berikut:

- * Memperoleh gambaran mengenai kuantitas dan nilai posisi inventori/persediaan pada awal tahun dan akhir tahun

- * Memperoleh pola dan struktur inventori menurut jenis komoditas dan klasifikasi lapangan usaha
- * Memperoleh informasi mengenai rasio inventori terhadap nilai produksi (*output*) dan polanya pada berbagai lapangan usaha
- * Menerapkan SNA 2008 yang berkaitan dengan perubahan inventori

1.2.6 Cakupan

SKSPPI dilaksanakan di 34 provinsi di Indonesia. Jumlah sampel telah dialokasikan secara proporsional untuk setiap kabupaten/kota berdasarkan hasil listing SE2016 terkait jumlah UMB dan UMK. Jumlah sampel menurut lapangan usaha ditentukan oleh setiap kabupaten/kota secara proporsional berdasarkan *share* PDRB lapangan usaha.

Menurut SNA 2008, perusahaan didefinisikan sebagai suatu unit institusi yang terlibat dalam kegiatan produksi dengan tujuan menghasilkan barang/jasa dan memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Dalam hal ini, unit sampel SKSPPI 2021 adalah perusahaan yang bergerak di berbagai lapangan usaha dengan cakupan utamanya ditujukan kepada perusahaan yang memiliki inventori/persediaan dan mempunyai laporan keuangan/sistem pencatatan administrasi keuangan yang baik.

PERENCANAAN

2.3 PMTB

2.1.5 Jadwal Kegiatan

Rangkaian kegiatan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2021 berlangsung mulai dari Bulan Januari hingga Desember 2021. Rangkaian kegiatan tersebut antara lain persiapan dan perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan dengan rincian sebagai berikut:

Jadwal Kegiatan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB Tahun 2021

KEGIATAN	JADWAL
A. Persiapan dan Perencanaan	
Penyusunan metodologi, pedoman, dan daftar isian	Januari - Februari 2021
Penggandaan pedoman dan daftar isian	Februari 2021
Pelatihan instruktur pelatihan petugas pencacahan	Februari 2021
Pelatihan petugas pencacahan di daerah	Maret 2021
B. Pelaksanaan	
Pengambilan sampel	Maret - April 2021
Updating daftar sampel dinas	Maret - Juni 2021
Pencacahan	Maret - Juni 2021
Pemeriksaan	April - Juni 2021
Pengentrian data kuesioner hasil pencacahan	April - Agustus 2021
C. Pengolahan	
Penyusunan program pengolahan	Februari - April 2021
Analisis tabulasi hasil entri	Juli - Agustus 2021
Analisis data hasil pengolahan	September - Oktober 2021
Laporan Hasil	November - Desember 2021

2.1.6 Pembiayaan

Kegiatan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB Tahun 2021 merupakan kegiatan yang pembiayaannya berada pada DIPA BPS Kepulauan Siau tagulandang Biaro. Adapun mata anggaran yang digunakan yaitu pada output publikasi/laporan neraca statistik pengeluaran serta komponen penyusunan komponen PMTB dan inventori triwulanan/tahunan dan penyusunan SUT/IO sisi uses (054.01.06.2895.007.204).

2.1.7 Target Sampel

Responden dalam Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2021 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sejumlah 8 sampel. Adapun dapat dirinci sebagai berikut:

Target Sampel Survei Penyusunan Disagregasi PMTB Tahun 2021

NO	LAPANGAN USAHA	JUMLAH SAMPEL
1.	Dinas Perikanan	1
2.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III	1
3.	Dinas Pangan dan Pertanian	3
4.	Samsat	1
5.	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	1
6.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1
TOTAL SAMPEL		8

2.1.8 Daftar Petugas

Petugas Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2021 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terdiri dari dua pegawai organik BPS, satu pegawai sebagai pencacah

dan satu pegawai sebagai pengawas dan pemeriksa dokumen. Adapun rincian petugas kegiatan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

Daftar Petugas Survei Penyusunan Disagregasi PMTB
Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2021

NO	NAMA PETUGAS	JABATAN
1.	Nabella Intan Karasta, S.Tr.Stat.	PCL
2.	Meity C. Sinadia, SE.	PML

2.4 INVENTORI

2.2.5 Jadwal Kegiatan

Rangkaian kegiatan Survei Khusus Studi Penyusunan Perubahan Inventori (SKSPPI) 2021 berlangsung mulai dari Bulan Januari hingga Desember 2021. Rangkaian kegiatan tersebut antara lain persiapan dan perencanaan, pencacahan, dan pengolahan dengan rincian sebagai berikut:

Jadwal Kegiatan SKSPPI Tahun 2021

KEGIATAN	JADWAL
A. Persiapan dan Perencanaan	
Penyusunan metodologi, pedoman, dan daftar isian	Januari - Februari 2021
Penggandaan pedoman dan daftar isian	Februari 2021
Pelatihan instruktur pelatihan petugas pencacahan	Februari 2021
Pelatihan petugas pencacahan di daerah	Maret 2021
B. Pelaksanaan	
Pengambilan sampel	Maret - April 2021
Pencacahan	Maret - Juni 2021
Pemeriksaan	Maret - Juli 2021
Pengentrian data hasil pencacahan	Maret - Juli 2021

C. Pengolahan	
Penyusunan program entri komputer	Februari 2021
Pengolahan hasil entri	Agustus 2021
Tabulasi	September 2021
Laporan Hasil	November - Desember 2021

2.2.6 Pembiayaan

Kegiatan SKSPPI Tahun 2021 merupakan kegiatan yang pembiayaannya berada pada DIPA BPS Kepulauan Siau tagulandang Biaro. Adapun mata anggaran yang digunakan yaitu pada output publikasi/laporan neraca statistik pengeluaran serta komponen penyusunan komponen PMTB dan inventori triwulanan/tahunan dan penyusunan SUT/IO sisi uses (054.01.06.2895.007.204).

2.2.7 Target Sampel

Responden dalam Survei Khusus Studi Penyusunan Perubahan Inventori (SKSPPI) 2021 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sejumlah 20 sampel. Pengambilan sampel SKSPPI dilakukan secara *purposive sampling* pada perusahaan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Perusahaan dengan basis establishment (pusat/tunggal/cabang)
2. Mempunyai laporan keuangan/catatan administrasi yang baik
3. Utamanya ditujukan untuk perusahaan yang memiliki inventori/persediaan
4. Kegiatan usaha/produksi hanya dilakukan di wilayah pencacahan atau mampu memisahkan informasi di wilayah pencacahan saja.

Selain itu, pengambilan sampel pada kegiatan SKSPPI berdasarkan kategori-kategori lapangan usaha antara lain

Target Sampel SKSPPI Tahun 2021

NO	LAPANGAN USAHA	JUMLAH SAMPEL
1.	Pertanian dan Perikanan	3
2.	Industri Pengolahan	2
3.	Konstruksi	2
4.	Perdagangan dan Reparasi	6
5.	Pengangkutan dan Pergudangan	2
6.	Penyedia Akomodasi dan Makanan Minuman	4
7.	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	1
TOTAL SAMPEL		20

2.2.8 Daftar Petugas

Petugas Survei Khusus Studi Penyusunan Perubahan Inventori (SKSPPI) 2021 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terdiri dari lima pegawai organik BPS sebagai pencacah. Selain itu juga terdapat satu pegawai organik BPS sebagai pengawas dan pemeriksa dokumen. Adapun rincian petugas kegiatan SKSPPI Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

Daftar Petugas SKSPPI Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2021

NO	NAMA PETUGAS	JABATAN
1.	Ortje Manahampi	PCL
2.	Reyske M. Jacobs	PCL
3.	Wulandari Ponto, SST.	PCL
4.	Nurtia Katiandagho, SST.	PCL
5.	Nabella Intan Karasta, S.Tr.Stat.	PCL
6.	Meity C. Sinadia, SE.	PML

PELAKSANAAN

3.3 PMTB

3.1.4 Pencacahan

Sebelum melakukan kegiatan pencacahan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB Tahun 2021 dilakukan *briefing* kepada seluruh petugas. Selain itu juga dilakukan persiapan berbagai dokumen seperti kuesioner dan surat tugas.

Secara umum selama bulan September 2021, pelaksanaan pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2021 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berjalan dengan baik dan lancar meskipun tidak sesuai dengan jadwal perencanaan dikarenakan adanya penundaan akibat pandemi virus COVID-19. Petugas mampu memenuhi seluruh target sampel. Dokumentasi pelaksanaan lapangan terdapat pada Lampiran 1.

3.1.5 Pengolahan

Pengolahan hasil pencacahan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB Tahun 2021 dilakukan oleh FUNGSI Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Pengolahan tersebut dilakukan dengan cara mengentry isian kuesioner pada <http://nmln.bps.go.id/pmtb/>. Pengolahan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB tersebut dilaksanakan pada Bulan Oktober 2021, mundur dari jadwal perencanaan karena jadwal pencacahan yang mundur akibat pandemi virus COVID-19.

3.1.6 Permasalahan dan Solusi

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pencacahan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2021 di antaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Permasalahan dan Solusi Survei Penyusunan Disagregasi PMTB
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2021

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Terdapat beberapa responden yang sulit dalam memberikan data.	PML melakukan pendampingan pada saat pencacahan.
2.	Terdapat data yang tidak tersedia pada dinas yang menjadi sampel.	Pencacahan pada dinas terkait untuk melengkapi isian data.

3.4 INVENTORI

3.2.4 Pencacahan

Sebelum melakukan kegiatan pencacahan SKSPPI Tahun 2021 dilakukan *briefing* kepada seluruh petugas. Selain itu juga dilakukan persiapan berbagai dokumen seperti kuesioner dan surat tugas.

Secara umum selama bulan Juli 2021, pelaksanaan pendataan SKSPPI 2021 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berjalan dengan baik dan lancar meskipun tidak sesuai dengan jadwal perencanaan dikarenakan adanya penundaan akibat pandemi virus COVID-19. Petugas mampu memenuhi seluruh target sampel. Dokumentasi pelaksanaan lapangan terdapat pada Lampiran 3.

3.2.5 Pengolahan

Pengolahan hasil pencacahan SKSPPI Tahun 2021 dilakukan oleh FUNGSI Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Pengolahan tersebut dilakukan dengan cara mengentry isian kuesioner pada <http://nmln.bps.go.id/skspji/>. Pengolahan SPSPI tersebut dilaksanakan pada Bulan

Oktober 2021, mundur dari jadwal perencanaan karena jadwal pencacahan yang mundur akibat pandemi virus COVID-19.

3.2.6 Permasalahan dan Solusi

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pencacahan SKSPPI 2021 di antaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Permasalahan dan Solusi SKSPPI
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2021

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Responden kesulitan mengingat harga pembelian aset yang dimiliki.	Melakukan estimasi harga.
2.	Responden tidak memiliki catatan keuangan sehingga ragu saat mengisi Blok IVA nilai produksi selama setahun.	Diisi sesuai pengakuan responden, dan dilakukan <i>probing</i> lebih mendalam.
3.	Responden kesulitan menyebutkan jumlah posisi inventori tiap triwulan.	Diisi sesuai pengakuan responden, dan dilakukan <i>probing</i> lebih mendalam.

Pelaksanaan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB dan Survei Khusus Studi Penyusunan Perubahan Inventori (SKSPPI) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2021 dari tahapan pembagian petugas hingga pelaksanaan lapangan sudah diusahakan semaksimal mungkin. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki lagi. Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya masukan dan saran yang membangun guna perbaikan kualitas data BPS kedepannya

KONSOLIDASI PDRB MENURUT PENGELUARAN

Latar Belakang

BPS memiliki kebutuhan akan data ekspor impor antar wilayah yang lengkap, yang meliputi: informasi tentang nilai/indikator nilai, asal/tujuan, jenis komoditas yang diperdagangkan. Transaksi ekspor-impor antar provinsi merupakan salah satu komponen dalam pembentukan PDRB menurut pengeluaran. Kebutuhan data ekspor-impor antar wilayah, berasal dari:

- Statistik bongkar muat barang di pelabuhan (SIMOPEL)
- Statistik arus barang melalui jembatan timbang
- Survei lalu-lintas barang

Semua data tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan data untuk penyusunan Ekspor Impor antar wilayah pada PDRB Pengeluaran (baik provinsi maupun kab/kota). Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan informasi inventori yang lebih rinci melalui pelaksanaan Survei Matriks dan Arus Komoditas (SMAK).

Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan kegiatan SMAK Tahun 2021 memiliki beberapa maksud dan tujuan, antara lain yaitu sebagai berikut:

- * Mendapat gambaran tentang transaksi ekspor-impor antar provinsi untuk komoditas yang dominan di suatu daerah dan diperdagangkan keluar daerah
- * Mencatat transaksi ekspor ke luar daerah berdasarkan informasi dari sisi *supply* (produksi domestik dan impor luar negeri)

- * Memperoleh informasi mengenai produk unggulan
- * Mendapatkan alokasi ekspor impor menurut komoditas untuk keperluan IO/SUT

Cakupan

SMAK dilaksanakan di 34 provinsi, dengan responden produsen domestik dan importir barang dari luar negeri. Produsen domestik merupakan perorangan/perusahaan yang menghasilkan produk unggulan kabupaten/kota tersebut dan dipasarkan ke kabupaten/kota lain. Pada responden perusahaan domestic, BPS Provinsi menentukan perusahaan/perorangan yang akan menjadi sampel dengan ketentuan perusahaan itu memiliki peran yang besar.

Sedangkan perusahaan importer merupakan perusahaan yang mengimpor barang dari luar negeri dan sebagian atau seluruhnya dipasarkan ke kabupaten/kota lain (tanpa melakukan proses pengolahan). Dalam hal ini, BPS Provinsi menentukan perusahaan yang akan menjadi sampel dengan ketentuan perusahaan itu memiliki komoditas impor luar negeri yang dominan di kab/kota dan berperan besar dalam kegiatan impor komoditas tersebut.

Jadwal Kegiatan

Rangkaian kegiatan Survei Matriks dan Arus Komoditas (SMAK) 2021 berlangsung mulai dari Bulan Januari hingga Desember 2021. Rangkaian kegiatan tersebut antara lain persiapan dan perencanaan, pencacahan, dan pengolahan dengan rincian pada table di bawah ini.

Jadwal Kegiatan SMAK Tahun 2021

KEGIATAN	JADWAL
A. Persiapan dan Perencanaan	
Penyusunan Metodologi, Pedoman Pencacahan dan Daftar Isian	Januari - Februari 2021
Penggandaan Pedoman Pencacahan dan Daftar Isian	Februari 2021

Pengiriman dokumen ke daerah	Maret 2021
B. Pelaksanaan	
Pencacahan	Maret - September 2021
Pemeriksaan dan pengawasan	Maret - September 2021
C. Pengolahan	
Penyusunan program komputer	April - Juni 2021
Pengolahan pra komputer	Mei - Oktober 2021
Pengolahan komputer	Mei - Oktober 2021
D. Analisis dan Penyajian	
Tabelasi	Oktober - November 2019
Analisis dan penulisan laporan	Oktober - November 2019
Penggandaan dan diseminasi laporan	Desember 2019

Pembiayaan

Kegiatan SMAK Tahun 2021 merupakan kegiatan yang pembiayaannya berada pada DIPA BPS Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Adapun mata anggaran yang digunakan yaitu pada output laporan statistik neraca pengeluaran serta komponen penyusunan konsolidasi PDRB Pengeluaran triwulanan dan tahunan (054.01.06.2895.007.302).

Target Sampel

Responden dalam kegiatan Survei Matriks dan Arus Komoditas (SMAK) 2021 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sejumlah 25 sampel. Pengambilan sampel SMAK dilakukan secara *purposive sampling* pada produsen domestik yang bergerak pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan karena sektor tersebut merupakan sektor unggulan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Daftar Petugas

Petugas pada kegiatan SMAK 2021 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terdiri dari 8 pegawai organik BPS sebagai pencacah dan 1 pegawai organik BPS sebagai pengawas dan pemeriksa dokumen. Adapun rincian petugas SMAK 2021 BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yaitu sebagai berikut:

Daftar Petugas SMAK Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2021

NO	NAMA PETUGAS	JABATAN
1.	Ortje Manahampi	PCL
2.	Reyske M. Jacobs	PCL
3.	Wulandari Ponto, SST.	PCL
4.	Nurtia Katiandagho, SST.	PCL
5.	Intan Angelia Senduk, SST.	PCL
6.	Nadya Tatum Tsaniya, S.Tr.Stat.	PCL
7.	Anisa Sekarwati, A.Md.Stat.	PCL
8.	Nabella Intan Karasta, S.Tr.Stat.	PCL
9.	Meity C. Sinadia, SE.	PML

Pencacahan

Sebelum melakukan kegiatan pencacahan SMAK Tahun 2021 dilakukan *briefing* kepada seluruh petugas. Selain itu juga dilakukan persiapan berbagai dokumen seperti kuesioner dan surat tugas.

Secara umum, pelaksanaan pendataan SMAK 2021 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berjalan dengan baik dan lancar. Petugas mampu memenuhi seluruh target sampel. Dokumentasi pelaksanaan lapangan terdapat pada Lampiran 1.

Pengolahan

Proses *entry* hasil pendataan SMAK Tahun 2021 di BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dilaksanakan oleh FUNGSI Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro setiap selesai melakukan pencacahan. *Entry* data dilakukan secara *online* di alamat *website* pengolahan.bps.go.id.

Permasalahan dan Solusi

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pencacahan SMAK Tahun 2021 di antaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Permasalahan dan Solusi SMAK Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2021

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Responden tidak berada di rumah dan tidak dapat ditemui.	Membuat janji kapan ada waktu untuk dilakukan pencacahan dan melakukan kunjungan ulang.
2.	Responden tidak memiliki catatan finansial mengenai hasil produksi dari usahanya.	Diisi sesuai pengakuan responden, dan dilakukan <i>probing</i> lebih mendalam.
3.	Responden kesulitan mengingat jumlah pengiriman ke luar kota maupun luar provinsi.	Diisi sesuai pengakuan responden, dan dilakukan <i>probing</i> lebih mendalam.

Pencacahan Survei Maktriks dan Arus Komoditas (SMAK) di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2021 dari tahapan pembagian petugas hingga pelaksanaan lapangan sudah diusahakan semaksimal mungkin. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki lagi. Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya masukan dan saran yang membangun guna perbaikan kualitas data BPS kedepannya.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://sitarokab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO**

Jl. Sunggu, Kelurahan Paniki Lingkungan IV, Kec. Siau Barat, 95862

Email: bps7108@bps.go.id

Homepage: <http://sitarokab.bps.go.id>